



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hikmatnya sehingga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang diamanatkan dipundak kita sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan kepada masyarakat Ngada tercinta sepanjang tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Ngada Tahun 2024 juga disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara konstitusional terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki.

Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu pemerintahan daerah dan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai kewajiban kepala daerah dalam menyelesaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, tersusunnya dokumen LPPD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama semua pihak. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas segala upaya maksimalnya. Kami menyadari bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentunya tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad yang bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki dan adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Demikian pula laporan ini pun belum sempurna, baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu berbagai kritik dan saran yang ada sebagai masukan bagi pemerintah daerah, sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan laporan ini dan pada akhirnya bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ngada.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT yang dengan berbagai cara telah menunjukkan perhatian terhadap pembangunan dan telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini.



Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati seluruh usaha yang telah kita kerjakan demi terwujudnya masyarakat Ngada dengan taraf hidup yang berkualitas, mandiri, berbudaya, unggul dan sejahtera berlandaskan etos kerja yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

Terima Kasih.

Bajawa, 27 Maret 2025

BUPATI NGADA

RAYMUNDUS BENA, S.S, M.Hum



DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Telah Direviu	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	BAB I - 1
1.1 Latar Belakang.....	BAB I - 1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	BAB I - 1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	BAB I - 24
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	BAB I - 40
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	BAB II- 54
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	BAB II - 54
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	BAB II - 54
2. Angka Kemiskinan.....	BAB II - 55
3. Angka Pengangguran.....	BAB II - 57
4. Pertumbuhan Ekonomi.....	BAB II - 58
5. Pendapatan Per Kapita.....	BAB II - 59
6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).....	BAB II - 60
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	BAB II - 62
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	BAB II - 61
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	BAB II - 77
2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	BAB II - 80
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	BAB II - 80
2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	BAB II - 84
2.3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	BAB II - 129
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	BAB III- 132
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota.....	BAB III- 145
BAB IV PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	BAB IV- 145
4.1 Urusan Pendidikan.....	BAB IV- 145
4.2 Urusan Kesehatan	BAB IV- 148
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	BAB IV- 160
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	BAB IV- 162
4.5 Urusan Kententeraman dan Ketertiban Umum.....	BAB IV- 163



	4.6 Urusan Sosial.....	BAB IV-	170
BAB V	PENUTUP.....	BAB V -	179



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembentukan 6 Kecamatan di Wilayah Propinsi NTT;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Pebruari 1962 Nomor Pem.66/1/2 tentang Pembentukan 64 buah Kecamatan dalam Propinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tanggal 20 Mei 1963 Nomor Pem.66/1/32 tentang Pemekaran Kecamatan Keo menjadi Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Juli 1967 Nomor Pem.66/1/32 tentang pembentukan Kecamatan *Wogo Mangulewa*;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Nomor 19 Tahun 1970 tentang pembentukan Kopeta Bajawa;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 1970 tentang pembentukan *Perwakilan Kecamatan Aesesa* dan *Perwakilan Kecamatan Bajawa* ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolowae di Wilayah Kabupaten Ngada;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Jerebuu, Keo Tengah dan Riung Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Riung Selatan dan Aesesa Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan nama kecamatan Riung Selatan menjadi Kecamatan Wolomeze;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Inerie.

B. Data Geografis Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah daratan Kabupaten Ngada adalah seluas 173.683,29 Ha. Wilayah administrasi Kabupaten Ngada tahun 2025 terdiri atas 12 kecamatan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Riung dengan luas 35.190,31 Ha (20%). Wilayah terkecil adalah Kecamatan Jerebuu dengan luas 4.849,76 Ha (4%). Batas-batas wilayah administratif adalah:



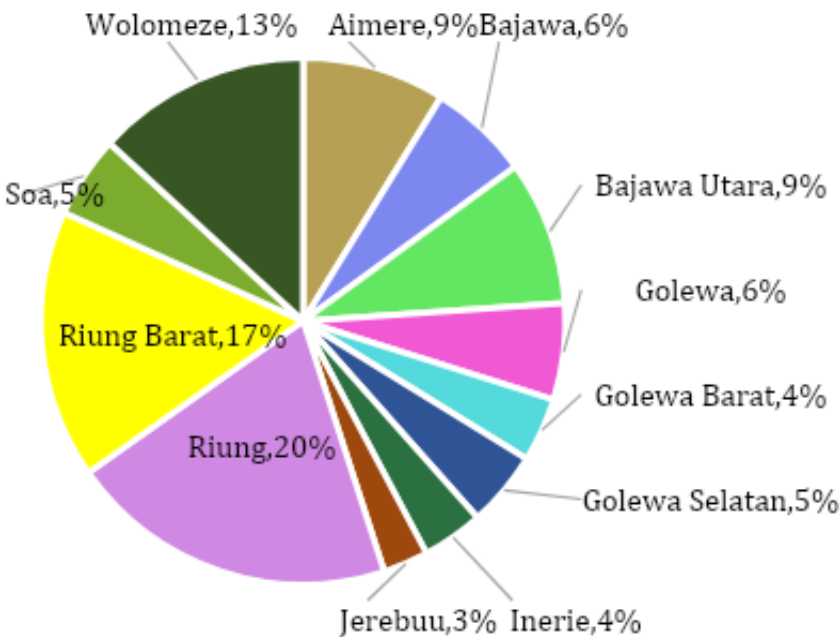
Sebelah Selatan : Laut Sawu
Sebelah Utara : Laut Flores
Sebelah Barat : Kabupaten Manggarai Timur
Sebelah Timur : Kabupaten Nagekeo
Berikut tabel luas wilayah menurut kecamatan, diagram, dan peta administrasi Kabupaten Ngada.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Ngada

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Aimere	15.324,07	6%
2	Bajawa	10.781,95	8%
3	Bajawa Utara	15.429,73	10%
4	Golewa	10.276,18	5%
5	Golewa Barat	6.853,78	5%
6	Golewa Selatan	8.056,82	6%
7	Inerie	6.571,62	5%
8	Jerebuu	4.849,76	4%
9	Riung	35.190,31	20%
10	Riung Barat	28.672,23	19%
11	Soa	8.735,06	6%
12	Wolomeze	22.941,78	6%
Jumlah		173.683,29	100 %

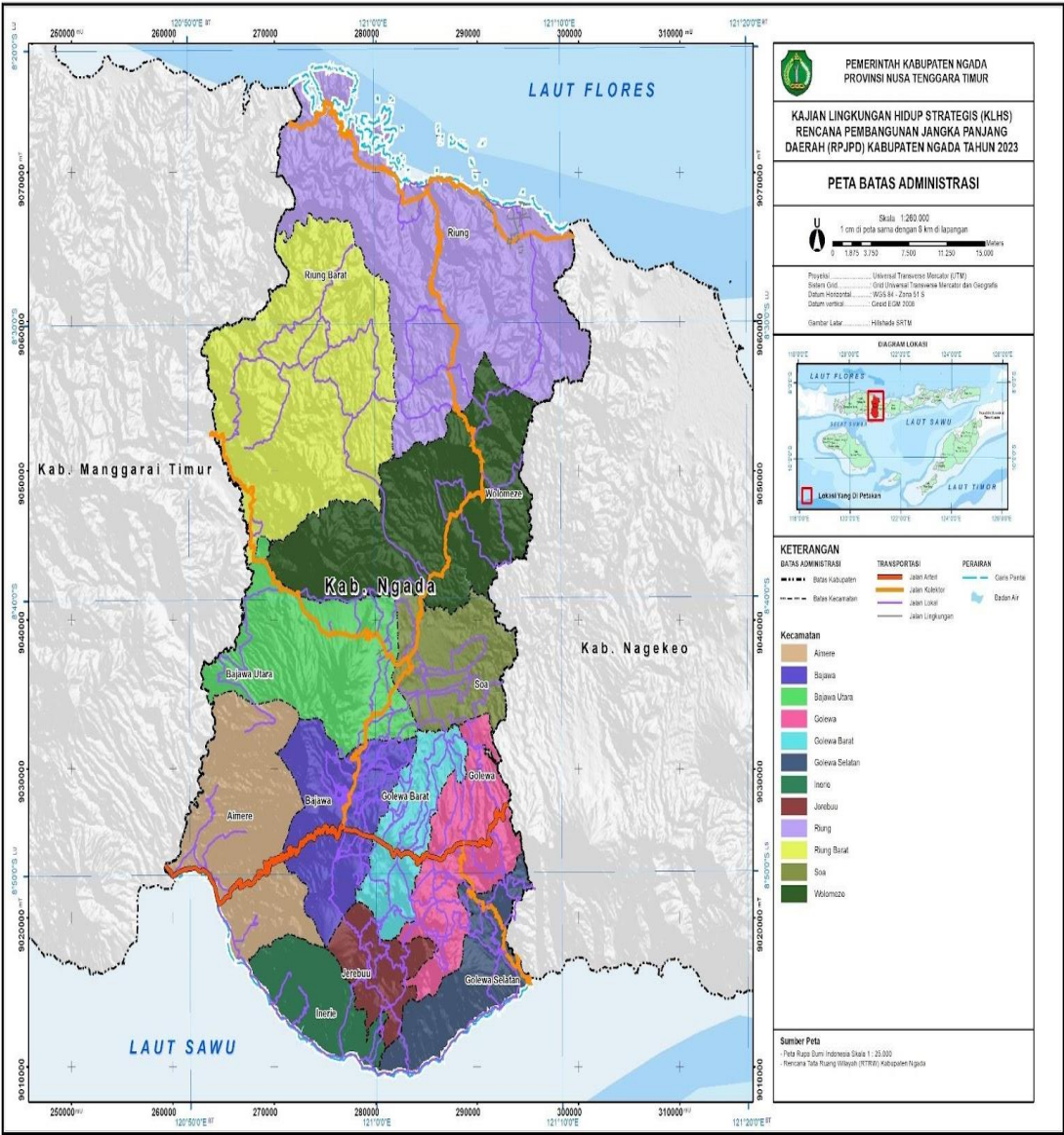
Sumber: KLHS RPJPD berdasarkan Permendagri No.44 tahun 2019, Permendagri No.55 tahun 2020

Gambar 1. 1
Diagram Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngada





Gambar 1.2 Peta Batas Administrasi Kabupaten Ngada



2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Ngada terletak diantara 8 ° 20' 24.28" – 8 ° 57' 28.39" Lintang Selatan dan 120° 48' 29.26" – 121° 11' 8.57" Bujur Timur. Secara Geostrategik posisi Kabupaten Ngada yang berada di tengah – tengah Pulau Flores serta terletak diantara dua lautan yakni Laut Sawu dan Laut Flores memungkinkan Ngada dilimpahi dengan potensi laut yang banyak yang memungkinkan untuk menjadi potensi pengembangan bidang pariwisata dan ekonomi sedangkan dalam bidang transportasi Ngada menjadi jalur lalu lintas yang menghubungkan wilayah di Flores Bagian Barat dengan Flores Bagian Timur, Pulau Timor, Pulau Sumba serta wilayah lain di Indonesia.

3. Topografi

Keadaan topografi dapat digambarkan melalui ketinggian beberapa wilayah. Faktor ketinggian merupakan unsur yang penting dalam merencanakan peruntukan penggunaan tanah. Secara umum topografi di Kabupaten Ngada terdiri atas 0-250 m, 250-500 m, 500-750 m, 750-1.000 m, dan 1.000-2.184 m. Kabupaten Ngada didominasi oleh kondisi topografi 500-750 m seluas 42095,76 Ha. Berikut tabel, diagram, dan peta topografi Kabupaten Ngada.



Tabel 1.2
Kondisi Topografi Kabupaten Ngada

No.	Kecamatan	Klasifikasi Topografi	Luas (Ha)
1	Aimere	0-250 m	4.390,81
		250-500 m	4.386,11
		500-750 m	3.579,29
		750-1.000 m	1.986,28
		1.000-2.184 m	1.005,34
Jumlah			15.347,83
2	Bajawa	250-500 m	5,05
		500-750 m	300,09
		750-1.000 m	1.681,89
		1.000-2.184 m	8.799,65
Jumlah			10.786,68
3	Bajawa Utara	0-250 m	58,09
		250-500 m	2.526,08
		500-750 m	6.296,94
		750-1.000 m	2.962,64
		1.000-2.184 m	3.592,79
Jumlah			15.436,54
4	Golewa	0-250 m	4,37
		250-500 m	823,13
		500-750 m	2.090,47
		750-1.000 m	3.623,39
		1.000-2.184 m	3.670,41
Jumlah			10.211,77
5	Golewa Barat	250-500 m	701,07
		500-750 m	1.334,53
		750-1.000 m	1.114
		1.000-2.184 m	3.706,66
Jumlah			6.856,26
6	Golewa Selatan	0-250 m	2.296,86
		250-500 m	2.181,99
		500-750 m	2.253,95
		750-1.000 m	1.040,12
		1.000-2.184 m	449,82
Jumlah			8.055
7	Inerie	0-250 m	2.296,86
		250-500 m	2.043,1
		500-750 m	1.094,41
		750-1.000 m	523,78
		1.000-2.184 m	625,64
Jumlah			6.583,79
8	Jerebuu	0-250 m	38,24
		250-500 m	964,41
		500-750 m	1.638,6
		750-1.000 m	966,76
		1.000-2.184 m	1.315,71
Jumlah			4.923,72
9	Riung	0-250 m	14.127,9



No.	Kecamatan	Klasifikasi Topografi	Luas (Ha)
		250-500 m	9.196,33
		500-750 m	5.493,54
		750-1.000 m	5.878,51
		1.000-2.184 m	360,45
Jumlah			35.056,73
10	Riung Barat	0-250 m	274,67
		250-500 m	2.620,7
		500-750 m	8.015,1
		750-1.000 m	14.904,1
		1.000-2.184 m	2.875,2
Jumlah			28.689,77
11	Soa	0-250 m	378,60
		250-500 m	6.786,31
		500-750 m	1.570,53
Jumlah			8.735,45
12	Wolomeze	0-250 m	6,10
		250-500 m	7.799,15
		500-750 m	8.428,31
		750-1.000 m	4.680,03
		1.000-2.184 m	2.036,16
Jumlah			22.949,75
Kabupaten Ngada			173.683,29

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2025

4. Kondisi Geologi

Formasi geologi yang terdapat di Kabupaten Ngada terdiri atas Batuan gunung api muda, Endapan pantai, Formasi kiro, Formasi noil toko, Alluvial dan endapan koastal, Produk batuan gunung api tua, Diorit kuarsa, Formasi bari (atambua), Formasi laka, Formasi waihekang, dan Tanahau.

Kabupaten Ngada didominasi oleh produk batuan gunung api tua seluas 10.276,35 Ha. Kecamatan dengan komposisi formasi geologi terbanyak yaitu Kecamatan Riung meliputi Diorit kuarsa, Aluvial dan endapan koastal, Formasi Bari (atambua), Formasi Kiro, Formasi Laka, Formasi Noil Toko, Formasi Waihekang, dan Tanahau. Berikut tabel formasi geologi, diagram, dan peta geologi Kabupaten Ngada.

Tabel 1.3
Formasi Geologi Kabupaten Ngada

No.	Kecamatan	Formasi Geologi	Luas (Ha)
1	Aimere	Endapan Pantai	485,05
		Batuan Gunungapi Muda	737,82
		Produk Batuan Gunungapi Tua	14.101,20
		Jumlah	15.324,07
2	Bajawa	Batuan Gunungapi Muda	793,49
		Produk Batuan Gunungapi Tua	10.007,78
		Jumlah	10.801,28
3	Bajawa Utara	Bantuan Gunungapi Muda	3.224,82
		Produk Batuan Gunungapi Tua	12.204,91
		Jumlah	15.429,73



No.	Kecamatan	Formasi Geologi	Luas (Ha)
4	Golewa	Batuan Gunungapi Muda	2.296,44
		Produk Batuan Gunungapi Tua	7.979,74
		Jumlah	10.276,18
5	Golewa Barat	Produk Batuan Gunungapi Tua	6.853,78
		Jumlah	6.853,78
6	Golewa Selatan	Batuan Gunungapi Muda	475,35
		Produk Batuan Gunungapi Tua	7.581,47
		Jumlah	8.056,82
7	Inerie	Batuan Gunungapi Muda	2.748,42
		Produk Batuan Gunungapi Tua	3.839,44
		Jumlah	6.587,86
8	Jerebuu	Produk Batuan Gunungapi Tua	4.814,19
		Jumlah	4.814,19
9	Riung	Aluvial dan Endapan Koastal	2.490,06
		Diorit Kuarsa	946,50
		Formasi Bari (atambua)	7.502,87
		Formasi Kiro	13.914,59
		Formasi Laka	917,53
		Formasi Noil Toko	6.496,35
		Formasi Waihekang	122,89
		Tanahau	2.820,25
		Jumlah	35.211,04
10	Riung Barat	Formasi Bari (atambua)	5.801,61
		Formasi Laka	1.246,04
		Formasi Noil Toko	179,89
		Produk Bantuan Gunungapi Tua	11.362,77
		Tanahau	10.135,02
		Jumlah	28.725,34
11	Soa	Produk Batuan Gunungapi Tua	8.735,06
		Jumlah	8.735,06
12	Wolomeze	Formasi Kiro	1.160,93
		Formasi Laka	7.206,62
		Produk Batuan Gunungapi Tua	14.500,40
		Jumlah	22.867,94
Jumlah Keseluruhan			173.683,29

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2025

5. Kondisi Hidrologi

5.1 Mata Air

Mata air adalah sebuah keadaan alami di mana air tanah mengalir keluar dari akuifer menuju permukaan tanah yang menjadi sumber air bersih yang berguna untuk keperluan kehidupan manusia. Sumber Air yang berasal dari mata air tersebut merupakan air yang sudah layak untuk dikonsumsi karena mengalami purifikasi secara alami (self purification). Mata air di Kabupaten Ngada berjumlah 255 dan tersebar di seluruh kecamatan. Berikut tabel inventaris mata air di Kabupaten Ngada.

Tabel 1.4



Inventaris Mata Air Kabupaten Ngada

No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah
1	Bajawa Utara	Nabelena	Wae Lagu I	16
			Wae Lagu II	
		Uluwae	Matamua	
			Ulumbola	
		Wololika	Wae Mega	
		Uluwae I	Zeoza	
			Waemanuk	
			Turekaro	
		Waewea	Mataradhi	
			Waeviso	
			Waewea	
		Turamuri	Waemuri	
		Inelika	Wae Jawa	
		Uluwae II	Waeviso	
2	Golewa	Inegen	Waeteo	17
		Genamere	Waerawa	
		Sangadeto	Bobalonga	
			Labo Ba'i	
			Mata Toda	
		Sarasedu	Labodoza	
			Aebhugha	
			Labotelu	
		Were I	Uluwae	
			Ngorafole	
		Radabata	Waehepa	
			Waedhoa	
		Malanuza I	Waeribi	
		Were	Uluwae I	
			Waebphoto	
3	Riung Barat	Malanuza	Waeara	20
		Were IV	Waebphoto	
		Sarasedu I	Matanaba	
		Dadawea	Liameo	
		Wolomeze I	Kedeng	
			Trot	
		Lananai	Wai Sai	
			Lomak	
			Rawuk	
		Lanamai 1	Wai Wangkat	
			Bongkel	
			Belo Nepang	
		Benteng Tawa 1	Tepo Mera	
			Bakit	



No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah
		Benteng Tawa	Watu Papa	
		Wolomeze II	Rio Taka	
			Pau Monggo	
		Ngara	Mbonggaong	
		Ria	Loga	
			Gakek	
			Buntang	
		Ria I	Alar	
			Wae Zea	
		Wolomeze	Bubok	
4	Aimere	Binawali	Waelako	4
		Waesae	Kali 2	
		Keligejo	Bhagajae	
		Legelapu	Waepubu	
5	Bajawa	Bela	Mata Air Wae Diti	19
		Bomari	Wae Tudharaja	
			Wae Bogometu	
			Wae Ngoe	
			Wae Rawu	
		Ubedolumolo	Wae Jawa	
			Wae Kogo	
		Borani	Wae Poa	
		Wawowae	Wae Muku Foka	
			Wae Naru	
		Naru	Wae Iku Lewa	
		Langagedha	Wae Leko Oja	
			Wae Lagu	
			NgoeWae	
		Ngoranale	Wae Witu	
			Wae Rato Kepo	
		Bowali	Wae Betu	
		Pape	Wae Bewa	
			Wae Wio	
6	Golewa Barat	Rakateda II	Wae Roa	8
		Watunay	Wae Naidewa	
		Bea Pawe	Wae Suru	
			Wae Muku	
		Mangulewa	Wae Rea	
		Turekisa	Wae Bere	
		Rakalaba	Wae Rea	
		Sobo I	Wae Pazo	
7	Golewa Selatan	Radamasa	Jata Ne Wunga	50
		Sadha	Wae Moka*	
			Koba Neta*	



No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah
			Wae Kusi	
			Wae Lebo	
			Were Weke	
			Wae bae	
		Watusipi	Wae Labho	
			Wae Deti	
			Tiba	
		Takatunga	Ae Agi	
			Ae Aborewe	
			Ae Dori	
Ae Muku				
Mata Nao				
Ae Ghaja				
		Kezewea	Wae Labho	
			Lia Rea	
			Taranage	
			Wae Luja	
		Were II	Labho Me Loke	
			Wae Nege	
			Wae Wira	
			Wae Biru	
		Nirmala	Wae Dika	
			Wae Sere	
			Wae Moka	
			Boba Lelu	
			Lia Rea	
			Taranage	
		Bawarani	Pada Sule 1	
			Wae Labho	
		Wogowela	Lega Leo	
			Lia Langa	
			Oka Sapi	
			Wae Deti	
		Boba	Wae Hadora	
			Pu'u Mo	
			Bo Ke'u	
Wae Puti				
Watu Reka				
Wae Roro				
Wae Wera				
		Were III	wae alo laja	
			wae keke	
			Kodhi koki	



No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah
			Boba lelu	
			Tara nage	
			Wae Ho'o	
8	Inerie	Manubhara	Wae Waku	13
			Wae Lengi	
			Wae Gio	
		Legeriwu	Keiloga	
			Wae Ha	
			Alo Labo	
		Waebela	Muku Ulu	
		Tiwurana	Nuza	
		Inerie	Wae Tena	
		Sebowuli	Wae Seku	
			Wae Bhogi	
		Paupaga	Wae Meku	
			Wae Wae	
9	Jerebuu	Watumanu	Suza Meze	25
			Suza Kedhi	
			Bolenawa	
		Tiworiwu I	Wae Muku	
		Tiworiwu	Wae Roa	
		Dariwali	Wae Raghi	
			Wae Me Rengo	
		Dariwali I	Wae Raghi	
			Wae Me Rengo	
			Wae Roa	
		Naruwolo I	Wae Me Rengo	
			Wae Ha	
		Naruwolo	Lia Gara	
			Roga	
			Dhoki Gara	
			Lia Pao	
		Naruwolo II	Tiwu Hea	
		Nio Lewa	Wae Raghi	
			Wae Merengo	
		Batajawa	Lia Gara	
			Boa Moa	
			Wolo Dhobo	
		Nenowea	Kato Deghi	
			Lia Gara	
			Dhoki Gara	
10	Riung	Tadho	Langsang	23
			Wae wita	
			Wae lus	



No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah
		Lengkosambi Utara	Tiwu waso	
		Latung	Sudok	
		Sambinasi	Buntang Ireng	
		Sambinasi Barat	Wae Ume	
		Rawangkalo	Koto	
			Gonggong	
			wae wene	
			Wae Sari	
			Wae Mbage	
			Kazu Ata	
			Bulbuti	
			Winden	
			Wae Wuring	
			Wae Nio	
		Taen Terong I	Wae Koza	
			Gonggong	
		Taen Terong II	Sumpa Nitu	
		Wangka	Matalee	
		Wangka Selatan	Bonedima	
			Lunda	
11	Soa	Waepana	Mata Tibu	37
			Mata Mude	
			Mata Wae Hoo	
		Seso	Wae Mia	
			Wae Buzu	
			Wae Hoba	
			Wae Loleko	
			Wae Puni	
			Wae Furafugha	
		Masu	Labudolo	
			Toko	
			Muku Dhiu	
			Muku Tabi	
			Belaroro	
		Mengeruda	Wae Meo	
			Bana Meze	
			Bana Sale	
			Sara Kolo	
			Wae Wutu	
			Wae Bhia	
		Piga	Wae Deho	
			Wae Toto	
			Wae Rate Ngee	
			Wae Bula	



No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah
			Wae Ngelu Ngai	
			Wae Pae Logo	
		Loa	Wae Na	
			Rita Bhara	
			Labu Dingo	
			Wae Lelu	
			Wae Bulu	
			Wae Deti	
			Tarawaja	
		Wae Ro		
		Wae Bheku		
		Wae Bo Ghae		
		Wadawea		
12	Wolomeze	Mainai	Mata Wae Lawu	23
			Mata Wae Mbazer	
			Hama Romo	
			Lumak	
		Denatana	Mata Ia	
			Wango Welu	
			Bhuntang	
			Molo	
			Bola	
			Bhubung	
			Panas	
			Bhanggo	
		Nginamanu	Mbo	
			Nangge	
			Mata	
			Kolopenu	
			Kusi	
			Wae Waki	
			Kama	
			Wira	
			Ria Zae	
			Weke Seki	
			Bhoto	
Jumlah			255	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2025

5.2 Sungai

Sungai adalah aliran terbuka dengan ukuran geometrik yaitu penampang melintang, profil memanjang, dan kemiringan lembah yang berubah seiring waktu, tergantung pada debit, material dasar dan tebing. Sungai menjadi sumber air baku utama untuk kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Ngada. Sungai di Kabupaten Ngada berjumlah13



dan tersebar di semua kecamatan. Berikut tabel inventaris sungai di Kabupaten Ngada.

Tabel 1.5
Inventaris Sungai Kabupaten Ngada

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m ³ /detik)	
			Permukaan	Dasar		Maks	Min
1	Waewoki	246,1	2,75	-	0,3	0,22	0,25
2	Waewira	-	16,1	-	0,29	0,45	0,73
3	Wirase	-	1,3	-	1	0,41	0,55
4	Mataloko	-	1,6	-	0,19	0,29	0,63
5	Waeroa Jerebuu	-	2,7	-	0,11	0,28	0,60
6	Waebela	-	8,8	-	0,15	1,32	2,26
7	Waemokel	-	38	-	2	2,60	2,90
8	Waebua	-	5	-	0,12	0,23	0,26
9	Tiwubala	-	6,9	-	0,49	1,87	1,99
10	Waeroa Golewa Barat	-	12,7	-	0,2	0,52	1,78
11	Sangkalankongkong	-	5,5	-	0,04	0,40	0,52
12	Alolasi	-	3,5	-	0,23	0,44	0,49
13	Wulabhara	249,5	19,5	-	2,6	1,35	1,55

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2025

5.3 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Selain sungai, kita juga mengenal daerah aliran sungai (DAS). Daerah aliran sungai adalah wilayah yang dikelilingi dan dibatasi oleh topografi berupa punggung bukit atau pegunungan. DAS tak hanya meliputi aliran airnya, namun juga bentang alam di sekitar aliran sungai. DAS juga dikenal dengan sebutan watershed atau daerah tangkapan (catchment area). Ada garis batas yang tak terlihat untuk membatasi DAS dan daerah lain. Batas itu biasanya berupa punggung bukit atau pegunungan. Batas DAS biasanya tak sama dengan batas administrasi wilayah. Suatu DAS bisa berada pada satu wilayah maupun beberapa wilayah. Ada DAS yang meliputi beberapa wilayah kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Kabupaten Ngada terdapat 3 DAS yaitu Waewoki, Wulabhara, dan Alomemak. DAS tersebar di semua kecamatan. DAS dengan luasan terbesar yaitu DAS Alomemak seluas 25.931,69 Ha. DAS dengan luasan terendah yaitu DAS Waewoki seluas 20.717,55 Ha. Berikut Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Ngada.

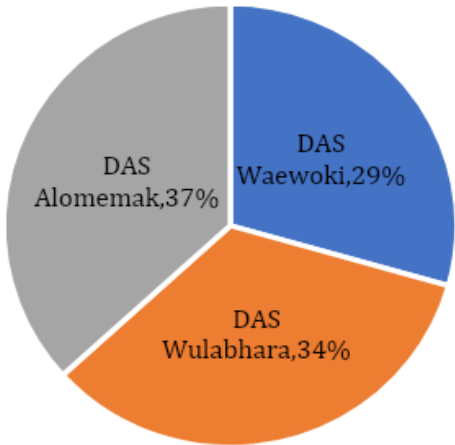
Tabel 1.6
Sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Ngada

No.	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Waewoki	20.717,55
2	DAS Wulabhara	23.866,97
3	DAS Alomemak	25.931,69
Jumlah		70.516,20

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2025



Gambar 1.3
Diagram Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ngada



5.4 Danau

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Danau memiliki fungsi utama sebagai wadah penampung air dan pendukung ekosistem perairan darat. Kabupaten Ngada memiliki 9 danau. Danau dengan luasan terbesar diantaranya Danau Waelawa-Uluwae, Terong-Taen Terong, Mulu-Mainai, Kajudulu-Aimere, Marunggela-Riung Barat. Berikut tabel inentaris danau di Kabupaten Ngada.

Tabel 1.7
Inventaris Danau Kabupaten Ngada

No.	Nama Danau	Luas (Ha)	Volume (m³)
1	Flobamora – Benteng Tawa	300	750
2	Radang – Ria	300	750
3	Maupulur - Lanamai	300	750
4	Sanai - Wolomeze	300	750
5	Waelawa – Uluwae	400	800
6	Terong – Taen Terong	400	800
7	Mulu – Mainai	400	800
8	Kajudulu - Aimere	400	800
9	Marunggela – Riung Barat	400	800
Jumlah		3.200	7.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2025

6. Klimatologi

Kabupaten Ngada memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sekitar bulan Juni - September terjadi musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret terjadi musim hujan. Curah hujan di Kabupaten Ngada berkisar 62 mm, 87 mm serta 150 mm. Secara umum didominasi oleh curah hujan 87 mm yang terjadi di area seluas 133.753,81 Ha. Berikut tabel, diagram, dan peta curah hujan Kabupaten Ngada.

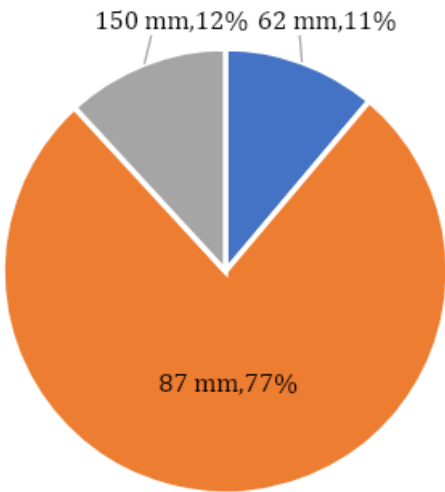


Tabel 1.8
Curah Hujan Kabupaten Ngada

No.	Kecamatan	Curah Hujan (Ha)		
		62 mm	87 mm	150 mm
1	Aimere	14.964,45	360,72	-
2	Bajawa	2.227,19	8.553,66	-
3	Bajawa Utara	1.274,47	14.155,26	-
4	Golewa	-	10.276,18	-
5	Golewa Barat	-	6.633,41	-
6	Golewa Selatan	-	4.723,38	3.333,45
7	Inerie	890,93	5.193,42	-
8	Jerebuu	-	5.557,41	-
9	Riung	-	26.130,13	9.060,18
10	Riung Barat	-	20.493,40	8.178,83
11	Soa	-	8.735,06	-
12	Wolomeze	-	22.941,78	-
Jumlah		19.357,04	133.753,81	20.572,46

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2025

Gambar 1.4 Diagram Curah Hujan Kabupaten Ngada



C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dipengaruhi oleh banyaknya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi) yang masuk atau keluar dari wilayah tersebut. Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambah sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk bersifat penambah dan penduduk yang keluar bersifat pengurang. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Petumbuhan penduduk berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah di masa yang akan datang yang selanjutnya akan melahirkan konsep proyeksi penduduk. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Ngada pada Tahun 2024 mencapai 169.445 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,40 persen, mengalami penurunan sebesar 0,10% dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 yaitu sebesar 1.41 persen..



Tabel 1.9
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Demografi						
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	165.314	167.396	170.115	171.736	169.445
Laki-Laki	Jiwa	80.704	82.635	83.958	84.763	83.666
Perempuan	Jiwa	84.610	84.761	86.157	86.973	85.779
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,25	1,30	1,67	1,41	1,40
3. Kepadatan Penduduk	jiwa per km ²	101,95	103,27	104,94	105,95	97.560

Sumber: Kab. Ngada Dalam Angka 2021-2025

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah absolut penduduk Kabupaten Ngada mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Ngada sebanyak 165.314 jiwa dan terus meningkat menjadi 171.736 jiwa pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 169.445 jiwa pada tahun 2024. Selama kurun waktu lima tahun penduduk Kabupaten Ngada telah bertambah sebanyak 4.131 jiwa.

Perkembangan komposisi penduduk menurut jenis kelamin ditunjukkan dengan perkembangan rasio jenis kelamin (RJK), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Sementara itu, rasio ketergantungan menunjukkan seberapa tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum dan tidak produktif lagi. Rasio jenis kelamin Kabupaten Ngada selama lima tahun terakhir berkisar antara 95 sampai 98 persen, yang berarti bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Ngada lebih banyak dari penduduk laki-laki. Pada tahun 2024 rasio jenis kelamin Kabupaten Ngada sebesar 97,54 persen, yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki.

Tabel 1.10
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

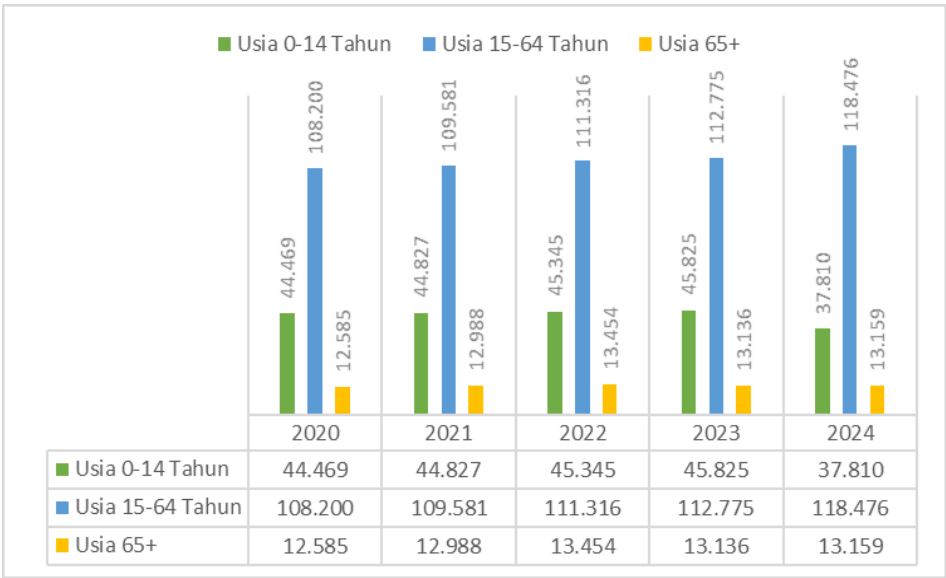
Tahun	Rasio Jenis Kelamin %
2020	98
2021	97
2022	97
2023	97,46
2024	97,54

Sumber : Indikator Kesra Kab. Ngada 2022,
Ngada Dalam Angka 2025



Selanjutnya jika dianalisis komposisi penduduk Kabupaten Ngada tahun 2024 berdasarkan struktur usia, didominasi oleh struktur penduduk usia 15 – 64 tahun atau usia produktif. Angka ketergantungan penduduk usia yang belum produktif dan atau dianggap tidak produktif lagi di tahun 2024 sebesar 65,67% yang berarti di tahun 2024 setiap 100 orang penduduk berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sekitar 66 orang penduduk yang belum produktif dan atau dianggap tidak produktif lagi.

Grafik 1.1
Struktur penduduk 2020 – 2024



Sumber : Ngada Dalam Angka 2021-2025

Dengan model struktur penduduk seperti dalam grafik diatasterlihat bahwa Kabupaten Ngada mendapat “Bonus demografi” dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut tidak banyak. Bonus demografi ini membawa dampak besar pada pembangunan baik dampak positif dan negatif. Dampak positifnya menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usiatua dan anak-anak) akan sangat rendah.

Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ketingkat yang lebih tinggi. Dampaknya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan dampak negatif yang paling nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan.Dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, mampukah sumber daya manusia yang melimpah ini bersaing di dunia kerja dan pasar internasional. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dampak negative dari bonus demografi ini dapat diminimalisir.

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2012 dibentuk 3 (tiga) kecamatan baru yakni Kecamatan Golewa Selatan dan Golewa Barat sebagai pemekaran dari Kecamatan Golewa; serta Kecamatan Inerie sebagai pembentukan kecamatan darisebagian wilayah Kecamatan Aimere dan Kecamatan Jerebuu sejak itulah jumlah kecamatan di Kabupaten Ngada menjadi 12 kecamatan hingga Tahun 2024 yaitu :



- 1. Kecamatan Bajawa
- 2. Kecamatan Bajawa Utara
- 3. Kecamatan Golewa
- 4. Kecamatan Aimere
- 5. Kecamatan Soa
- 6. Kecamatan Riung
- 7. Kecamatan Riung Barat
- 8. Kecamatan Jerebuu
- 9. Kecamatan Wolomeze
- 10. Kecamatan Golewa Selatan
- 11. Kecamatan Golewa Barat
- 12. Kecamatan Inerie

Selanjutnya Jumlah Kelurahan tersebar di 5 Kecamatan sebanyak 16 Kelurahan yakni :

- 1. Kecamatan Bajawa terdapat 9 Kelurahan : Bajawa, Jawameze, Faobata, Susu, Tanalodu, Kisanata, Trikora, Ngedukelu dan Lebijaga
- 2. Kecamatan Golewa terdapat 2 Kelurahan yakni Todabelu dan Mataloko
- 3. Kecamatan Golewa Barat terdapat 1 Kelurahan yakni Mangulewa
- 4. Kecamatan Riung terdapat 2 Kelurahan yakni Benteng Tengah dan Nangamese
- 5. Kecamatan Aimere terdapat 2 Kelurahan yakni Aimere dan Foa.

Sedangkan jumlah desa sampai dengan tahun 2024 sebanyak 190 desa sehingga jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ngada pada Tahun 2024 sebanyak 206 Desa/Kelurahan.

Tabel 1.11
Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ngada
Keadaan Tahun 2020 - 2024

Kecamatan District	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aimere	10	10	10	11	11
Jerebuu	12	12	12	14	14
Inerie	10	10	10	13	13
Bajawa	22	22	22	28	28
Golewa	16	16	16	22	22
GolewaSelatan	12	12	12	18	18
GolewaBarat	10	10	10	13	13
BajawaUtara	11	11	11	12	12
Soa	14	14	14	16	16
Riung	16	16	16	29	29
RiungBarat	10	10	10	19	19
Wolomeze	8	8	8	11	11
KabupatenNgada	151	151	151	206	206

Sumber : Kab. Ngada Dalam Angka 2021 - 2025



E. Jumlah Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

1. Jumlah Perangkat Daerah

Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Ngada berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berjumlah 41 Perangkat Daerah yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 Dinas, 5 Badan dan 12 Kecamatan.

Tabel 1.12

Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Ngada

NO	JENIS PERANGKAT DAERAH	RINCIAN
1	Sekretariat Daerah	-
2	Sekretariat DPRD	-
3	Inspektorat	-
4	Dinas	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		3 Dinas Pariwisata
		4 Dinas Kesehatan
		5 Dinas Sosial
		6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		8 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
		9 Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		10 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		11 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		12 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		13 Dinas Komunikasi dan Informatika
		14 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan Rakyat dan Pertanahan
		15 Dinas Perhubungan
		16 Dinas Lingkungan Hidup
		17 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		18 Dinas Peternakan
		19 Dinas Perikanan
		20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		21 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Badan	1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		2 Badan Keuangan dan Aset Daerah
		3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		4 Badan Pendapatan Daerah
		5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Kecamatan	1 Kecamatan Jerebuu
		2 Kecamatan Aimere
		3 Kecamatan Inerie



4	Kecamatan Bajawa
5	Kecamatan Golewa
6	Kecamatan Golewa Barat
7	Kecamatan Golewa Selatan
8	Kecamatan Bajawa Utara
9	Kecamatan Soa
10	Kecamatan Wolomeze
11	Kecamatan Riung
12	Kecamatan Riung Barat

Sumber : Peraturan Bupati Ngada Nomor 50 Tahun 2021

2. Jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah

Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Ngada Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Ngada berjumlah 221 UPTD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.13

Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

NO	PERANGKAT DAERAH	UPTD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	a UPTD Satuan Pendidikan Formal	
		UPTD TKK Negeri	38
		UPTD SD Inpres dan Negeri	119
		UPTD SMP Negeri	48
		b UPTD Satuan Pendidikan Non Formal	1
2	Dinas Kesehatan	UPTD Puskesmas	24
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas A	1
4	Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Kelas A	1
		UPTD Kebun Raya Daerah Wolobobo Kelas A	1
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kelas A	1
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelas A	1
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	UPTD Sentra Industri Kecil Menengah Bambu Kelas A	1
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A	1
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A	1
	JUMLAH UPTD KABUPATEN NGADA		238

Sumber : Peraturan Bupati Ngada Nomor 37 Tahun 2023



3. Jumlah Pegawai Pemerintah

Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Ngada berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngada keadaan bulan Desember 2024 berjumlah 3.001 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural berjumlah 389 orang, Pejabat Fungsional Tertentu berjumlah 2.004 orang, Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana berjumlah 608 orang dan CPNS berjumlah 0 orang.

Tabel 1.14

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ngada Menurut Jenis Jabatan
Keadaan Desember 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN								L	P	JUMLAH
		STRUKTUR AL		FUNGSIONAL TERTENTU		FUNGSIONAL UMUM / PELAKSANA		CPNS				
		L	P	L	P	L	P	L	P			
1	SEKRETARIAT DAERAH	13	2	10	2	27	33			50	37	87
2	SEKRETARIAT DPRD	3	2	1	1	7	5			11	8	19
3	INSPEKTORAT	4	3	8	22	2	6			14	31	45
4	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	5	2	2	4	4			7	11	18
5	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	1	-	3	4	2			7	6	13
6	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA(GABUNG TUBEL)	4	1	5	5	8	9			17	15	32
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	1	3	2	4	1			11	4	15
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	4	1		7	16			19	20	39
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5	7	1	2	8	4			14	13	27
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	4	1	4	7	5			12	13	25
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	5	1	3	3	2			10	10	20
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	1	2	1	6	5	6			7	14	21



	SATU PINTU											
13	DINAS KESEHATAN	2	5	81	447	13	26			96	478	574
14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	9	2	4	3	28	7			41	12	53
15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3	6	34	20	22	19			59	45	104
16	DINAS PETERNAKAN	2	4	9	25	10	8			21	37	58
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	2	4	5	2	3			10	10	20
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	2		2	1	2			5	6	11
19	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6	3	2	2	2	3			10	8	18
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4	3	2	1	4	3			10	7	17
21	DINAS PERHUBUNGAN	4	6		-	10	2			14	8	22
22	DINAS SOSIAL	2	3	2	-	3	2			7	5	12
23	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3	3	2	2	1	3			6	8	14
24	DINAS PERIKANAN	2	3	1	2	7	2			10	7	17
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (GABUNGAN)	10	6	268	743	18	40			296	789	1.085
26	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	1	1	1	5	3			10	5	15
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2	1	1	1	3	8			6	10	16
28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	1	2	1	4	4			10	6	16
29	DINAS PARIWISATA	3	2	4	3	6	1			13	6	19
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	10	3	3	2	20	2			33	7	40
31	RSUD BAJAWA	6	8	34	204	8	24			48	236	284
32	KANTOR KECAMATAN AIMERE	11	4	-	-	4	8			15	12	27
33	KANTOR KECAMATAN INERIE	5	2	-	-	6	3			11	5	16
34	KECAMATAN GOLEWA	6	9	-	-	7	7			13	16	29
35	KECAMATAN GOLEWA SELATAN	5	2	-	-	1	1			6	3	9



36	KECAMATAN GOLEWA BARAT	6	3	-	-	2	2			8	5	13
37	KECAMATAN BAJAWA	23	19	-	-	5	2			28	21	49
38	KECAMATAN SOA	3	4	-	-	4	3			7	7	14
39	KECAMATAN RIUNG	9	6	-	-	11	10			20	16	36
40	KECAMATAN WOLOMEZE	4	3	-	-	4	1			8	4	12
41	KECAMATAN RIUNG BARAT	4	3	-	-	7	2			11	5	16
42	KECAMATAN JEREBUU	5	2	-	-	2	3			7	5	12
43	KECAMATAN BAJAWA UTARA	6	1	-	-	5				11	1	12
	JUMLAH	230	159	488	1.516	311	297	-	-	1.029	1.972	3.001

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngada per Desember 2024

Catatan :

- 1. Lingkup Sekretariat Daerah terdiri dari PNS pada bagian-bagian;
- 2. BKPSDM terdiri dari PNS BKPSDM dan PNS Tugas Belajar;
- 3. Dinas Kesehatan terdiri dari PNS Dinas Kesehatan dan PNS pada Puskesmas;
- 4. Dinas Pendidikan terdiri dari PNS Dinas Pendidikan dan Guru-guru;
- 5. Kecamatan termasuk PNS di Kelurahan.

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

• Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2024 target Pendapatan Pemerintahan Kabupaten Ngada sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.068.374.876.962,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.051.596.656.058,75 atau mencapai 98,43%, dari target yang ditetapkan (sebelum dilakukan audit oleh BPK RI). Berikut rincian Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Ngada tahun 2024.

Tabel 1.15
Perincian Pendapatan Kabupaten Ngada pada Tahun 2024
(sebelum audit BPK RI)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih(kurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.068.374.876.962,00	1.051.596.656.058,75	(16.778.220.903,25)	98,43
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.519.508.005,00	44.852.561.375,75	(5.666.946.629,25)	88,87
4.2	Pendapatan Transfer	1.010.376.912.305,00	999.434.645.879,00	(10.942.266.426,00)	98,92
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.478.456.652,00	7.309.448.804,00	(169.007.848.,00)	97,74

Sumber.: LRA Konsolidasi 18 Maret 2025 (anaudited) Perdsa no.7 Tahun 2024, Perda No.6 Tahun 2024, Perda No.6 Tahun 2023

• Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Dari komposisi realisasi per jenis belanja secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 1.16
Perincian Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024
(sebelum audit BPK RI)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih(Kurang)	%
5	BELANJA	1,102,334,439,499.00	1.006.704.495.212,85	(95.629.944.286,15)	91,32
5.1	BELANJA OPERASI	642,036,670,442.00	595.499.445.185,80	(46.537.225.256,80)	92,75
5.1.01	Belanja Pegawai	390.891.201.179.68	364.084.945.380,45	(26.806.255799,64)	93,14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.482.113.079.32	197.006.043.622	(19.476.069.457,16)	91,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.716.406.250.,00	1.716.406.250.,00	-	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	30.916.949.933.00	30.916.949.933.00	-	100,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.030.000.000,00	1.775.100.000.00	254.900.000,00	87,44
5.2	BELANJA MODAL	246.329.070.637,00	205.413.683.785,65.	40.915.386.851,35	83,39
5.2.01	BM.Tanah	493.108.808,00	493.108.795,00	13,00	100,00
5.2.02	BM.Peralatan dan Mesin	41,721,394,821.00	39.803.093.054,20	(1.918.301.766,80)	95,40
5.2.03	BM.Gedung dan Bangunan	128,952,236,846.00	95.922.204.919,42	95.922.204.919,42	74,39
5.2.04	BM.Jalan,Jaringan dan Irigasi	64.894.341.512,00	61.513.044.587,03	(3.381.296.924,97)	94,79
5.2.05	BM.Modal Aset Tetap Lainnya	6.868.020.350,00	5.344.238.480,00	(1.523.781.870,00)	77,81
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,581,781,448,00	3.513.033.000,00	(3.068.748.972,00)	53,38
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6,581,781,972.00	3.513.033.000,00	(3.068.748.972,00)	53,38
5.4	BELANJA TRANSFER	207,386,916,448.00	202.278.333.242,00	(5.108.583.206,00)	97,54
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,111,486,800.00	658.216.937,00	(453.269.863,00)	59,22
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	206,275,429,648.00	201.620.116.305,00	(4.655.313.343,00)	97,74

Sumber : LRA Konsolidasi 18 Maret 2025 (anaudited) Perdsa no.7 Tahun 2024, Perda No.6 Tahun 2024, Perda No.6 Tahun 2023

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan atau Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pembangunan di tahun



sebelumnya ditemukan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan pembangunan ditahun selanjutnya. Isustrategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perludiatasi secara bertahap. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Isu pengembangan ekonomi yang mencakup permasalahan:

- Potensi pariwisata belum dikembangkan secara optimal yang ditandai dengan keterbatasan penyediaan sarana prasarana serta rendahnya jumlah kunjungan wisatawan.
- Masih rendahnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian.
- Kapasitas SDM dan kelembagaan petani kurang memadai
- Akses terhadap bantuan permodalan masih belum memadai
- Kurangnya penyuluhan intensif kepada petani, peternak, nelayan dan pelaku pariwisata.
- Sarana dan prasarana pascapanen belum memadai.
- Adopsi IPTEK pertanian yang spesifik wilayah masih kurang memadai.
- Terbatasnya akses sarana produksi pertanian.
- Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan pedesaan.
- Pembinaan dan pendampingan pasca panen belum berjalan secara berkesinambungan.

b. Isu rendahnya daya saing masyarakat yang ditandai dengan permasalahan :

- Keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- Masih rendahnya tata kelola pendidikan yang tergambar dari belum meratanya penempatan guru di sekolah-sekolah
- Belum meratanya kualitas profesional guru dan tenaga kependidikan serta masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan.
- Belum optimalnya upaya promotif yang lebih menyeluruh melibatkan sektor kesehatan, dan lintas sektor serta masyarakat sehingga perilaku hidup bersih dan sehat belum membudaya di dalam masyarakat.

c. Isu pengembangan wilayah yang belum memadai yang mencakup permasalahan:

- Kualitas Infrastruktur (Jalan, listrik dan air) yang belum mencapai target karena keterbatasan anggaran.
- Belum tertata secara baik drainase dan bahu jalan sesuai peruntukannya khusus untuk wilayah Perkotaan dan ramah lingkungan.
- Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan;
- Belum semua masyarakat memiliki rumah layak huni.

d. Isu kurang efektifnya tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan permasalahan:

- Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
- Masih belum optimalnya sistem pelayanan birokrasi yang efisien dan efektif.



- e. Isu kemiskinan yang belum menurun secara signifikan yang ditandai dengan permasalahan:
- Pengeluaran/konsumsi non pangan masih lebih kecil dari pada pengeluaran/konsumsi pangan yang merupakan akibat dari masih tingginya biaya sosial masyarakat
 - Kapasitas Lembaga - lembaga desa baik itu LPA, Bumdes/Bumdesma, LKMD masih rendah kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Periode RPJMD 2021-2026 merupakan periode terakhir RPJPD dengan tema pembangunan “Masyarakat Unggul dan Mandiri”. Berpijak pada nilai budaya masyarakat Ngada dan upaya untuk meningkatkan sinkronisasi antar dokumen perencanaan serta menjalankan pembangunan berkelanjutan, maka dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 sebagai berikut:

Visi: **“Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan”**

Visi Kabupaten Ngada ini mengandung beberapa kata kunci yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Ngada pada akhir periode pembangunan jangka menengah 2021-2026. Kata kunci tersebut :

Masyarakat Ngada	: Setiap orang yang lahir dan mendiami bumi Ngada. Masyarakat Ngada yang diharapkan berpartisipasi aktif membangun daerah melalui berbagai aktivitas dan saling berkolaborasi melalui ikatan sosial dan budaya yang erat.
Unggul	: Unggul sebagai representasi daya saing dibandingkan dengan daerah lain. Unggul ekonomi masyarakatnya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi meningkat, tersedianya lapangan kerja dan bertambahnya penghasilan masyarakat. Unggul sumber daya manusia berupa masyarakat Ngada yang sehat, kuat, cerdas, terampil dan kreatif. Unggul birokrasi yang ditandai tata kelola profesional, cepat, melayani, cepat tanggap dan memberdayakan. Unggul sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai penunjang masyarakat dalam bekerja, menghasilkan, mengolah, menabung, dan menjual berbagai komoditi
Mandiri	: Masyarakat Ngada yang memiliki tanggung jawab untuk membangun dirinya, keluarga, daerah dan bangsanya. Mandiri juga diartikan sebagai kemampuan daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dengan mengoptimalkan berbagai potensi.
Berbudaya	: Pembangunan yang dilaksanakan akan membangun manusia Ngada yang berkarakter dan memiliki kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila, berakhlak mulia, dan memegang teguh Bhineka Tunggal Ika. Karakter masyarakat Ngada sebagai pekerja keras, kuat dalam kebersamaan ulu-eko, egaliter, demokratis, dan saling menghargai perbedaan. Membangun Ngada yang berbudaya bagian



		dari gerakan kebangsaan Revolusi Mental yang terus dilembagakan dan diinternalisasi dalam berbagai ruang dan kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh agama, adat, pendidikan, maupun masyarakat secara umum.
Pertanian	:	Mengangkat pertanian sebagai basis pembangunan tidak hanya berpijak kepada keberadaan pertanian sebagai sumber daya atau aset utama bagi masyarakat Ngada, sekaligus memiliki filosofi mendalam di tengah masyarakat. Pertanian disimbolkan dengan Ubi (Uwi) sebagai makanan utama dan awal mula yang menghidupi masyarakat, dan Su'a (Tofa) yang dipakai pertama kali oleh nenek moyang untuk bekerja di lahan pertanian. Filosofi lain yang menggambarkan pertanian sebagai sumber penghidupan dan memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, yaitu Tuka, Tuku, Teka yang berarti masyarakat Ngada harus bisa menanam, mengolah, dan menjual komoditas pertanian dan perikanan.
Pariwisata	:	Kabupaten Ngada yang kaya sumber daya alam, kebudayaan, dan hasil kreasi manusia menjadi daya tarik besar bagi pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata diarahkan dengan berbasis kepada masyarakat dan mengedepankan dampak multiganda yang melibatkan berbagai sektor dan membawa kesejahteraan masyarakat. Pertanian, pariwisata, bersama sumber daya utama Ngada lainnya, seperti peternakan dan perikanan menjadi basis utama dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam pembangunan yang tertuang dalam tagline TANTE NELA PARIS (Tani, Ternak, Nelayan, dan Pelaku Pariwisata)
Berwawasan Lingkungan	:	Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia, serta memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang mampu menyediakan ruang, sumber daya alam, dan mampu melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem.

Visi tersebut harus diturunkan ke dalam beberapa rumusan misi yang lebih operasional. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kabupaten Ngada memiliki lima misi yang saling terkait. Rumusan misi tersebut disebut sebagai Panca Cita Pembangunan Kabupaten Ngada 2021-2026. Berikut adalah rumusan misi Kabupaten Ngada:

Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Misi 1 adalah bagian dari upaya menciptakan Ngada Unggul dan Mandiri dari sisi perekonomian masyarakat yang berpijak kepada potensi utama Ngada, yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata (TANTE NELA PARIS), yang



pengembangannya secara komprehensif dari hulu sampai hilir, dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran/perdagangan. Misi 1 berupaya mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, penurunan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Keempat kondisi tersebut diturunkan menjadi tujuan yang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks gini dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Misi 2: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia bagian dari upaya mencapai visi Unggul SDM yang sehat, kuat, cerdas, terampil dan kreatif. Misi ini akan dioperasionalkan untuk mencapai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang ditopang oleh pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Misi 2 juga terkait dengan pembangunan kepemudaan untuk menyiapkan generasi penerus untuk mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa pada masa depan. Misi ini juga memberi perhatian pada upaya pengarusutamaan gender.

Misi 3: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar

Misi 3 merupakan upaya mencapai Unggul Sarana dan Prasarana sebagai penopang pembangunan di berbagai bidang. Infrastruktur wilayah yang baik akan mempermudah dan mempercepat konektivitas antar pusat pertumbuhan, serta mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah. Infrastruktur yang berkualitas dengan dukungan tata kota dan tata wilayah yang baik dapat membawa dampak yang baik bagi kelayakhunian daerah, daya tarik dan daya saing daerah secara umum. Infrastruktur yang berkualitas juga akan mengurangi kendala akses terhadap pelayanan dasar, sehingga pelayanan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan penopang bagi efektivitas pembangunan di seluruh urusan pemerintahan, dan menjadi bagian dari upaya mencapai visi Unggul Birokrasi. Keunggulan birokrasi melalui reformasi birokrasi dapat tercapai ketika pemerintah daerah mampu akuntabel secara administratif maupun sosial, efektif dalam memberikan pelayanan, transparan, berintegritas dan profesional, serta mampu berkolaborasi dengan masyarakat dalam berbagai ruang pembangunan yang partisipatif.

Misi 5: Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya

Masyarakat Ngada yang tetap memegang teguh dan menjalankan nilai dan tradisi budaya lokal, serta terjaganya kohesivitas sosial merupakan modal penting dalam mewujudkan visi Ngada Berbudaya. Modal tersebut kemudian perlu dikelola dengan strategi transformasi budaya melalui revitalisasi dan reorientasi nilai budaya. Upaya ini adalah salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya. Transformasi budaya berupaya mengelola nilai dan tradisi agar mampu beradaptasi di tengah tuntutan zaman yang semakin dinamis tanpa



menghilangkan nilai dan tradisi yang telah membentuk ikatan sosial kuat di tengah masyarakat Ngada. Oleh karena itu, transformasi budaya membutuhkan peran lintas sektor dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga penting untuk dimulai dari level desa dengan peran aktif tokoh agama, adat, dan masyarakat.

Kabupaten Ngada pada periode pembangunan 2021-2026 menjalankan pendekatan pembangunan tematik-holistik berbasis optimalisasi potensi lokal melalui tagline Tante Nela Paris (Tani, Ternak, Nelayan, Pelaku Pariwisata) yang berada di dalam urusan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, serta Pariwisata. Tante Nela Paris ditopang oleh program di dalam urusan lain, baik yang menjadi penopang langsung maupun tidak langsung. Program yang menjadi penopang langsung terkait penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, misalnya berupa penguatan usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat desa, terutama terkait pengembangan BUM Desa. Adapun program yang menjadi pendukung terkait kebijakan dan pembangunan infrastruktur, antara lain berupa program pembangunan infrastruktur jalan, kebijakan pengelolaan perdagangan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan penciptaan iklim investasi. Tagline Tante Nela Paris melalui pendekatan tematik-holistik dilaksanakan melalui kerangka sebagai berikut:

- ❖ Pelaksanaan Tante Nela Paris memperhatikan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkotaan, pesisir, dan pegunungan, termasuk wilayah yang secara geografis kurang potensial dalam pengembangan sektor unggulan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
- ❖ Program untuk mendukung Tante Nela Paris harus memberi nilai tambah mulai dari hulu sampai hilir maupun dari aspek on farm ke off farm, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada, serta berdampak pada peningkatan pendapatan petani, peternak, nelayan, pelaku pariwisata dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat Ngada dan berkontribusi pada Peningkatan PAD.
- ❖ Prioritas pembangunan pada sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata harus tetap memperhatikan pembangunan pada sektor lain yakni Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pelayanan Publik Lainnya.
- ❖ Perlu disiapkan berbagai aturan penunjang baik terkait Perda maupun Perkada untuk menjabarkan tagline Tante Nela Paris dengan berbagai bidang penopang dan pendukungnya.

C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Ngada menetapkan rangkaian program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Program untuk mendukung pencapaian Misi Pertama adalah :



1. Program Penyuluhan pertanian
2. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
4. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8. Program Pengelolaan perikanan budidaya
9. Program Pengelolaan perikanan tangkap
10. Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
11. Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
12. Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
13. Program Promosi penanaman modal
14. Program Pengembangan iklim penanaman modal
15. Program Pelayanan Penanaman Modal
16. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
17. Program Pemasaran pariwisata
18. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
19. Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
20. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
21. Program Perencanaan dan pembangunan industri
22. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
23. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen
24. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
25. Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
26. Program Pengawasan keamanan pangan
27. Program Penanganan Kerawanan Pangan
28. Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
29. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
30. Program Pengembangan UMKM
31. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
32. Program Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
33. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
34. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
35. Program Pengelolaan Persampahan

Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Program untuk mendukung pencapaian Misi Kedua adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan



5. Program Pembinaan Keluarga Berencana
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
7. Program Pengelolaan Pendidikan
8. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Program Pembinaan Perpustakaan
10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
12. Program Perlindungan Perempuan
13. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
14. Program Perlindungan Khusus Anak
15. Program Anak Pemenuhan Hak Anak (PHA)
16. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
17. Program Penempatan Tenaga Kerja

Misi Ketiga : Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar

Program untuk mendukung pencapaian Misi Ketiga adalah :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sumber Air Minum
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
11. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
12. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
13. Program Penataan Bangunan Gedung
14. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
15. Program Penatagunaan Tanah
16. Program Penetapan Tanah Ulayat
17. Program Pengelolaan Tanah Kosong
18. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
19. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
20. Program penanggulangan bencana

Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Melayani

Program untuk mendukung pencapaian Misi Keempat adalah :

1. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
2. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
3. Program administrasi umum
4. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat



5. Program perekonomian dan pembangunan
6. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
7. Program penataan desa
8. Program Peningkatan Kerjasama Desa
9. Program penyelenggaraan pengawasan daerah
10. Program perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi
11. Program kepegawaian daerah
12. Program pengembangan SDM
13. Program pengelolaan barang milik daerah
14. Program pengelolaan keuangan daerah
15. Program pengelolaan pendapatan daerah
16. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas
17. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
18. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
19. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
20. Program pendaftaran penduduk
21. Program pencatatan sipil
22. Program aplikasi informatika
23. Program informasi dan komunikasi publik

Misi Kelima : Memperkuat Masyarakat Melalui Transformasi Institusi Budaya

Program untuk mendukung pencapaian Misi Kelima adalah :

1. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
2. Program administrasi pemerintahan Desa
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Pemberdayaan Sosial
6. Program Pengembangan Kebudayaan
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
8. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
9. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
10. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
11. Program Peningkatan kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
12. Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
13. Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
14. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik

D. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :



1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	8) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	9) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
	10) Penataan Organisasi
	11) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	12) Administrasi Tata Pemerintahan
	13) Fasilitas Kerjasama Daerah
	14) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	15) Layanan Administrasi DPRD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
6.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN`
	1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	3) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan



		Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
12.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
	1)	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
13.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	1)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
14.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
	1)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	2)	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota
15.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	1)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
16.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
	1)	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
17.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	1)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
18.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
	1)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
19.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
	1)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
20.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
	1)	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
21.	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	
	1)	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
22.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
	1)	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
23.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
	1)	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
24.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	1)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2)	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	3)	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
25.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	1)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2)	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
26.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	1)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	2)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	4)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
27.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	1)	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
28.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	2)	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
29.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	1)	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
	2)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
30.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	



	1)	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	2)	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	3)	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
31.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	1)	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
	2)	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3)	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	4)	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
32.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	1)	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	1)	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian
33.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	1)	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
34.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	1)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
35.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	1)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
36.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
	1)	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
37.	PROGRAM PENATAAN DESA	
	1)	Penyelenggaraan Penataan Desa
38.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
	1)	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
39.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
	1)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
40.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
	1)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
41.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
	1)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	2)	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
	3)	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
42.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
	1)	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
	2)	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
43.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
	1)	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
44.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
45.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
46.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
	1)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
47.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
	1)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
48.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
	1)	Pengelolaan Sampah



49.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2) Penataan Pendaftaran Penduduk
	3) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
50.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	1) Pelayanan Pencatatan Sipil
51.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
52.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	1) Penyusunan Profil Kependudukan
53.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
	2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
54.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
55.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	2) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
	3) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	4) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	5) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	6) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
56.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
57.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
	1) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
58.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
59.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
60.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
61.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
62.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
63.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
64.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
	2) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat



		Pasar Kabupaten/Kota
65.		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
66.		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
67.		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	1)	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
68.		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	1)	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
69.		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	1)	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
70.		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	1)	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
71.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	1)	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	2)	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
72.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	1)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
73.		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	1)	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2)	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
74.		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	1)	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	2)	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
	3)	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
75.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	1)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	2)	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
76.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	1)	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
	2)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
77.		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1)	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
78.		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	1)	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
	2)	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
79.		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	1)	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
80.		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	1)	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
81.		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	1)	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	2)	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	3)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	4)	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota



82.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
83.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
84.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
85.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
86.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	4) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
	5) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
87.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	1) Pembangunan Prasarana Pertanian
	2) Pengembangan Prasarana Pertanian
88.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
	3) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
	4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
89.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
90.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
	1) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
91.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
92.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	1) Pembangunan dan Pengellaan Sarana Distribusi Perdagangan
93.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	1) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Daerah Kabupaten/Kota
94.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
95.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	1) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	2) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	3) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
96.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	1) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	2) Administrasi Tata Pemerintahan
	3) Fasilitasi Kerja sama Daerah
	4) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
97.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	2) Pembahasan Kebijakan Anggaran



	3)	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	4)	Peningkatan Kapasitas DPRD
	5)	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	6)	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
	7)	Pembahasan Kerja Sama Daerah
	8)	Fasilitasi Tugas DPRD
98.		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	1)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
99.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	1)	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	2)	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
100.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	1)	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	2)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	3)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
101.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	1)	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
102.		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	1)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	2)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	3)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	4)	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5)	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
103.		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	1)	Pengelolaan Barang Milik Daerah
104.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	1)	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
105.		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	1)	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
	2)	Mutasi dan Promosi ASN
	3)	Pengembangan Kompetensi ASN
	4)	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
106.		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	1)	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
107.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	1)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	2)	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
108.		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	2)	Pendampingan dan Asistens
109.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	1)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
110.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	2)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
111.		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	1)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
112.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	1)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
113.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1)	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
114.		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
115.		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI



	PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
116.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
117.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam :

1. penilaian kinerja perangkat daerah;
2. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
3. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri 6 bidang dengan memuat pelayanan dasar yaitu:

- 1) SPM Bidang Pendidikan
- 2) SPM Bidang Kesehatan
- 3) SPM Bidang Pekerjaan Umum
- 4) SPM Bidang Perumahan Rakyat
- 5) SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- 6) SPM Bidang Sosial

Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

Misi Kesatu : Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan pada misi kesatu yang terkait dengan penerapan SPM di Kabupaten Ngada adalah :
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan sasaran :



- a) Meningkatnya kualitas air
- b) Menurunnya volume sampah

Strategi yang mendukung pencapaian SPM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan perlindungan konservasi sumber-sumber air
- b) Peningkatan pengelolaan persampahan

Adapun arah kebijakannya adalah :

- a) Peningkatan pengawasan di sumber-sumber air
- b) Peningkatan rehabilitasi sumber-sumber air
- c) Peningkatan sarana persampahan
- d) Optimalisasi metode pengelolaan TPA
- e) Peningkatan penerapan pengelolaan sampah dengan metode 3R
- f) Peningkatan prasarana persampahan

Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tujuan pada misi kedua yang terkait dengan penerapan SPM di Kabupaten Ngada adalah :

Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan sasaran :

- a) Semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat
- b) Meningkatnya akses pendidikan
- c) Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Strategi yang mendukung pencapaian SPM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita
- b) Peningkatan pelayanan kesehatan anak, penduduk usia produktif dan lansia
- c) Peningkatan pemerataan fasilitas pendidikan dasar
- d) Penataan Manajemen SDM pendidikan
- e) Pengembangan manajemen sekolah
- f) Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD

Adapun arah kebijakannya sebagai berikut :

- a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi
- b) Peningkatan cakupan pelayanan balita
- c) Intensifikasi penanganan stunting
- d) Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan PTM dan PM terutama di kawasan kumuh
- e) Optimalisasi penanganan kesehatan lansia
- f) Peningkatan ketersediaan peralatan dan obat-obatan
- g) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan PHBS
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan
- i) Peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan dan keterjangkauannya terutama di wilayah yang belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan
- j) Peningkatan cakupan bantuan bagi siswa melalui BOS dan BOSDIK
- k) Pendataan penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah/putus sekolah
- l) Pemerataan tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi
- m) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
- n) Perbaikan tata kelola sekolah
- o) Standarisasi penyelenggaraan PAUD



Misi Ketiga : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar

Tujuan pada misi ketiga yang terkait dengan penerapan SPM di Kabupaten Ngada adalah :

Tujuan Pertama: Meningkatnya Kelayakhunian, dengan sasaran : Meningkatnya akses pemukiman layak huni

Strategi yang mendukung pencapaian SPM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan akses rumah layak huni
- b) Peningkatan akses air minum aman
- c) Peningkatan ketersediaan sanitasi

Adapun Arah Kebijakannya sebagai berikut :

- a) Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni
- b) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban korban bencana
- c) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
- d) Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
- e) Peningkatan ketersediaan sanitasi rumah tangga dan perbaikan sanitasi di kawasan kumuh

Tujuan Kedua : Menurunnya risiko bencana, dengan sasaran : Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana

Strategi yang mendukung pencapaian SPM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan ketersediaan infrastruktur pengendali bencana
- b) Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana
- c) Peningkatan tanggap darurat bencana

Adapun Arah Kebijakannya sebagai berikut :

- a) Peningkatan ketersediaan tembok penahan longsor/ bangunan perkuatan tebing
- b) Peningkatan ketersediaan bangunan penahan abrasi
- c) Peningkatan ketersediaan dan kapasitas fasilitator desa tangguh
- d) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
- e) Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan
- f) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebencanaan untuk masyarakat
- g) Peningkatan ketersediaan dokumen rencana kontigensi
- h) Peningkatan kapasitas kelembagaan bencana
- i) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana
- j) Peningkatan sinkronisasi dan integrasi data kebencanaan

Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani

Tujuan pada misi keempat yang terkait dengan penerapan SPM di Kabupaten Ngada adalah

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan *sasaran:* Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas, *strateginya* adalah Pembangunan sistem pengendalian dan percepatan kualitas pelayanan public dengan *arah kebijakannya* adalah Penguatan koordinasi dan percepatan pencapaian SPM.



Misi Kelima :Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Transformasi Institusi Budaya

Tujuan pada misi kelima yang terkait dengan penerapan SPM di Kabupaten Ngada adalah Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya keberdayaan PMKS
- b) Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat

Strategi yang mendukung pencapaian SPM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan cakupan pelayanan PMKS
- b) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan PMKS
- c) Pemberdayaan PMKS
- d) Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat
- e) Optimalisasi penanganan gangguan kenyamanan
- f) Peningkatan kewaspadaan dini dan kohesivitas sosial

Adapun arah kebijakannya adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan cakupan Jaminan Sosial
- b) Peningkatan cakupan rehabilitasi dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, tuna sosial, dan lansia
- c) Pemberdayaan PMKS melalui pendampingan usaha bersama
- d) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung K3
- e) Peningkatan kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- f) Peningkatan kapasitas SDM untuk melakukan deteksi dini

Tabel 1.17

Integrasi SPM Ke Dalam Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026

SPM	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan	Peningkatan pemerataan fasilitas pendidikan dasar	Peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan dan keterjangkauannya terutama di wilayah yang belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan
			Peningkatan cakupan bantuan bagi siswa melalui BOS dan BOSDIK
			Pendataan penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah/putus sekolah
		Penataan Manajemen SDM pendidikan	Pemerataan tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi
			Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pengembangan manajemen sekolah	Perbaikan tata kelola sekolah
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD	Standarisasi penyelenggaraan PAUD
Kesehatan	Semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat	Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi
			Peningkatan cakupan pelayanan balita
			Intensifikasi penanganan stunting
		Peningkatan pelayanan kesehatan anak, penduduk usia produktif dan lansia	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan PTM dan PM terutama di kawasan kumuh
			Optimalisasi penanganan kesehatan lansia
			Peningkatan ketersediaan peralatan dan obat-obatan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam



			mewujudkan PHBS
			Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan
Pekerjaan Umum	Meningkatnya kualitas air	Peningkatan perlindungan konservasi sumber-sumber air	Peningkatan pengawasan di sumber-sumber air
			Peningkatan rehabilitasi sumber-sumber air
	Menurunnya volume sampah	Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana persampahan
			Optimalisasi metode pengelolaan TPA
			Peningkatan penerapan pengelolaan sampah dengan metode 3R
			Peningkatan prasarana persampahan
	Meningkatnya akses pemukiman layak huni	Peningkatan akses air minum aman	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
		Peningkatan ketersediaan sanitasi	Peningkatan ketersediaan sanitasi rumah tangga dan perbaikan sanitasi di kawasan kumuh
Perumahan Rakyat	Meningkatnya akses pemukiman layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban korban bencana
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pengendali bencana	Peningkatan ketersediaan tembok penahan longsor/ bangunan perkuatan tebing
			Peningkatan ketersediaan bangunan penahan abrasi
		Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas fasilitator desa tangguh
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
			Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebencanaan untuk masyarakat
		Peningkatan tanggap darurat bencana	Peningkatan ketersediaan dokumen rencana kontigensi
			Peningkatan kapasitas kelembagaan bencana
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana
			Peningkatan sinkronisasi dan integrasi data kebencanaan
	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung K3
		Optimalisasi penanganan gangguan kenyamanan	Peningkatan kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
		Peningkatan kewaspadaan dini dan kohesivitas social	Peningkatan kapasitas SDM untuk melakukan deteksi dini
Sosial	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Peningkatan cakupan pelayanan PMKS	Peningkatan cakupan rehabilitasi dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, tunas sosial, dan lansia
		Pemberdayaan PMKS	Pemberdayaan PMKS melalui pendampingan usaha bersama

Sumber : RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026



Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Ngada telah diatur dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Ngada pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.18
Program Kegiatan Rencana Aksi Kabupaten Ngada Tahun 2024

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
PENDIDIKAN				
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1 Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta Didik
			2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		2 Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		3 Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan an
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan an
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan	Kegiatan



					pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	
		4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
				2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		2	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
				2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		3	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		4	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan	Kegiatan



					pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	
		5	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
		1	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	2	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
				2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		3	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		4	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan	Guru



					ketentuan peraturan perundang-undangan	
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	
		5	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
		KESEHATAN				
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang
				2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang
				3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
				4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang
				5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
				6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang
				7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
				8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang
				9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang
				10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
				11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
				12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
				13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
				14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen
PEKERJAAN UMUM						
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
				2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
				3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik
				4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR
				5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik



				6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	
				7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR
				8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	
				9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	
				10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
				11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
				12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
				13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
				14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	
				15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit
				16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit
				17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
				18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	
				19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	
				20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit
				21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
				2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen
				3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga
				4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga
				5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga
				6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
				7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
				8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
				9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
				10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
				11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	
				12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang
				13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
				14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen



				15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
				16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
				17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen
PERUMAHAN RAKYAT						
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen
				2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
				3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
				4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
				5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen
				6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
				2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen
				3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
				4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
				5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
				6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus
				2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus
				3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
				4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
				5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
				6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	
				7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit
				8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen
				9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan



		2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		2		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	
		3		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	
		3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang
		2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang
				3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
				5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
				6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
				7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	
				8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang
				9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
				10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
				11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
				12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	
		3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan
				2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
				4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
				5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
				6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen
		4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
				5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
				6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
				2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen



	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan		
				4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		
				5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit		
				6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen		
				7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen		
				8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit		
				9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang		
				10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen		
				2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
						2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		3	Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen		
		4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang		
				2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran			
				3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen		
		5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan		
				2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen		
				3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit		
				4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan		
		SOSIAL						
		1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan permakanan	Orang
2	Penyediaan sandang					Orang		
3	Penyediaan alat bantu					Orang		
4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga					Orang		
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social					Orang		
6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat					Orang		
7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					Orang		



				8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
				9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
				10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
				11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
				12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
		2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan makanan	Orang
				2	Penyediaan sandang	Orang
				3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
				4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
				5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Ngada



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Ngada
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja (Tahun N-1) Tahun 2023	Capaian Kinerja (Tahun N) Tahun 2024
1	2	3	4
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,14	72.04
2	Angka Kemiskinan	12,06	11.87
3	Angka Pengangguran	4,00	2.68
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,49	3.67
5	Pendapatan Perkapita(Ribu Rupiah)	23.955	7.137
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Na	Na

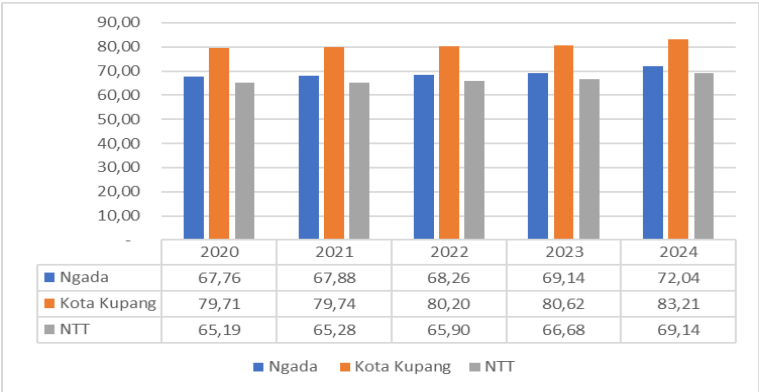
Sumber : Ngada Dalam Angka 2025, BPS NTT 2025

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

IPM Kabupaten Ngada sejak tahun 2020 menduduki peringkat 2 (dua) untuk Provinsi NTT setelah Kota Kupang serta lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi NTT, Seperti terlihat pada Grafik berikut ini :

Grafik 2.1
Perkembangan IPM Kabupaten Ngada, Kota Kupang, Prov. NTT dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber :BPS NTT 2020-2025, Berita Resmi Statistik



Dengan nilai 72,04 berdasarkan konsepsi tersebut maka status pembangunan manusia di Kabupaten Ngada masih termasuk kategori sedang artinya kinerja pencapaian pembangunan relative cukup baik. Meningkatnya pencapaian IPM bisa diartikan secara sederhana yaitu meningkatnya satu atau lebih komponen IPM itu sendiri, yakni Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), angka Harapan Lama Sekolah dan angka Rata-rata Lama Sekolah, serta pengeluaran per kapita.

2. Angka Kemiskinan

Salah satu indikator untuk mengukur kemiskinan digunakan indikator Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Ngada selama periode 2020 - 2024 mengalami peningkatan.

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngada Tahun 2020 - 2024

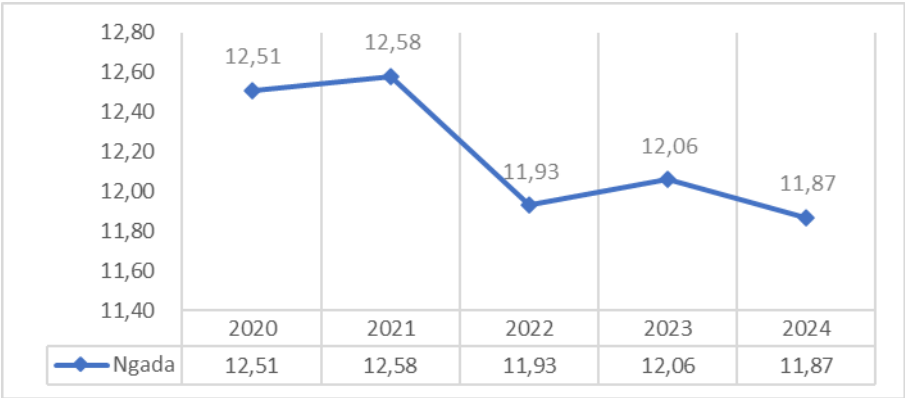
Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk
2020	363.531	20,62	12,51
2021	477,840	20,98	12,58
2022	435.916	20,14	11,93
2023	396.506	20,98	12,58
2024	489.139	20,48	11,87

Sumber : Ngada Dalam Angka 2025

Apabila pengeluaran penduduk per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan, berarti bahwa penduduk tersebut merupakan penduduk miskin. Terdapat dua metode untuk menghitung garis kemiskinan yakni Garis kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan bukan makanan. Garis Kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Dari tampilan data kemiskinan Ngada, terlihat bahwa garis kemiskinan cenderung meningkat; salah satu faktornya karena adanya inflasi, sehingga mempengaruhi nilai uang untuk kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori, sementara prosentase penduduk miskin di Kabupaten Ngada mengalami penurunan sebesar 0,19% dari 12,06% di tahun 2023 turun menjadi 11,87% di tahun 2024

Grafik 2.2
Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngada dan NTT Tahun 2020-2024

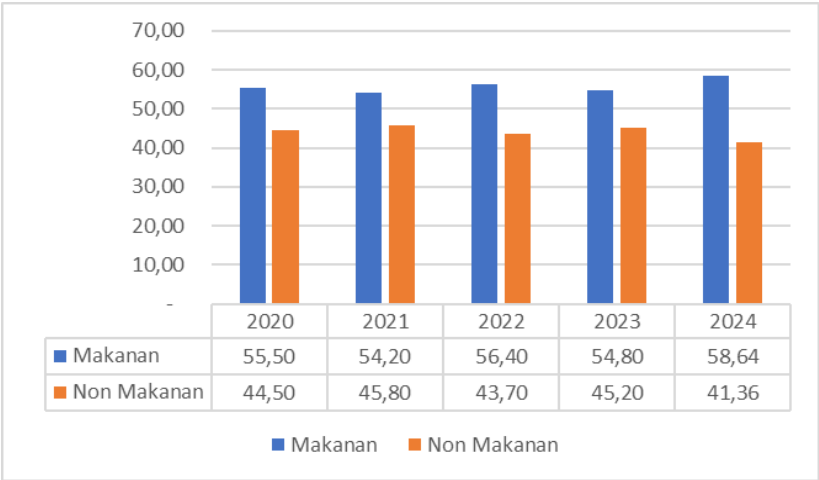


Sumber : Ngada Dalam Angka 2020 - 2025



Angka kemiskinan juga dilihat dari pola pengeluaran perkapita perbulan untuk makanan dan non makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan, menggambarkan semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Sebaliknya bila pengeluaran untuk non makanan seperti pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, semakin tinggi, maka rumah tangga tersebut semakin sejahtera.

Grafik 2.3
Prosentase Pola Pengeluaran Perkapita Perbulan Kab. Ngada
untuk makanan dan Non Makanan 2020-2024

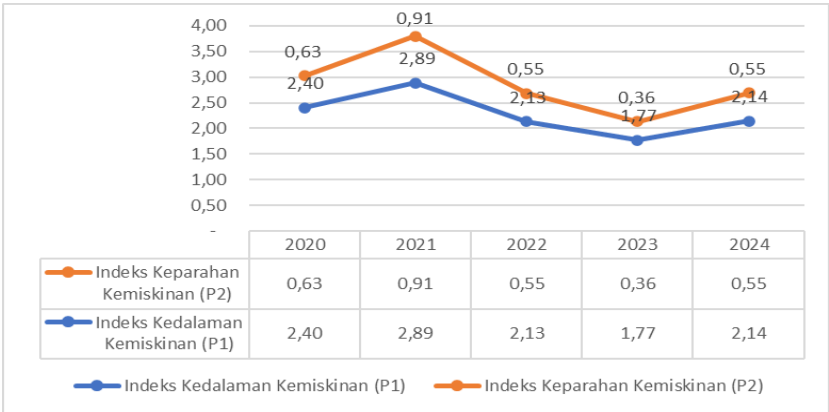


Sumber :Ngada Dalam Angka 2020 - 2025

Dari tampilan data diatas, terlihat bahwa terjadi kenaikan persentase pengeluaran untuk bahan makanan dari 54,80% pada tahun 2023 menjadi 58,64% pada tahun 2024. Sebaliknya untuk non makanan persentasenya mengalami penurunan dari 45,20% pada tahun 2023 menjadi 41,36% pada tahun 2024. Batasan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah jika pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan berada di bawah 50 persen.

Selain garis kemiskinan, terdapat indikator yang perlu juga dilihat yakni Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin (garis kemiskinan). Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan yang mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan di wilayah tersebut. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 2.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024



Sumber :Ngada Dalam Angka 2020-2025



Indeks kedalaman kemiskinan Ngada naik secara dari 1,77 ditahun 2023 menjadi 2,14 di tahun 2024. Demikian juga halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Ngada lebih naik dari 0,36 pada tahun 2023 menjadi 0,55 di tahun 2024.

3. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran diukur berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bias menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tetapi tidak mendapatkannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Ngada tahun 2023 adalah sebesar 2,68%. Hal ini berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat sekitar 2 orang menganggur. TPT pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,32 % dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan 1,19% dari tahun sebelumnya.

Tabel.2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Ngada
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Tinggkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
1	2020	4,69
2	2021	2,99
3	2022	2,81
4	2023	4,00
5	2024	2,68

Sumber :Ngada Dalam Angka 2025, BPS NTT

Jumlah angkatan kerja pada yang berusia 15 tahun ke atas dan bekerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 17.05 orang dibandingkan tahun 2023. Seiring dengan pertambahan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik dari tahun sebelumnya. Kenaikan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penambahan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja menjadi penduduk bekerja.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk 15 tahun keatas menurut Jenis Kegiatan Utama tahun 2020 - 2024

Kegiatan seminggu yang lalu	2020	2021	2022	2023	2024
Anggkatan kerja					
Bekerja	79.931	83.818	92.088	90.651	107.704
Menganggur	3.934	2.583	2.660	3.777	2.967
Bukan Anggkatan kerja	6.814				
Sekolah	8.385	9.037	6.814	9.835	8.634
Mengurus RT	18.566	15.150	11.998	11.557	3.654
Lainnya	6.500	8.604	7.042	10.456	5.135
Total	117.316	119.192	120.602	126.276	128.094

Sumber :Ngada Dalam Angka 2020-2025



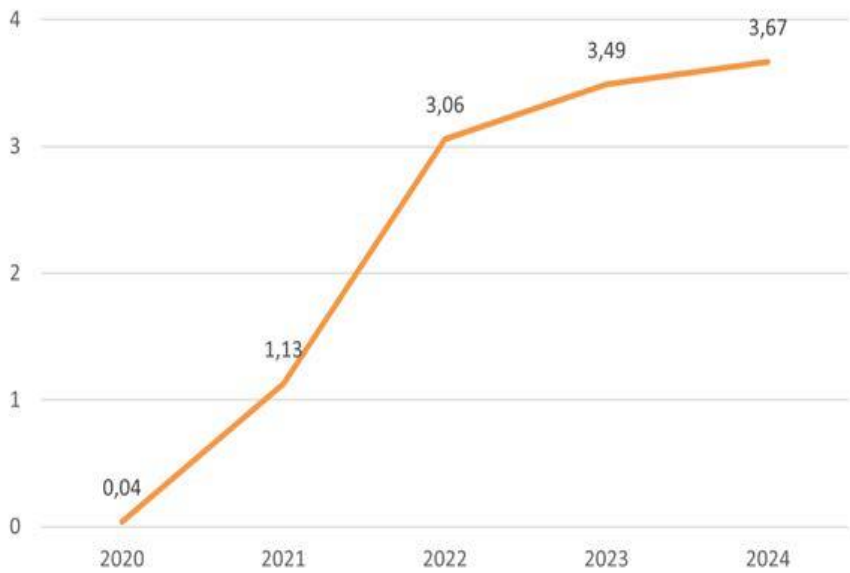
4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomidapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkanoleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang dari 17 kategori lapangan usaha pada PDRB atas dasar harga konstan. Apabila sebuah lapangan usaha memiliki peranan penting namun pertumbuhannya rendah maka dapat berdampak pada terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah lapangan usaha memiliki perananan penting dan pertumbuhannya tinggi maka lapangan usaha tersebut dapat menjadi roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada Tahun 2023 meningkat sangat signifikan setelah tahun 2020 mengalami penurunan hingga 0,04 % dari 5,02 % pada tahun 2019, demikian halnya Provinsi NTT positif menjadi 3,52% dibanding tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif -0,83%, demikian juga halnya denga pertumbuhan ekonomi secara Nasional naik dari3,70% pada tahun 2021 menjadi 5,31% pada tahun 2022 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 5,05%. Keadaan ini menunjukkan membaiknya perekonomian Indonesia setelah terpuruk akibat covid-19.

Grafik 2.5
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngada,
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Ngada Dalam Angka 2025

Dari sisi lapangan usaha masih terdapat 1 dari 17 sektor ekonomi Kabupaten Ngada menyumbang kontribusi negative yaitu sektor jasa pendidikan. Enam belas sektor yang mengalami pertumbuhan positif ada sektorPengadaan Listrik dan Gas mengalami kenaikan pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding tahun 2022 menjadi 11,25 persen ditahun 2023dari 4,74 persen ditahun 2022. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan dan kontribusi
PDRB atas dasar harga berlaku 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngada Tahun 2020 s/d 2024

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,29	34,54	35,07	35,53	35,07
B	Pertambangan dan Penggalian	1,75	1,76	1,73	1,71	1,62
C	Industri Pengolahan	1,43	1,38	1,37	1,47	1,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
F	Konstruksi	12,15	12,79	12,78	12,81	12,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,59	7,85	8,01	8,38	8,68
H	Transportasi dan Pergudangan	4,35	4,33	4,43	4,63	4,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,42	0,43	0,46	0,48	0,49
J	Informasi dan Komunikasi	4,64	4,84	4,84	4,64	4,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,68	6,84	6,85	6,58	6,39
L	Real Estate	1,8	1,75	1,73	1,74	1,76
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	20,7	19,27	18,69	18,27	18,57
P	Jasa Pendidikan	1,91	1,85	1,76	1,68	1,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,53	1,47	1,49	1,5
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,69	0,67	0,65	0,64	0,64
	Pertumbuhan PDRB	100	100	100	100	100
	*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara					
	Sumber Ngada Dalam Angka					

5. Pendapatan Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa faktorpendapatan dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita, namun PDRB per kapita tidak dapat menunjukkan kapasitas ekonomi suatu daerah karena bila penduduknya banyak PDRB perkapita akan semakin kecil, karena pembandingnya adalah jumlah penduduk tanpa dibedakan apakah penduduk itu produktif atau tidak. Nilai PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Nilai PDRB per kapita riil



Kabupaten Ngada pada tahun 2024 meningkat terus dari tahun 2020.

Tabel 2.6
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Ngada
Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024

Nilai PDRB (miliar Rupiah)	2020	2021	2022	2023*	2024**
Atas Dasar Harga Beraku(ADHB)	3.493,66	3.578,33	3.819,39	4.114,02	4.469,22
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	2.310,19	2.336,24	2.407,74	2.491,69	2.583,24

*) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Sumber : Ngada Dalam Angka Tahun 2020-2025

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Seperti dirilis oleh BPS Kabupaten Ngada, pada tahun 2020 tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Kabupaten Ngada yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,326. Angka ini meningkat 0,017 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* tahun 2019 yang sebesar 0,309 dan menurun 0,006 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* tahun 2018 yang sebesar 0,315.

Tabel 2.7
Gini Ratio Kabupaten Ngada dan Provinsi NTT 2018-2020

Gini Ratio			
	2018	2019	2020
Ngada	0,315	0,309	0,326
NTT	0,351	0,356	0,354

Sumber : BPS Kabupaten Ngada 2021

Angka Gini Ratio Tahun 2021, 2022 dan 2023 untuk Kabupaten Ngada belum dirilis oleh BPS.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian kinerja	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD} = 2.653}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan} = 5.265} \times 100\%$	50.39	Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar} = 15.356}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan} = 17.881} \times 100\%$	85.88	Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		79.87	Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



			Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 7.829 X 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 9.802		
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 509 X 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 960	53.02	Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 103. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 169.445	0,617	IKK Outcome RSUD Bajawa terkait Daya Tampung RS Tahun 2024
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 1. Jumlah RS di kabupaten/kota = 1	100	IKK Outcome RSUD Bajawa terkait RS Rujukan yang terakreditasi tahun 2024
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 1771. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 1962	90,27	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 1768. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 1771	99,83	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar

1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 1746. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 1763	99,04	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 10.032. Jumlah balita di kabupaten/kota = 10.060	99,72	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 25.379. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 27.683	91,68	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 62.171. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 112.047	55,49	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 14.432. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 19.588	73,68	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 5.279. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 8.291	63,67	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 964. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 1.496	64,44	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 316. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 316	100	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2.170. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 2.540	85,43	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberculosis Sesuai Standar
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 1.963. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 2.328	84,32	IKK Outcome terkait Pelayanan Kesehatan Terduga HIV Sesuai Standar
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1.329.91	0.0	Data pembilang tidak ada karena tidak dianggarkan dalam DPA Tahun 2024



1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 181,8	0,0	Data pembilang tidak ada karena tidak dianggarkan dalam DPA Tahun 2024
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 243 luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 4300	5,65	Luas kewenangan kabupaten kota dalam Ha
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 21.870. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 42.426	51,548	Data keadaan 2024
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 3569. Jumlah rumah di Kabupaten A = 44388	8,04	Tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2024
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 11. Jumlah IMB yang berlaku = 11	100	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 381,86. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 1042	36,64	Panjang jalan kabupaten dalam KM
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 16 Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 217	7,37	Data Yang dipakai data tahun 2023. Untuk tahun 2024, Dinas tidak mengadakan pelatihan terhadap tenaga konstruksi.
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 44. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 217	20,28	Keadaan tahun 2024



1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 0	0	Untuk tahun 2024, dinas masih sebatas melakukan pendataan rumah yang berada di lokasi rawan bencana. Anggaran untuk perbaikan rumah tidak dianggarkan.
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 12. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 12	12	Tahun 2024 dianggarkan bantuan rumah kepada masyarakat yang terdampak proyek geothermal
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 0. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 0	0	Berdasarkan Dokumen RP3KP kabupaten Ngada tahun 2023, tidak ada kawasan kumuh di Kabupaten Ngada di bawah 10 ha. Selain itu juga untuk tahun 2024, tidak dianggarkan dalam DPA Dinas untuk penanganan kawasan kumuh.
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 5390. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 44.388	12.14	Sumber data dinas PUPRP
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 21.870 Jumlah unit rumah kab/kota = 44.388	49,27	Menggunakan data rumah yang sudah terfasilitasi SPAM tahun 2024
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 49. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 49	100	Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Ngada
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 7. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 26	26,92308	Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Ngada
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 300. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 171736	0,174687	Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Ngada
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,174687	Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana



	dan Perlindungan Masyarakat	terhadap bencana	= 300. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 171736		Daerah Kab. Ngada
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 3. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 230	1,304348	Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 15. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 15	100	Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Ngada
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	10,13	Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Ngada
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 14.646 Populasi pen. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 20.517	71,38	Dilaksanakan oleh Dinas Sosial
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 1.080. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 1.080	100	Dilaksanakan oleh Dinas Sosial
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD=1. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota=3	33,33333	IKK Outcome Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngada terkait kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi=10. Jumlah tenaga kerja keseluruhan=593	1,6863406	IKK Outcome Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngada terkait tenaga



					kerja bersertifikat kompetensi
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)=3,67. Jumlah tenaga kerja=593	0,618887	IKK Outcome Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngada terkait tingkat produktivitas tenaga kerja
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak=28. Jumlah perusahaan=28	100	IKK Outcome Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngada terkait perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan=72. Jumlah pencari kerja yang terdaftar=126	57,1428571	IKK Outcome Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngada terkait Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten Ngada
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 0. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 1.102.334.439.499	0	Belum ada program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten karena keterbatasan alokasi anggaran.
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 22. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 22	100	1. Keterbatasan alokasi anggaran sehingga penjangkauan korban kekerasan terhadap anak belum optimal; 2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada UPTD PPA, dimana UPTD PPA hanya mempunyai 2 tenaga SDM yaitu Kepala UPTD PPA dan KTU UPTD PPA.
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 10. Jumlah penduduk perempuan = 85.779	11.66	1. Keterbatasan alokasi anggaran sehingga penjangkauan korban kekerasan



					terhadap perempuan belum optimal; 2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada UPTD PPA, dimana UPTD PPA hanya mempunyai 2 tenaga SDM yaitu Kepala UPTD PPA dan KTU UPTD PPA.
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan = 54,78. Jumlah kebutuhan pangan = 30	182,6	Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 186.430. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Ruang (KKPR) = 186.430	100	Keadaan tahun 2024
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 9. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 9	100	Keadaan tahun 2024
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 186.430. Luas tanah di atas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 186.430	100	Keadaan tahun 2024
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 319. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1.250	25.52	Keadaan tahun 2024
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 0	0	
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani =3 Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 3	100	Bagian Hukum Setda Ngada
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKLH Kab/Kota = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL). IKA = Indeks Kualitas Air = 61,67 IKU = Indeks Kualitas Udara = 94,91 IKL = Indeks Kualitas Lahan = 65,3	75,92 Baik	Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngada
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 35.770 Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun	22,8076563	Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngada



			berjalan kabupaten/kota = 156.833,3		
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 4 usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 4	100	Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngada
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 118907. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 124987	95.1354941	IKK Outcome Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada terkait Perekaman KTP Elektronik Tahun 2024
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 10421. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 118907	8.763992	IKK Outcome Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada terkait Kepemilikan KIA untuk anak usia 0-17 tahun
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 79255. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 169445	46.7732893	IKK Outcome Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada terkait Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2024
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 0. Jumlah PD = 42	0	IKK Outcome Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada untuk OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 5. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 43	11.63	Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.l.2	Pemberdayaan masyarakat dan	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa	6.52	Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



	desa		Membangun per tahun = 6. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 92		Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR : Angka Kelahiran Total ASFR: Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi : jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi : Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama	1,24	IKK Outcome terkait TFR 2024
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 9466. Jumlah Pasangan Usia Subur = 18074	55,45	IKK Outcome tentang Pemakaian Kontrasepsi Modern Tahun 2024
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 6984 Jumlah Pasangan Usia Subur = 18074	15,75	IKK Outcome terkait Unmet Need Tahun 2024
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}$ IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = $\text{jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb} \times \text{bobot lintas} \div \text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut}$ Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan	1.41	Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Ngada



			antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 >), bobot = 0.5		
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0.53	Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Ngada
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 0. Jumlah PD = 42	0	Lampiran Data Dukung IKK Outcome Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 1. Jumlah Layanan Publik = 3	33,33	Lampiran Data Dukung IKK Outcome Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 5.700. Jumlah penduduk = 116.820	4,87	Lampiran Data Dukung IKK Outcome Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 37	31,35	Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil



			Jumlah seluruh koperasi = 118		Menengah
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 5.458 Jumlah usaha mikro keseluruhan = 12.211	44,69	Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1 = -96.980.440.454. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 175.064.783.320	-55,3968871	IKK Outcome Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada terkait persentase peningkatan investasi di Kabupaten Ngada
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 654. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 50.040	1,307	Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 0. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 0	0	Tidak ada data
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada even olahraga nasional dan internasional = 2	2	Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 49. jumlah PD = 49	100.0	Sumber Data :BP Litbang Kab. Ngada
2.s.2	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 49. jumlah PD =49	100.0	Sumber Data : BP - Litbang Kab. Ngada
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 0. Jumlah area penilaian = 0	0	Lampiran Data Dukung IKK Outcome Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 113 Jumlah cagar budaya yang terdata = 148 $\frac{113}{148} \times 100\%$	76.35	Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan	0.0	Tidak pernah mengukur tingkat kegemaran membaca



			survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		masyarakat
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =	0.0	Tidak ada naskah kuno yang terdaftar
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75	Sumber data Dinas Kearsipan & Perpustakaan
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara		33	Sumber data Dinas Kearsipan & Perpustakaan



		untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban = m tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK = b tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK = g tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK = a tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK = c tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK = i tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan		
--	--	---	--	--	--



			NSPK		
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP);	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 6.312 Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 4.845	130,279	IKK Outcome terkait Jumlah Total Produksi Perikanan
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 8101. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 12381	65.4309022	IKK Outcome terkait Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = -5029. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 110596	-4.5471807	IKK Outcome terkait Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 498. Jumlah kamar yang tersedia = 245645	0.2027316	IKK Outcome terkait Tingkat hunian akomodasi
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 22.01. Total PDRB Berlaku = 4469.22	0.4924797	IKK Outcome terkait Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 1.005.995.000. Total realisasi PAD = 3.307.900.923	30.4118843	IKK Outcome terkait Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas; pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 53,16. luas panen = 8.895,57	0,59	Data diatas merupakan penjumlahan dari data produksi dan luas panen komoditi padi, jagung dan kedelai (data terlampir)
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 24.021 Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 51.296	-46,82	Sumber data Dinas Peternakan Kabupaten Ngada
3.d	Kehutanan	-	-	100	Daerah tidak memiliki kewenangan urusan Kehutanan
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 0	0.0	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjadi kewenangan provinsi
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 891	7,29 %	Sumber data Dinas Perindag Kab. Ngada



		Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 12.210		
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 2.186,81 RDKK = 2.538,31	86,15 %	Sumber data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Ngada
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 340 Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 3.767	9,03 %	Sumber data Dinas Perindag Kab. Ngada
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 371 Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 2.726	13,61 %	Sumber data Dinas Perindag Kab. Ngada
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Pertumbuhan Sektor Non Migas = 32,69 % Kontribusi Industri Non Migas terhadap PDRB = 18,49%	51,18 %	Sumber data Dinas Perindag Kab. Ngada
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Proses perizinan dilakukan secara online dengan aplikasi OSS dan dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Proses perizinan dilakukan secara online dengan aplikasi OSS dan belum ada pengajuan Ijin Perluasan Industri
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Proses perizinan dilakukan secara online dengan aplikasi OSS dan belum ada Kawasan Industri di Kabupaten Ngada
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Informasi industri : Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri : Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Informasi bahan bakar / energy (10%)	25%	Dinas Perindag telah melakukan pendataan, pendampingan dan pembinaan terhadap IKM yang ada di Kab. Ngada, tetapi tidak dilaporkan ke SIINas karena akun SIINas yang memuat semua laporan produksi, bahan baku penolong, jenis bahan bakar, informasi tenaga kerja dan informasi investasi hanya



			Informasi tenaga kerja (10%) Informasi Investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		dapat diakses oleh pemilik akun yaitu pelaku usaha.
3.h	Transmigrasi	Tidak ada kewenangan kabupaten/kota	-	100	Tidak ada kewenangan kabupaten/kota

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian kinerja	Keterangan
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 113.690.508.286,05. Jumlah APBD = 1.102.334.439.499	10,31	Data pembilang dihitung dari Jumlah Belanja Pegawai dikurangi (Belanja Pegawai Dinas Pendidikan + Belanja Pegawai Dinas Kesehatan + Belanja Pegawai RSUD)
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 44.852.561.375,75. Jumlah Pendapatan pada APBD = 1.051.596.656..058,8	4,26	Data LRA sementara per tanggal 18 Maret 2025
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.	4	Inspektorat daerah kabupaten Ngada, Level 2, Data tahun 2024
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	2.51	Inspektorat daerah, Kapabilitas Level 2, data tahun 2024
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 763.369.322.244,2 jumlah belanja APBD = 1.006.704.495.212,8	75,82	Data LRA sementara per tanggal 18 Maret 2025
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	6	Sumber Data Dokumen Opini Laporan Keuangan BPKP
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 217	0	Kabupaten Ngada pada TA. 2024 TIDAK MENGALOKASIKAN BELANJA dengan Jumlah Kontrak infrastruktur yang memiliki nilai besar dan perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n adalah jumlah kontrak proyek konstruksi



					infrastruktur
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 285. Jumlah seluruh pengadaan = 628	45,38	Data Bagian Administrasi Pembangunan
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = Rp270.267.118.902.44. Total belanja operasi dan modal = Rp 462.811.183.716.32	58,39	Data Bagian Administrasi Pembangunan
4b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = Rp 245.710.240.406. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) =Rp 132.003.818.145.	186,13	Data Bagian Administrasi Pembangunan
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 858. Jumlah seluruh pegawai = 1.258	68,20	Sumber Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngada
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 261. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1.258	20,74	Sumber Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngada
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 242. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 869	27,84	Sumber Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngada
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 1.006.704.495.212,8. Total Belanja APBD = 1.102.334.439.499	8,67	Data realisasi sementara per tanggal 18 Maret 2025
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 44.852.561.375,75 Total PAD dalam APBD = 53.923.611.500	16,8	Data realisasi sementara per tanggal 18 Maret 2025
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	4	



			3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		
4.d.4	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 80.683.271.400,91. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 832.676.576.102,69	9,6	Data realisasi sementara per tanggal 18 Maret 2025
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda =Rp 832.676.576.102.69. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = Rp 916.105.605.839	90,89	Lampiran Data Dukung IKK Outcome Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 29. Total jumlah dokumen yang telah dirinci = 29	100	Lampiran Data Dukung IKK Outcome Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada



2.3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Komitmen Pelaksanaan Pembangunan yang berorientasi pada hasil dan berpijak pada Birokrasi berdampak bagi masyarakat maka kinerja pelaksanaan pembangunan harus memiliki kualitas output yang diukur dari proses perencanaan yang berkelanjutan dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab serta mampu diketahui logical frameworknya.

Tahun 2024 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada tahun 2021-2026, dengan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2..1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024

Tujuan Strategis 1				
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi				
Indikator Tujuan			Satuan	Target
1.	Laju pertumbuhan ekonomi		Angka	5,18
Sasaran Strategis 1. 1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian				
	1.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Angka	36,39
Sasaran Strategis 1. 2 Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian				
	1.2.1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Angka	35,35
Sasaran Strategis 1. 3 Meningkatnya realisasi penanaman modal				
	1.3.1	Presentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	4,02
Sasaran Strategis 1. 4 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhada perekonomian				
	1.4.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Angka	0,88
Sasaran Strategis 1. 5 Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian				
	1.5.1	Kontribusi sektor perdagangan terhada PDRB	Angka	8,12
Sasaran Strategis 1. 6 Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian				
	1.6.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Angka	1,59
2	Laju Inflasi		Angka	1,84
Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa				
	2.1.1	Indeks Harga Konsumen	Angka	114,32
Sasaran Strategis 2.2 Meningkatnya ketahanan pangan				
	2.2.1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	100
Tujuan Strategis 2				
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan				
Indikator Tujuan			Satuan	Target
3	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan		Indeks	0,305
Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil dan menengah terhadap perekonomian				
	3.1.1	Presentase koperasi yang SHU-nya menigkat	Persen	2
	3.1.2	Presentase peningkatan kelas usaha kecil ke	Persen	6,3



		menengah		
Tujuan Strategis 3				
Menurunnya kemiskinan				
Indikator Tujuan			Satuan	Target
4	Tingkat kemiskinan		Angka	10,51
Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya kesejahteraan petani				
	4.1.1	Nilai Tukar Petani	Angka	115,07
Sasaran Strategis 4.2 Meningkatnya kesejahteraan nelayan				
	4.2.1	Nilai Tukar Nelayan	Angka	71,75
Tujuan Strategis 4				
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
Indikator Tujuan			Satuan	Target
5	Indeks kualitas lingkungan hidup		Angka	68,36
Sasaran Strategis 5.1. Meningkatnya kualitas udara				
	5.1.1	Indeks kualitas udara	Indeks	83,95
Sasaran Strategis 5.2 Meningkatnya kualitas air				
	5.2.1	Indeks kualitas air	Indeks	52
Sasaran Strategis 5.3 Meningkatnya kualitas tutupan lahan				
	5.3.1	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	69,323
Sasaran Strategis 5.4 Menurunnya volume sampah				
	5.4.1	Persentase volume sampah yang tertangani	Persen	21
Tujuan Strategis 5				
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
Indikator Tujuan			Satuan	Target
6	Usia Harapan Hidup (UHH)		Usia	69,64
7	Indeks Pembagunan Manusia (IPM)		Indeks	70,1
Sasaran Strategis 7.1 Semakin Baiknya derajat kesehatan masyarakat				
	7.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	102/100.000 KH
	7.1.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	34/1.000 KH
	7.1.3	Angka Kematian Balita (AKABA)	Angka	34/1.000 KH
	7.1.4	Angka Stunting	Angka	9
	7.1.5	Angka Kesakitan	Angka	5,43
Sasaran Strategis 7.2 Terkendalinya pertumbuhan penduduk				
	7.2.1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,9
Sasaran Strategis 7.3 Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera				
	7.3.1	Presentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	23,95
Sasaran Strategis 7.4 Meningkatnya Akses Pendidikan				
	7.4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	35



	7.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	95,30
	7.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	86,30
	7.4.4	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	13,5
	7.4.5	Rata-rata nilai Sekolah (RLS)	Angka	9,36
Sasaran Strategis 7.5 Meningkatnya kualitas pendidikan				
	7.5.1	Rata-rata nilai ujian siswa	Nilai	68
	7.5.2	Nilai Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Nilai	73
	7.5.3	Nilai akreditasi lembaga penyelenggara PAUD	Predikat	A
Sasaran Strategis 7.6 Meningkatnya kualitas dan layanan perpustakaan daerah				
	7.6.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	68
Sasaran Strategis 7.7 Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan				
	7.7.1	Peringkat pada event olahraga daerah (PORPROV) / (Persentase prestasi olahraga)	Persen	2
	7.7.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	20
Sasaran Strategis 7.8 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan parsipasinya dalam pembangunan				
	7.8.1	Indeks pemberdayaan Gender	Indeks	52,77
Sasaran Strategis 7.9 Meningkatnya kualitas kehidupan anak				
	7.9.1	Status kabupaten layak anak	Predikat	Madya
Tujuan Strategis 6				
Menurunnya kemiskinan				
Indikator Tujuan			Satuan	Target
8	Angka Kemiskinan		Angka	10,51
Sasaran Strategis 8.1 Menurunnya tingkat pengangguran				
	8.1.1	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Angka	3,18
Tujuan Strategis 7				
Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi				
Indikator Tujuan			Satuan	Target
9	Rata-rata kecepatan tempuh antar kawasan-kawasan prioritas		KM/JAM	28,93
Sasaran Strategis 9.1 Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan				
	9.1.1	Presentase panjang jalan pada ruas prioritas dalam kondisi baik	Persen	73,29
10	Presentase penurunan angka kecelakaan		Persen	20,00
Sasaran Strategis 10.1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan				
	10.1.1	Presentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	70,68
11	Presentase kawasan pariwisata yang dapat diakses angkutan umum layak		Persen	100
Sasaran Strategis 11.1 Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi umum				



	11.1.1	Presentase peningkatan akses angkutan umum	Persen	100
Tujuan Strategis 8				
Meningkatnya kelayakhunian				
Indikator Tujuan			Satuan	Target
12	Rasio pemukiman kumuh		Rasio	5,1
Sasaran Strategis 12.1 Meningkatkan akses pemukiman layak huni				
	12.1.1	Rasio rumah layak huni	Rasio	50
	12.1.2	Presentase kawasan permukiman dan perumahan dengan PSU layak	Persen	94,55
	12.1.3	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92
	12.1.4	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	78,34
Sasaran Strategis 12.2 Meningkatkan kualitas tata ruang dan bangunan				
	12.2.1	Presentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	Persen	28,56
	12.2.2	Presentase bangunan gedung sesuai standar	Persen	100
Tujuan Strategis 9				
Menurunnya risiko bencana				
Indikator Tujuan			Satuan	Target
13	Indeks Risiko Bencana		Indeks	100
Sasaran Strategis 13.1 Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana				
	13.1.1	Angka korban bencana	Angka	40
Tujuan Strategis 10				
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				
Indikator Tujuan			Satuan	Target
14	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	63 (B)
Sasaran Strategis 14.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				
	14.1.1	Nilai SAKIP	Nilai	67 (B)
	14.1.2	Nilai EKPPD	Nilai	29,500
Sasaran Strategis 14.2 Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah				
	14.1.1	Indeks manajemen resiko	Indeks	Level 3
	14.1.2	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	81
	14.1.3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70
Sasaran Strategis 14.3 Meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas keuangan pemerintah daerah				
	14.3.1	Opini BPK	Opini	WTP
	14.3.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	65
Sasaran Strategis 14.4 Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas				
	14.4.1	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	75



Sasaran Strategis 14.5 Meningkatnya transparansi pemerintah daerah berbasis teknologi informasi				
	14.5.1	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	2,6
	14.5.2	Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks	68
Tujuan Strategis 11				
Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat				
Indikator Tujuan			Satuan	Target
15	Angka Kemiskinan		Angka	10,51
16	Indeks Kesalehan Sosial		Indeks	56
Sasaran Strategis 16.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa				
	16.1.1	Indeks desa membangun	Indeks	0,6731
Sasaran Strategis 16.2 Meningkatnya keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial				
	16.2.1	Presentase PMKS yang berdaya	Persen	20
Sasaran Strategis 16.3 Meningkatnya transformasi budaya				
	16.3.1	Presentase penurunan biaya sosial	Persen	15
	16.3.2	Presentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	70
Sasaran Strategis 16.4 Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat				
	16.4.1	Angka konflik sosial	Angka	7

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja, Tahun Sebelumnya dan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ngada tahun 2024 berdasarkan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan Visi Misi Kabupaten Ngada selama periode 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ngada. Nilai akuntabilitas dari capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran. Pemerintah Kabupaten Ngada mempunyai 5 Misi, 11 Tujuan, dengan 16 Indikator Tujuan dan 40 Sasaran dengan 63 Indikator Kinerja Utama Sasaran yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Ngada tahun 2024

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ngada
Tahun 2023 dan 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN
1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	angka	35,32	35,02	98	B	36,39	35,33	97,08	B
2	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	angka	35,32	36,05	102,8	B	35,35	35,91	102	B
3	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Presentase peningkatan realisasi PMDN	%	3,17	0,35	11	C	4,02	2,03	50,49	C
		Presentase peningkatan PMA	%	0,56	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	angka	0,79	0,65	82	C	0,88	0,48	54,54	C
5	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	angka	7,95	8,01	100,7	BS	8,12	8,38	103,20	BS



6	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	angka	1,55	1,37	88	B	1,59	1,47	92,45	B
7	Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Indeks Harga Konsumen	angka	112,26	117,32	104,5	BS	114,32	117,32	102,5	BS
8	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	angka	79,74	80,88	101,4	BS	100	99,9	99,9	B
9	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil dan menengah	Presentase koperasi yang SHU-nya meningkat	%	1,10	1,05	95,45	B	2	2	100	B
		Presentase peningkatan kelas usaha kecil ke menengah	%	6,3	6,0	95,2	B	6,3	6,0	95,2	B
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	angka	113,44	-	-	-	115,07	-	-	-
11	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	angka	59,79	-	-	-	71,75	-	-	-
12	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	indeks	84,25	90,33	107,2	BS	83,95	94,91	113	BS
13	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	indeks	51,50	62,5	121,3	BS	52	61,67	118,6	BS
14	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	65,35	65,35	100	B	69,323	65,3	94,2	B
15	Menurunnya volume sampah	Persentase volume sampah yang tertangani	%	20	21	105	BS	21	22,81	108,6	BS
16	Semakin Baiknya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	102/100.00 KH	103,7/100.000 KH	98,03	B	102/100.00 KH	226,89/100.000 KH	-22,4	C
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	34/1.000 KH	18,01/1.000 KH	149,7	BS	34/1000 KH	14,75/1000 KH	156,62	BS
		Angka Kematian Balita (AKABA)	Angka	34/1.000	18,1/1.000 KH	146,8	BS	34/1000 KH	15,31/1000 KH	154,62	BS
		Angka Stunting	Jumlah	11,68	8,4	128,1	BS	9	9,62	93,11	B
		Angka Kesakitan	Angka	5,88	12,9	-	-	5,43	53,44	53,44	
17	Terkendalnya pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	3,1	1,35	229,6	BS	2,9	1,24	234	BS
18	Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera	Presentase Keluarga Pra Sejahtera	%	24,56	10,41	235	BS	23,95	11,12	215	BS
19	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	32,23	55,04	170	BS	35	53,02	151	B
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	94,45	88,42	93,6	B	95,30	86,51	91	B
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	85,30	86,88	101,85	BS	86,30	79,14	91,7	B
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	13,30	8,54	64,21	C	13,5	12,75	106	BS
		Rata-rata nilai Sekolah (RLS)	Angka	9,15	12,73	139,12	BS	9,36	8,83	94	B
20	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata ujian siswa	Angka	65,00	60	92,30	B	68,00	72,76	107	BS
		Nilai Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Nilai	70,00	75,43	107,75	BS	73,00	97,21	133	BS
		Presentase Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan PAUD	%	95,91	75	78,19	B	97,27	80,77	83	B
21	Meningkatnya kualitas dan layanan perpustakaan daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	68	-	-	-	68	-	-	-
22	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Peringkat pada event olahraga daerah (PORPROV)	Angka	3	4	75	B	2			
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	15	7,13	47	K	20			
23	Meningkatnya keberadaan perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan	Indeks pemberdayaan Gender	Indeks	96,7	72,23	74,69	C	52,77	55,41	105	BS
24	Meningkatnya kualitas kehidupan anak	Status kabupaten layak anak	Status	Madya	Pratama	-	-	Madya	Madya	100	B
25	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka		3,48	2,51	138,64	BS	3,18	2,51	138,64	BS
26	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Presentase panjang jalan pada ruas prioritas dalam kondisi baik	%	72,33	105,67	146	BS	73,29			
		Presentase penurunan angka kecelakaan	%	-	-	-	-	20	-	-	-
27	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Presentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	62,68	39,41	62,87	C	70,68	39,41	56	C
		Presentase kawasan pariwisata yang dapat diakses angkutan umum layak	%	-	-	-	-	100	-	-	-
28	Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan	Presentase peningkatan akses angkutan umum	%	100	100	100	B	100	100	100	B



	transportasi umum										
29	Meningkatnya akses pemukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	Rasio	24,35	24	98,56	B	50	25	36,04	C
		Presentase kawasan permukiman dan perumahan dengan PSU layak	%					94,55	169	178,76	BS
		Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	%					92	61,50	63,35	C
		Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	%					78,34	75,65	79,32	C
30	Meningkatnya kualitas tata ruang dan bangunan	Presentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	%	21,42	100%	100	B	28,56	100	100	BS
		Presentase bangunan gedung sesuai standar	%	100	100	100	B	100	100	100	B
31	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Angka korban bencana	Angka	70	100	100	B	40	96	100	BS
32	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai		55,17	88,98	CC	67	60	89,70	B
		Nilai EKPPD	Nilai		2,55		B	2,9500	2,5481	87,93	B
33	Meningkatnya integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah	Indeks manajemen resiko	Indeks	Level 2	Level 1	50	C	Level 3			
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai					81	69,90	81	B
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks					70	85	100	BS
34	Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas keuangan pemerintah daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	B	WTP	WTP	100	B
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks					65	67,36	103,61	BS
35	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	65	96,23	148	BS	75			
36	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah berbasis teknologi informasi	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks					2,6	2,17	83	B
		Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks					68	25	36	K
37	Meningkatnya keberdayaan masarakat desa	Indeks desa membangun	Indeks	0,6599	0,6360	98,38	B	0,6731	0,6431	94,2	B
38	Meningkatnya keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Presentase PMKS yang berdaya	%	18	-	-	-	100	480	480	BS
39	Meningkatnya transformasi budaya	Presentase penurunan biaya sosial	%	10	20	200	BS	15	7,37	49,13	C
		Presentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	55	35	63,63	C	70	76,35	109	BS
40	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Angka Konflik Sosial	%	9	9	100	B	7	5	71,42	C

Dari tabel diatas, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ngada berdasarkan kategori capaian kinerja pada dasarnya sebagian besar indikator menunjukkan progres realisasi yang positif dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 43,90% dan tahun 2024 sebesar 87,92%, mengalami peningkatan sebesar 44,02%.

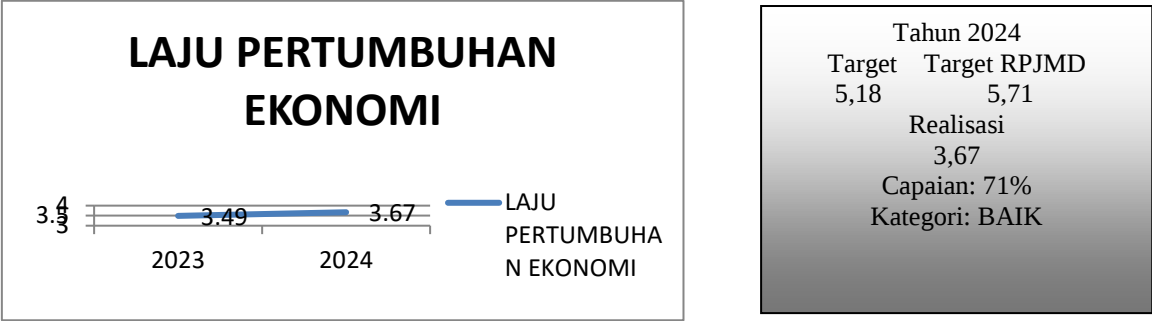


Tujuan ke-1

Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian daerah yang ditandai dengan bertambahnya produksi barang dan jasa, output per kapita, dan perubahan pada struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan daya saing suatu daerah di tingkat nasional. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini mendorong pemerataan pendapatan, sehingga memacu proses pembangunan ekonomi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi



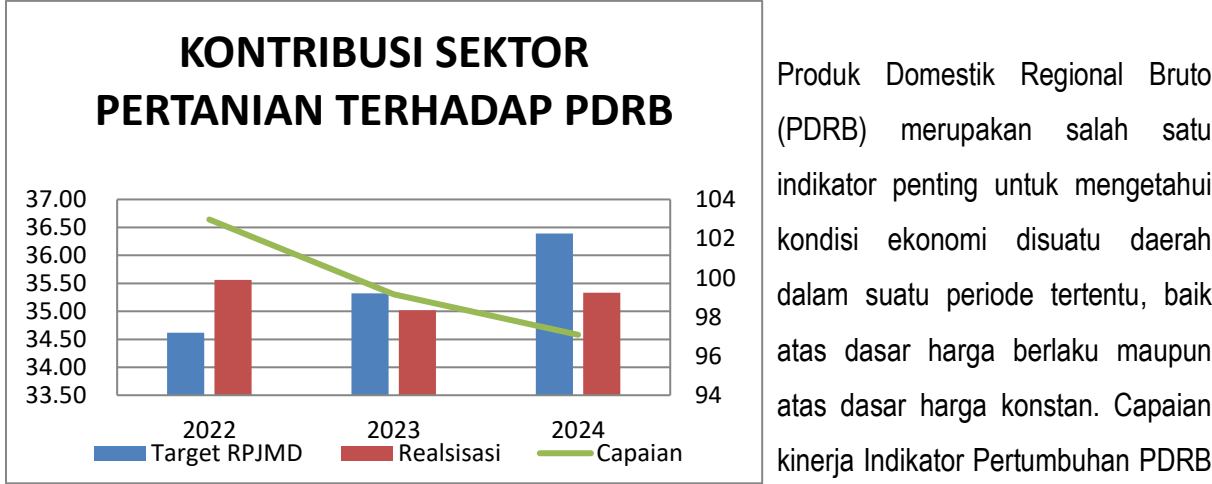
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngada pada tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Ngada sebesar 3,67 dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 5,18. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,49 dan terjadi peningkatan sebesar 18% sehingga menjadi 3,67.

SASARAN 1:

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian

Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian. Karena semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat. Peran sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Ngada adalah sebagai sektor penghasil bahan pangan, sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lainnya dan sebagai salah satu penghasil sumber pendapatan daerah.

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB





Sektor Pertanian di Kabupaten Ngada tahun 2024 sebesar 97,08% dengan predikat baik. Capaian ini didapat dari dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 dan target untuk 2024 sebesar 36,39% dan terealisasi sebesar 35,33%. Hal ini didukung dengan berbagai program kegiatan diantaranya:

- 1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- 2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan.
- 3. Program Peningkatan Kualitas Produk Tanaman Pangan dan Horti.

SASARAN 2:

Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian

Sektor perikanan mempunyai peranan penting dalam menunjang perkembangan perekonomian daerah khususnya keuntungan nyata yang dirasakan oleh masyarakat, sebagai sumber lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga sebagai sumber pangan hewan yang bernilai gizi. Pembangunan sektor perikanan pada saat ini diarahkan untuk peningkatan kontribusi subsektor perikanan dalam menunjang terciptanya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh. Selanjutnya, pembangunan sektor perikanan bertujuan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian yang mendukung, sekaligus pengembangan pembangunan desa dan meningkatkan taraf hidup pengusaha ikan.

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB



Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Capaian kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan di Kabupaten Ngada

Tahun 2024 dapat dilihat dari prosentase peningkatan PDRB sektor Perikanan. Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tahun 2024, terjadi peningkatan PDRB pada sektor perikanan. Dimana target awal sebesar 35,35% ada peningkatan realisasi 35,91% sehingga pencapaian kinerja sektor perikanan baik sekali dengan nilai 102%

Pada tahun 2024, sektor Perikanan Kabupaten Ngada untuk capaian prosentase PDRB sektor perikanan berkat adanya dukungan program dan kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah melalui tagline “Tante Nela Paris” antara lain :

- 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



SASARAN 3

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Realisasi penanaman modal atau realisasi investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu di Kota Bajawa. Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan sarana pendukung penanaman modal, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan meningkatkan jumlah penanaman modal. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan menekan kemiskinan sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Persentase Peningkatan Realiasi PMDN



Penanaman modal dalam negeri merupakan sebuah bentuk entetitas bisnis yang paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. PMDN dianggap memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi pilihan utama bagi para investor asing yang ingin mengembangkan bisnis tertutup terhadap kepemilikan

asing. Beberapa karakteristik dari PMDN antara lain bisa menjalankan hingga 3 lini bisnis modal minimal yang digunanakan untuk SIUP diatas Rp 50 juta, bisa menjadi sponsor KITAS, memiliki minimal 2 pemegang saham (perseroan perseorangan atau badan hukum), memiliki struktur perusahaan minimal dua orang (komisioner dan direktur).

Tahun 2024, terjadi penurunan realisasi PMDN. Dimana target awal sebesar 4,02% ada realisasi 2,03%. Sehingga pencapaian kinerja sebesar 50,49% dengan predikat cukup. Hal ini disebabkan oleh:

1. Keterbatasan sumber daya manusia
2. Sarana dan prasarana yang masih perlu terus ditingkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya
3. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh pada pencapaian target kinerja lembaga/instansi.

Adapun program yang menunjang pencapaian kinerja yaitu:

1. Program pengendalian penanaman modal dengan 2 kegiatan
2. Program pelayanan penanaman modal dengan 1 kegiatan.



Persentase Peningkatan Realiasi PMA



PMA adalah sebuah cara untuk pembentukan modal bisnis yang ditujukan kepada investor asing sebelum seorang investor asing memutuskan untuk mendaftarkan PT PMA nya di Indonesia. PMA memiliki beberapa karakteristik antara

lain berbentuk perseroan terbatas (PT) memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti perusahaan domestik, beroperasi pada satu area bidang yang spesifik, memiliki dua minimal pemegang saham (perseorangan atau badan hukum, memiliki struktur perusahaan minimal dua orang (komisioner dan direktur), memiliki rencana investasi minimal Rp10 miliar, modal yang disetor minimal sebesar Rp 2,5 miliar, dan dapat mensponsori karyawan WNA.

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, tidak terjadi peningkatan realisasi PMA. Dimana target awal sebesar 0,56% ada realisasi 0 sehingga pencapaian kinerja 0 dengan predikat kurang. Hal ini disebabkan oleh:

1. Keterbatasan sumber daya manusia
2. Sarana dan prasarana yang masih perlu terus ditingkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya
3. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh pada pencapaian target kinerja lembaga/instansi

Adapun program yang menunjang pencapaian kinerja yaitu:

1. Program pengendalian penanaman modal dengan 2 kegiatan
2. Program pelayanan penanaman modal dengan 1 kegiatan.

SASARAN 4

Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian

Sektor pariwisata dapat mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi dan pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Pengembangan pariwisata menstimulus investasi di bidang infrastruktur. Sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pariwisata. Faktor lain yang berpengaruh terhadap permintaan pariwisata di daerah yaitu nilai tukar dan inflasi. Sektor pariwisata menjadi komponen kunci perekonomian adalah di sektor jasa yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. Sektor pariwisata telah berkontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Ngada.



Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB



Sektor pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur termasuk pendapatan mata uang asing menarik investasi nasional. PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga,

pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ekspor neto.

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, terjadi peningkatan realisasi sektor pariwisata. Dimana target awal sebesar 0,88% ada realisasi 0,48% sehingga pencapaian 54,54% dengan predikat cukup.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan penurunan kunjungan wisatawan terhadap pariwisata Kabupaten Ngada adalah:

1. Hal sektor pariwisata baru memasuki fase pemulihan setelah kasus covid-19
2. Rendahnya kesadaran masyarakat menjadikan pariwisata sebagai sumber yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi.
3. Belum optimalnya promosi pariwisata.
4. Belum optimalnya kelembagaan pariwisata.
5. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam memajukan pariwisata.
6. Masih kurangnya sarana pendukung pengembangan pariwisata.

SASARAN 5

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian

Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal dan eksternal. Pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk dapat menguatkan stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan serta menyebar dan pemeratakan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian akan terbuka luas kesempatan dan lapangan kerja serta lebih mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB



Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor



produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, terjadi peningkatan realisasi terhadap PDRB sektor perdagangan. Dimana target awal sebesar 8,12% ada realisasi 8,38% sehingga pencapaian kinerja 103,20% dengan predikat sangat baik.

Keberhasilan sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Ngada tahun 2023 didukung oleh beberapa program diantaranya:

- a. Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- b. Peningkatan sarana distribusi perdagangan.

SASARAN 6

Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian

Sektor industri merupakan penggerak perekonomian suatu negara karena dapat memberikan kesempatan kerja yang luas dan nilai tambah yang besar sehingga mampu menyelesaikan suatu masalah yaitu mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Sektor industri juga memainkan peran penting sebagai penggerak dan penopang utama perekonomian nasional. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor industri merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yaitu sekitar 50%.

Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB



PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhannya juga tinggi. Salah satu penyumbang PDRB di Kabupaten Ngada adalah sektor industri. Sektor industri

merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, untuk realisasi terhadap PDRB sektor industri, dimana target awal sebesar 1,59% ada realisasi 1,47% sehingga pencapaian kinerja sebesar 92,45% dengan predikat baik.



Keberhasilan sektor perindustrian terhadap PDRB di Kabupaten Ngada tahun 2024 didukung oleh beberapa program diantaranya:

- a. Perencanaan dan pembangunan industri
- b. Project bambu nasional di Ngada dimana sudah terbentuknya UPTD Sentra Bambu.

Tujuan ke-2

Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan bertambahnya produksi barang dan jasa, output per kapita, dan perubahan pada struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan daya saing suatu daerah di tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pembangunan daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini mendorong pemerataan pendapatan, sehingga memacu proses pembangunan ekonomi.

Laju Inflasi

SASARAN 1

Meningkatnya Stabilitas Harga Barang dan Jasa

Perekonomian akan berjalan baik apabila ada stabilitas harga barang dan jasa. Stabilitas harga adalah kondisi dimana inflasi dalam kondisi stabil dan rendah. Kestabilan harga membantu mencegah inflasi yang berlebihan bisa mengerus daya beli uang, menurunkan kualitas hidup masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Dimana stabilitas ekonomi adalah tidak adanya fluktuasi berlebihan dalam ekonomi makro. Perekonomian dengan pertumbuhan output yag cukup konstan dan inflasi yang rendah dan stabil akan dianggap stabil secara ekonomi. Kestabilan harga barang dan jasa dan nilai tukar merupakan persyaratan bagi pemulihan ekonomi karena tanpa itu aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor usaha akan terhambat.

Indeks Harga Konsumen



Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Indeks harga konsumen adalah indikator perubahan harga barang atau jasa oleh rumah tangga konsumen sehingga yang di

observasi dalam indeks harga konsumen adalah aneka barang, jasa, perumahan dan makanan.



Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, terjadi peningkatan realisasi indeks harga konsumen. Dimana target awal sebesar 114,32% ada realisasi 117,32%. Sehingga capaian kinerja sebesar 102,5% dengan predikat baik sekali.

SASARAN 2

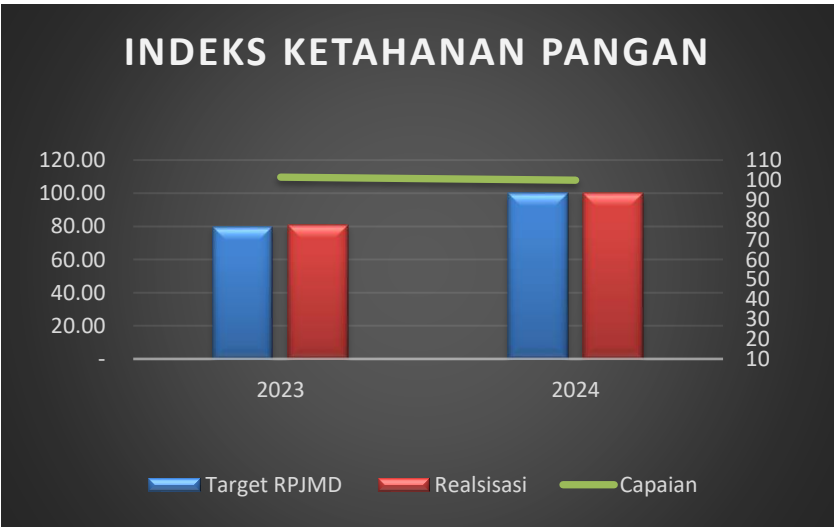
Meningkatnya Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah setiap saat tercermin dari makanan bergizi, aman, bermutu, beragam, bergizi, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Ketahanan pangan di suatu daerah merupakan kebutuhan primer dimana dengan adanya bahan makanan masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pemerintah mengambil peranan aktif dalam mempromosikan kedaulatan pangan dapat menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan, adil, dan berdaya guna yang mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketahanan pangan di Kabupaten Ngada untuk tahun 2024 memiliki capaian kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari:

- 1. peningkatan ketersediaan pangan,
- 2. peningkatan akses distribusi pangan,
- 3. peningkatan konsumsi terhadap pangan yang berkualitas dan
- 4. peningkatan keamanan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan



skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, yang meliputi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan sebagai bahan utama penopang ketahanan pangan.

Indeks ketahanan pangan di Kabupaten Ngada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,01%. Target 100% dan realisasi 99,9%. Capaian kinerja sebesar 99,9% dengan predikat baik. Hal ini didukung oleh beberapa program yaitu:

- 1. Program peningkatan ketersediaan pangan
- 2. Program peningkatan akses distribusi pangan
- 3. Program peningkatan konsumsi terhadap pangan yang berkualitas
- 4. Program peningkatan keamanan pangan.



Tujuan ke-3

Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan

Pemerataan kesejahteraan adalah saat semua orang mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan yang meliputi tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang baik. Pemerataan kesejahteraan rakyat perlu dipercepat dengan memperhatikan pertumbuhan lapangan kerja dan penyerapannya, akses rakyat untuk mendapatkan kesempatan kerja secara paralel harus diikuti dengan upaya meningkatkan ketrampilannya agar dapat bersaing di pasar bebas.

Indeks Gini

SASARAN1

Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap Perekonomian

Koperasi dan UKM memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Koperasi dan UKM merupakan sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Koperasi dan UKM mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi daerah karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Koperasi dan UKM berperan penting dalam perekonomian daerah maupun nasional dimana mampu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat seperti di bidang usaha alat pertanian yang dibutuhkan oleh para petani dimana adanya koperasi dan UKM dapat meringankan beban petani dalam memenuhi alat untuk bertani.

Di Kabupaten Ngada pada tahun 2024 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 adalah 100%.

Persentase Koperasi yang SHU-nya Meningkat

SHU merupakan sisa hasil usaha atau keuntungan bersih yang di dapat oleh koperasi dan keuntungan



tersbut akan dibagikan ke berbagai pos salah satunya adalah para anggota koperasi tersebut. Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, untuk prosentase Koperasi yang SHU meningkat dimana target awal sebesar 2% ada realisasi 2%. Sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat

sangat baik.

Hal ini didukung oleh program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan 1 kegiatan.



Persentase Peningkatan Kelas Usaha Kecil ke Menengah

Usaha Kecil Menengah adalah jenis bisnis yang dijalankan dalam skala kecil hingga menengah. Untuk



di Kabupaten Ngada jenis usaha kecil menengah seperti jenis komoditi atau barang yang ada pada usaha yang dijualnya tidak tetap dan bisa berganti sewaktu-waktu serta tempat menjalankan usahanya tidak tetap dan berpindah-pindah. Pada tahun 2024, ada 12.210 UMKM yang ada di

Kabupaten Ngada dan dari UMKM yang ada sebanyak 160 UMKM di Kabupaten Ngada telah mengalami peningkatan dari usaha kecil ke usaha menengah.

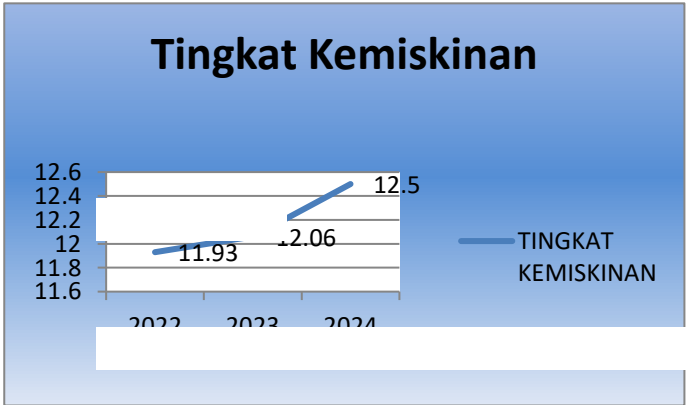
Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, untuk prosentase kelas usaha kecil ke menengah meningkat dimana target awal sebesar 6,3% ada realisasi 6,0%. Sehingga capaian kinerja sebesar 95,2% dengan predikat baik. Hal ini didukung oleh program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan 1 kegiatan.

Tujuan ke-4

Menurunnya Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan disebabkanoleh beberapa faktor antara lain upah minimum tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ngada mempunyai kiat-kiat untuk menurunkan tingkat kemiskinan, dengan mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Tingkat Kemiskinan



Tahun 2024	
Target	Target RPJMD
10,51	9,54
Realisasi 12,50	
Capaian: 90,15%	
Kategori: BAIK (B)	



SASARAN 1

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani merupakan kondisi dimana petanidapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Kesejahteraan petani sangat berperan penting bagi perekonomian masyarakat Ngada. Kontribusi petani bagi perekonomian masyarakat Ngada sangat signifikan, dimana pembangunan pertanian tidak saja bertumpu pada peningkatan produksi akan tetapi diarahkan pada perbaikan kualitas produk pertanian oleh petani. Dengan adanya perbaikan kualitas maka peningkatan nilai jual atas komoditi pertanian oleh petani juga bertambah menyebabkan pendapatan petani juga mengalami peningkatan, sehingga kesejahteraan petani dapat terwujud.

Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Dengan melalui



indeks nilai tukar petani pemerintah bisa mengukur rata-rata harga dari barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, sehingga dapat menekan laju inflasi.

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, dimana target awal nilai tukar petani sebesar 115,07%. Realisasi

tidak dapat diukur dikarenakan BPS belum merilis data nilai tukar petani.

SASARAN 2

Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan

Tingkat kesejahteraan nelayan dapat ditentukan dari hasil tangkapan yang didapatkan dari kegiatan perikanan. Tinggi rendahnya hasil tangkapan salah satunya dipengaruhi oleh musim penangkapan yang berbeda. Sistem bagi hasil merupakan cara yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan dalam membagi membagi pendapatannya secara adil sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Banyaknya jumlah hasil tangkapan yang diperoleh akan memengaruhi pendapatan dan tingkat kesejahteraan nelayan. Sektor perikanan juga menjadi salah satu kontribusi terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Ngada yang dilakukan melalui produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap.

Nilai Tukar Nelayan



Nilai tukar nelayan adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan dinyatakan dalam prosentase. Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, dimana target awal hasil tangkap nelayan sebesar 71,75%. Realisasi tidak



dapat diukur dikarenakan BPS belum merilis data nilai tukar nelayan.

Tujuan ke-5

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan harus dijaga dan juga ditingkatkan kualitasnya. Ada beberapa langkah untuk menjaga lingkungan hidup tetap lestari yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah sembarang, menghemat energi, menggunakan prouk daur ulang, menanam pepohonan, dan mengurangi sampah. Apabila lingkungan tidak di jaga maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Akan tetapi jaman sekarang lingkungan mengalami kerusakan, itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas Udara

Kualitas udara merujuk pada kondisi udara di suatu area yang mencakup berbagai parameter fisik,



kimia dan biologis yang mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan. Kualitas udara yang baik atau bersih memiliki ciri-ciri tidak berwarna, tidak berbau, terasa segar dan ringan saat dihirup. Udara adalah sumber kehidupan makhluk hidup di

dunia ini dengan adanya udara manusia atau makhluk hidup lainnya dapat hidup dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Indeks Kualitas Udara

Untuk wilayah Kabupaten Ngada Indeks kualitas udara yang targetnya 83,95 dan realisasi 94,91. Capaian kinerja sebesar 113% dengan predikat baik sekali. Indeks kualitas udara ini masuk dalam kategori sedang (51-100) dimana tingkat mutu udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Hal ini didukung oleh program yaitu:

1. pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dengan 1 kegiatan
2. pengelolaan keanekaragaman hayati dengan 1 kegiatan
3. pengelolaan sampah dengan 2 kegiatan



SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologis. Kualitas



air sangat penting karena dengan menggunakan air bersih kita dapat terhindar dari penyakit, seperti diare, kolera, tifus, cacingan, penyakit kulit hingga keracunan. Untuk itu warga diharapkan wajib menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungannya.

Indeks Kualitas Air

Untuk wilayah Kabupaten Ngada Indeks kualitas air dengan target 52 dan realisasi 61,67. Capaian kinerja sebesar 118,6% dengan predikat baik sekali. Hal ini didukung oleh program yaitu:

1. pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dengan 1 kegiatan
2. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

SASARAN 3

Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan yaitu tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan aktivitas dan perlakuan manusia pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada area tersebut. Indeks kualitas tutupan lahan merupakan alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah serta mempertimbangkan beberapa faktor yaitu tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem dan tingkat degradasi lahan.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan



Indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Ngada dengan target adalah 69,323 dan realisasi 65,3. Capaian kinerja sebesar 94,2% dengan predikat baik. Tutupan lahan ini, terdiri dari Tutupan lahan hutan, belukar, ruang terbuka hijau berupa Hutan Kota dan Taman Kota, Taman Keanekaragaman Hayati. Hal ini didukung oleh program yaitu:



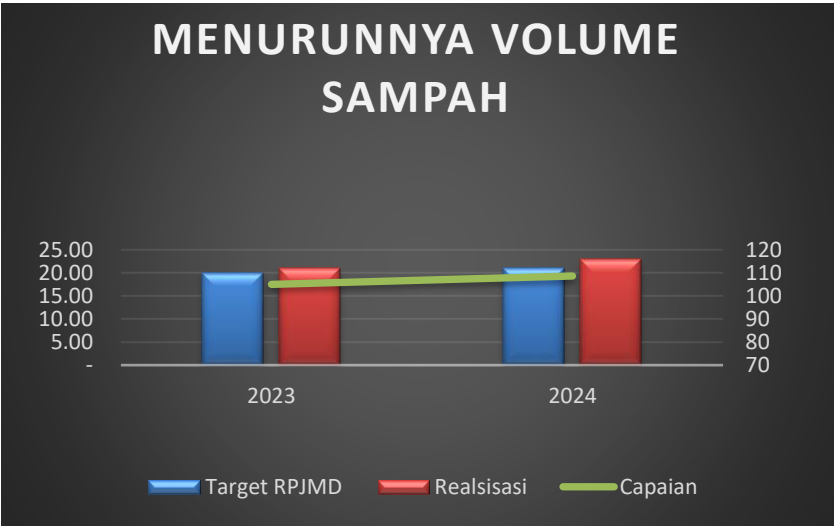
- 1. pengelolaan keanekaragaman hayati dengan 1 kegiatan
- 2. pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dengan 1 kegiatan
- 3. pengelolaan sampah dengan 2 kegiatan

SASARAN 4

Menurunnya Volume Sampah

Sampah merupakan sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah ada dua jenis yaitu sampah padat dan sampah cair. Sampah padat adalah segala macam bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Sedangkan sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan lalu tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

Prosentase Volume Sampah Tertangani



Prosentase volume sampah tertangani di Kabupaten Ngada dengan target pencapaiannya adalah 21% dan realisasi 22,81%. Capaian kinerja sebesar 108,6% dengan predikat baik sekali. Penanganan sampah di Kabupaten Ngada masih sebatas pengangkutan

sampah dari sumber sampah menuju ke TPA melalui program pengelolaan persampahan.

Tujuan ke-6

Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan kesanggupan tiap-tiap karyawan baik di dalam penyelesaian pekerjaannya, mengembangkan dirinya serta mendorong pengembangan diri rekan-rekannya. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan meningkatkan kompetisi dan keahlian SDM tersebut. Di Kabupaten Ngada untuk meningkatkan kompetisi dan keahlian organisasi perangkat daerah melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya aparatur.

Usia Harapan Hidup

Indeks Pembangunan Manusia

SASARAN 1

Semakin Baiknya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini merupakan penjabaran dari misi kedua sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ngada tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.



Hasil pengukuran capaian kinerja menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis ini sebesar 100,7% atau berpredikat baik sekali. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 3 indikator kinerja yang pencapaiannya 100% atau lebih yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Stunting. Realisasi capaian dari 3 indikator tersebut juga sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kabupaten Ngada untuk tahun 2024. Sedangkan indikator angka kematian ibu dan angka kesakitan belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD tahun 2024. Walaupun indikator AKI belum mencapai target yang ditetapkan, namun jika dibandingkan selama 2 tahun terakhir, kasus kematian mengalami penurunan. Pada tahun 2022 terjadi 4 kasus lalu mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 2 kasus kemudian di tahun 2024 meningkat kembali secara signifikan menjadi 4 kasus.

Angka Kematian Ibu (AKI)



Kematian ibu adalah kematian pada ibu akibat proses kehamilan, persalinan dan nifas. Kasus kematian ibu merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah. Kematian ibu merupakan salah satu target

yang termuat dalam tujuan ketiga SDG's yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (penurunan AKI, AKB dan AKABA). Indikator ini mencerminkan risiko yang dihadapi oleh ibu maternal selama masa kehamilan, melahirkan dan nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian indikator AKI sudah mencapai target. Pada tahun 2024, jumlah kasus kematian ibu sebanyak 4 kasus dari 1763 kelahiran hidup (KH). Nilai konversi ke dalam 100.000 KH, menunjukkan realisasi AKI adalah 226,89 per 100.000 KH. Jika dibandingkan dengan target 2024 yaitu 102 per 100.000 KH, maka indikator AKI belum mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian indikatornya sebesar minus 22,4.

Jika dibandingkan selama 2 tahun terakhir, kasus kematian mengalami penurunan. Pada tahun 2022 terjadi 4 kasus dari 1942 KH, lalu mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 2 kasus dari 1929 KH, kemudian di tahun 2024 meningkat kembali secara signifikan menjadi 4 kasus dari 1763 KH. Jika dibandingkan dengan RENSTRA dan RPJMD untuk tahun 2024, maka angka kematian ibu belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 102 per 100.000 KH. Realisasi AKI juga masih melampaui target atau belum mencapai target SDG's yang ditetapkan yaitu 70 per 100.000 KH.



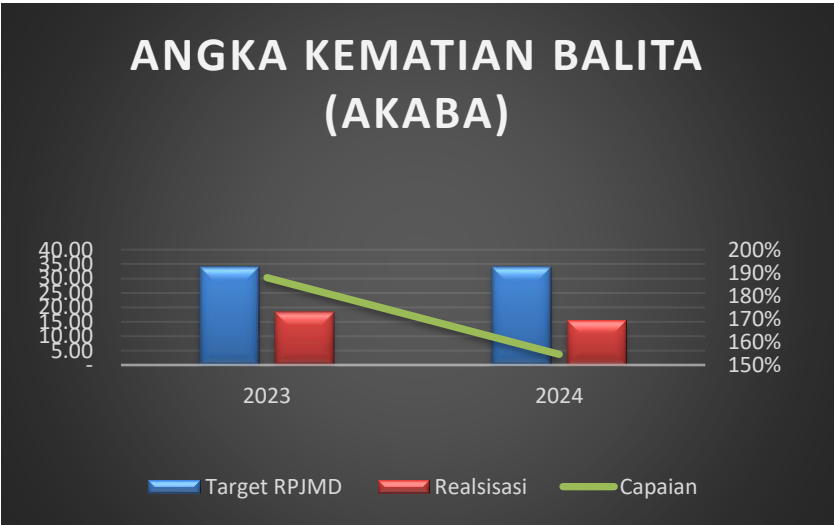
Angka Kematian Bayi (AKB)



Kasus kematian bayi merupakan jumlah bayi yang meninggal antara saat setelah lahir sampai sebelum bayi berusia tepat 1 tahun dan hasil konversi dalam 1.000 hari kelahiran (KH) pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, jumlah kasus kematian bayi adalah 26 kasus dari

1763 KH. Nilai konversi ke dalam 1000 KH, menunjukkan realisasi indikator AKB adalah 14,75 per 1000 KH. Jika dibandingkan dengan target AKB tahun 2024 yaitu 34 per 1000 KH, maka indikator AKB sudah mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian indikatornya sebesar 156,62%. Trend kematian bayi selama 3 tahun terakhir, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah kematian bayi adalah 32 kasus dari 1942 KH, lalu meningkat di tahun 2023 menjadi 33 kasus dari 1929 KH dan mengalami penurunan yang signifikan menjadi 26 kasus dari 1763 KH di tahun 2024. Jika indikator AKB ini dibandingkan dengan target RENSTRA dan RPJMD tahun 2024 yaitu 34 per 1.000 KH, maka AKB sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 14,75 per 1.000 KH. Walaupun demikian, realisasi AKB tahun 2024 masih lebih tinggi atau belum memenuhi target SDG's (Sustainable Development Goal's) yang ditetapkan yaitu 12/1.000 KH

Angka Kematian Balita (AKABA)



Kasus kematian balita merupakan jumlah kematian balita usia 0-59 bulan dan hasil konversi dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada anak umur yang sama. Pada tahun 2024, jumlah kasus kematian balita adalah 34 kasus dari 1763 KH. Nilai konversi ke dalam 1000 KH,

menunjukkan realisasi indikator AKABA tahun 2024 adalah 15,31 per 1000 KH. Jika dibandingkan dengan target AKABA yaitu 34 per 1000 KH, maka indikator sudah mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian indikatornya sebesar 154,62%. Sebagaimana halnya kematian bayi, kematian balita juga memiliki kecenderungan untuk mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat 34 kasus dari 1942 KH dan mengalami peningkatan di tahun 2023 sebanyak 35 kasus dari 1929 KH dan hanya berkurang 1 kasus di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di dalam RENSTRA dan RPJMD tahun 2024, maka realisasi AKABA sudah mencapai



target yang ditetapkan yaitu 34 per 1000 KH. Realisasi tersebut juga, sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam SDG's (Sustainable Development Goal's) yaitu 25/1.000 KH.

Angka Stunting



Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal dan menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit, sehingga

beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Pada tahun 2024, jumlah kasus balita stunting adalah 965 kasus dari 10.032 balita yang diukur Panjang/tinggi badannya. Jika dikonversikan ke dalam persentase, maka realisasi angka stunting tahun 2024 adalah 9,62%. Jika dibandingkan dengan target yakni 9%, maka angka stunting belum mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai capaian indikatornya sebesar 93,11%.

Pada angka stunting, untuk tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah balita stunting sebanyak 1.027 kasus dari 10.271 balita yang diukur panjang badannya dan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 902 kasus dari 10.715 balita yang diukur panjang/tinggi badannya, tetapi mengalami peningkatan Kembali di tahun 2024 menjadi 965 kasus baru stunting. Jika dibandingkan dengan target RENSTRA dan RPJMD tahun 2024, maka indikator angka stunting belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 9%.

Angka Kesakitan



Angka kesakitan adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sakit karena penyakit tertentu dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka kesakitan atau morbiditas, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit menggambarkan kejadian

penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Pada tahun tahun 2024, terdapat 13.485 kasus kesakitan dari 169.445 penduduk. Jika dikonversikan ke dalam persentase, maka realisasi angka kesakitan tahun 2024 adalah 53,44%. Jika dibandingkan dengan target angka kesakitan yakni 5,43%, maka angka kesakitan belum mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai capaian indikatornya sebesar 53,44%. Jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, maka terjadi peningkatan



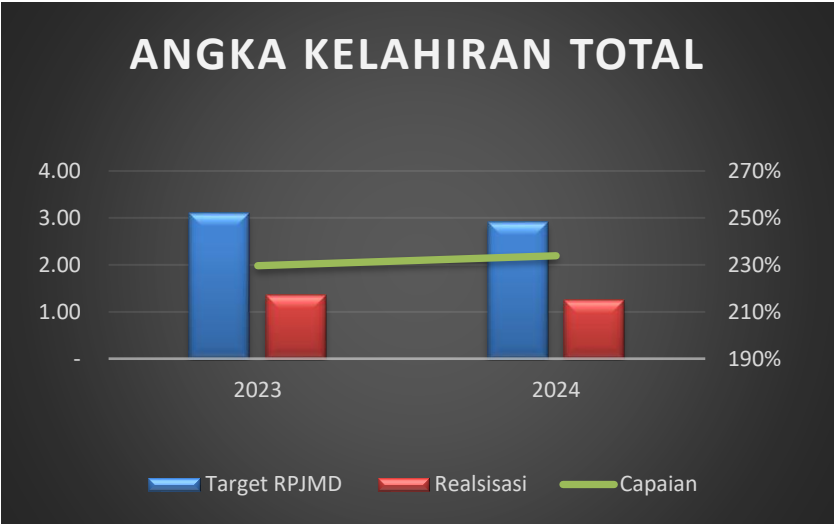
kasus kesakitan yaitu 11.729 kasus di tahun 2022 menjadi 21.050 kasus di tahun 2023, lalu mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 13.485 kasus. Jika dibandingkan dengan target RENSTRA dan RPJMD tahun 2024 yaitu 5,43%, maka angka kesakitan belum mencapai target.

SASARAN 2

Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran prosentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada suatu waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Pertumbuhan penduduk harus ditangani baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, karena apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali akan membawa konsekuensi terhadap sulitnya mencari pekerjaan, mahalnnya harga-harga bahan pangan, biaya pendidikan, kesehatan dan banyaknya permasalahan sosial yang ditimbulkan.Untuk itu, pemerintah membuat suatu program untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk yaitu Program Keluarga Berencana (KB).

Angka Kelahiran Total



Angka kelahiran total adalah banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu. Angka kelahiran total dihitung dengan menjumlahkan jumlah anak

yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang wanita pada setiap usia reproduksi dan kemudian menghitung rata-ratanya.

Angka kelahiran total untuk tahun 2024 dengan target sebesar 2,9 dan realisasi 1,24. Capaian kinerja sebesar 234% dengan predikat baik.

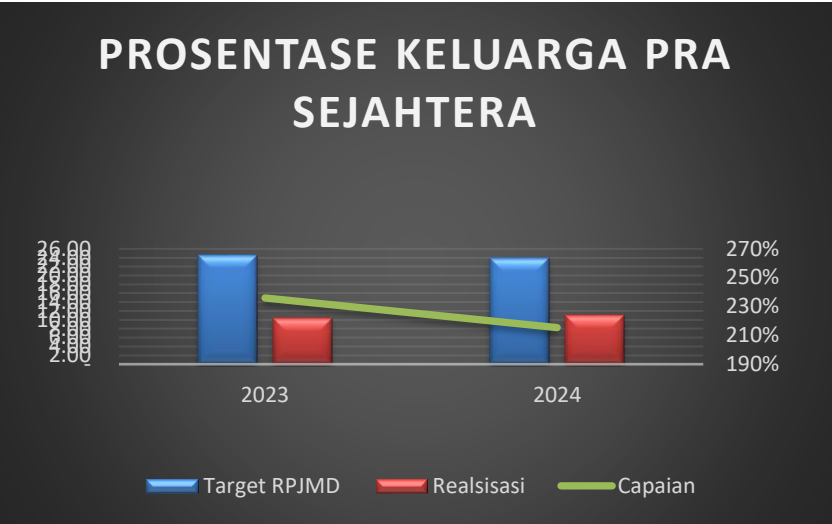
SASARAN 3

Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator keluarga sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga. Keluarga pra sejahtera juga adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.



Prosentase Keluarga Pra Sejahtera



Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, untuk keluarga pra sejahtera dengan target 23,95% dan realisasi 11,12%. Capaian kinerja sebesar 215% dengan predikat baik.

Adapun program yang dilakukan untuk menunjang capaian kinerja adalah:

- 1. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

SASARAN 4

Meningkatnya Akses Pendidikan

Akses pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya untuk memasuki suatu program pendidikan. Untuk itu perlu adanya peningkatan akses pendidikan, dimana hal ini memungkinkan siswa untuk memperoleh pendidikan dari suatu tempat yang jauh tanpa harus menghabiskan banyak biaya dan waktu untuk transportasi. Selain itu, teknologi juga memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih



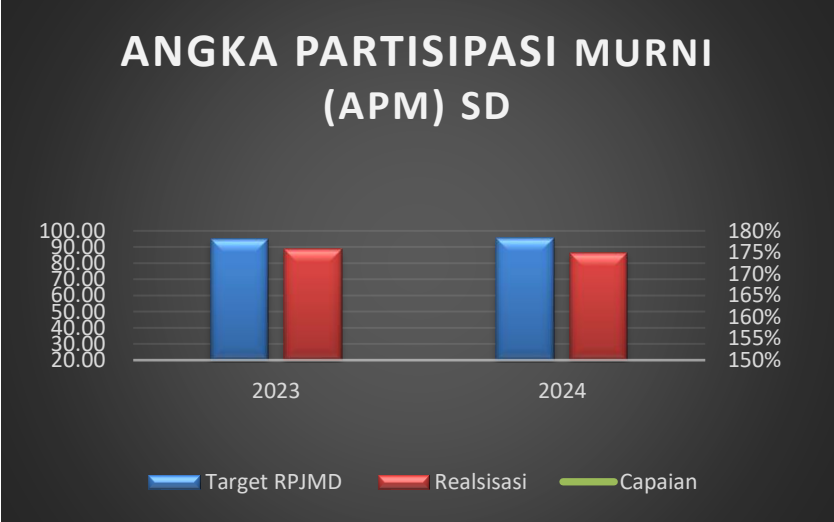
bersekolah di jenjang pendidikan PAUD (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (usia 3-6 tahun).

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada untuk indeks Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 53,02 dari target yang ditetapkan yaitu 35. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 151 dengan predikat baik. Jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dimana target tahun 2023 yaitu 32,33 dan realisasinya sebesar 55,04.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD



Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.



Tahun 2024 di Kabupaten Ngada untuk indeks Angka Partisipasi Murni (APM) SD sebesar 86,51 dari target yang ditetapkan yaitu 95,30. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 91% dengan predikat baik. Jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan Angka

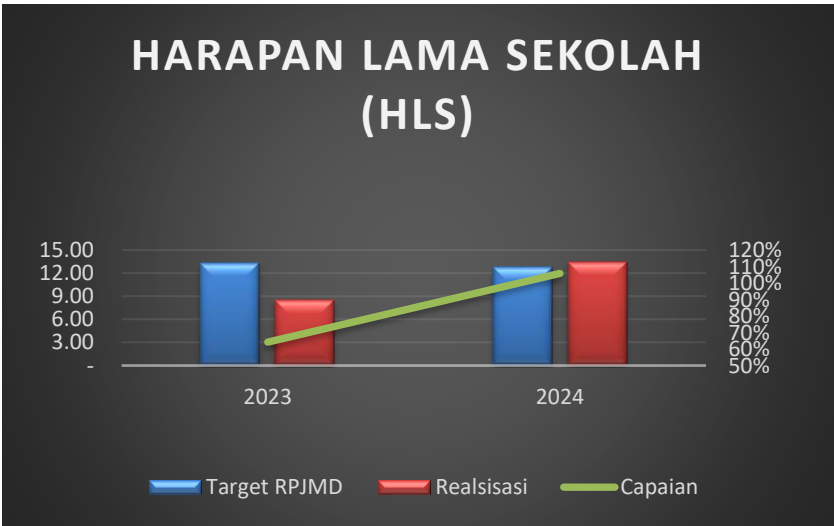
Partisipasi Murni (APM) SD Dimana target tahun 2023 yaitu 94,45 dan realisasinya sebesar 88,42.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat (13-15 tahun).

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada untuk indeks Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sebesar 79,14 dari target yang ditetapkan yaitu 86,30. Jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP. Dimana target tahun 2023 yaitu 85,30 dan realisasinya sebesar 86,88.

Harapan Lama Sekolah (HLS)



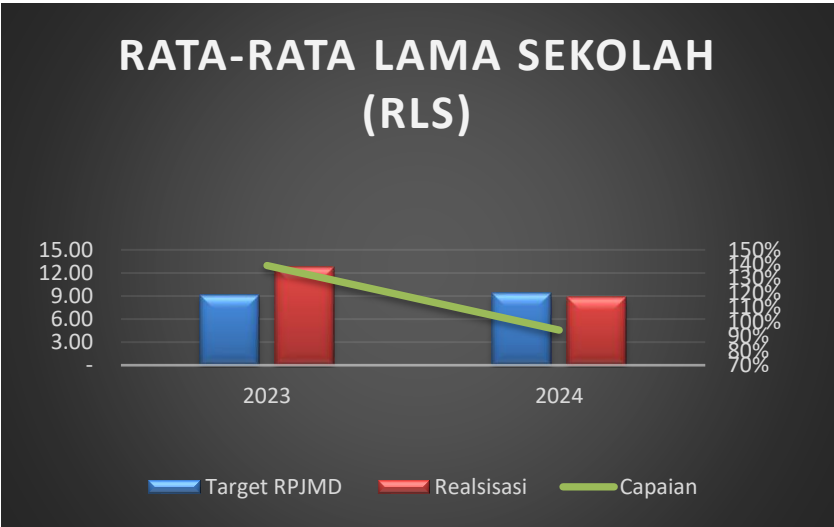
Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai

jenjang.

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada untuk indeks Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,75 dari target yang ditetapkan yaitu 13,5. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 106% dengan predikat baik sekali. Jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimana target tahun 2023 yaitu 13,30 dan realisasinya sebesar 8.54.



Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada untuk indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,83 dari target yang ditetapkan yaitu 9,36. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 94% dengan predikat baik. Jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dimana target tahun 2023 yaitu 9,15 dan realisasinya sebesar 12,73.

SASARAN 5

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang diambil oleh satuan pendidikan guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan. Peningkatan kualitas perlu dilakukan karena pendidikan sebagai sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan adanya pendidikan yang baik dan berkualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia.

Rata-rata Nilai Ujian Siswa



Rata-rata seringkali disebut juga sebagai mean, yaitu jumlah semua nilai yang ada dibagi dengan jumlah total nilai tersebut. Dengan kata lain, cara mencari rata-rata adalah menghitung jumlah dari semua nilai yang ada dalam suatu kumpulan data, dibagi dengan jumlah nilai tersebut.

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada untuk nilai Rata-rata Nilai Ujian Siswa sebesar 72,76 dari target yang ditetapkan yaitu 68,00. Jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan Rata-rata Nilai Ujian Siswa. Dimana target tahun 2023 yaitu 65 dan realisasinya sebesar 60. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 107% dengan predikat baik sekali.



Nilai Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



Standar SPMI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. Tahun 2024 di Kabupaten Ngada untuk realisasi nilai

Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebesar 97,21 dari target yang ditetapkan yaitu 73. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 133% dengan predikat baik sekali. Jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan Nilai Standar Penjamin Mutu Internal. Dimana target tahun 2023 yaitu 70,00 dan realisasinya sebesar 75,43.

Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara PAUD



Akreditasi adalah proses menilai suatu lembaga pendidikan apakah layak atau sebaliknya. Kelayakan ini diketahui dengan menilai segala aspek penting yang disediakan lembaga pendidikan tersebut. Lembaga penyelenggara PAUD perlu dilakukan akreditasi dengan tujuan untuk memperoleh

gambaran keadaan kinerja lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada untuk realisasi Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara PAUD sebesar 80,77 dari target yang ditetapkan yaitu 97,27. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 83% dengan predikat baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan. Di mana tahun 2023 yaitu target yang ditetapkan yaitu 95,91 dan realisasinya sebesar 75. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 107,69% dengan predikat baik sekali.

SASARAN 6

Meningkatnya Kualitas dan Layanan Perpustakaan Daerah

Kualitas layanan perpustakaan daerah Kabupaten Ngada belum memenuhi dimensi kualitas pelayanan, karena perpustakaan belum memiliki beberapa kriteria yaitu koleksi yang relevan, aktual



dan akurat, tenaga yang berkualitas dan profesional, sistem pelayanan yang cepat dan tepat dan belum didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Perpustakaan harus selalu dikembangkan dan ditingkatkan agar selalu dapat memberikan kepuasan kepada pemustakanya.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat



Kualitas dan layanan Perpustakaan Daerah dapat dilihat dari indeks pembangunan literasi masyarakat dimana target untuk tahun 2024 yaitu 68 dan realisasinya sebesar 0 (tidak ada nilai) dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah belum melakukan survei IPLM. Namun jumlah

pengunjung yang mengunjungi perpustakaan daerah serta menjadi anggota perputakaan telah mencapai 100%.

SASARAN 7

Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan

Sebagai generasi penerus pembangunan bangsa, peran pemuda sangat penting hal dapat dilakukan sebagai agen perubahan dapat diwujudkan dengan berpartisipasi mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif dan juga memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi. Tanpa adanya peran pemuda sebuah bangsa akan sulit mengalami perubahan.

Peringkat pada Event Olahraga (PORPROV)/ Prosentase Prestasi Olahraga

Prosentase Prestasi Olahraga Kabupaten Ngada untuk tahun 2024 sebesar 0 prestasi dari target



sebesar 2 prestasi. Untuk kegiatan keolahragaan pada event sepak bola Eltari Memorial Cup di Labuan Bajo tidak dilaksanakan. Sedangkan pada event Soeratin Cup 2024 di Kupang, PSN Ngada hanya sampai di 8 besar. Adapun beberapa cabang olahraga dan beberapa atlet yang berprestasi di tahun 2024



antara lain:

1. Cabang Basket
 - a. Juara 1 DEVELOPMENT BASKETBALL LEAGUE (DBL) Turnamen Tingkat SMA Se-NTT Tahun 2024
2. Cabang Volly
 - a. Juara 1 Putri Turnamen SMANET CUP II Tingkat SMA Tahun 2024
 - b. Juara 1 Putri Turnamen Unika CUP I St. Paulus Ruteng Tahun 2024
 - c. Juara 1 Putri Turnamen SMATER CUP Tingkat SMP Tahun 2024
 - d. Juara 1 Putri Turnamen SMAN – GO CUP III Tingkat SMP
3. 5 orang pemain PSN Ngada ikut serta dalam Tim Sepak Bola PON NTT untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024 di Aceh-Sumatere Utara.
 - a. Hieronimus Liko
 - b. Gery Reo
 - c. Dio Sebo
 - d. Yulius Loy
 - e. Asno Riwu

Tingkat/Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Pemuda sebagai agen pembangunan yang mana pemuda memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang termasuk dalam kegiatan ekonomi mandiri. Kabupaten Ngada tahun 2024 memiliki beberapa kelompok pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri baik itu kelompok organisasi rohani maupun kelompok karangtaruna.

Untuk meningkatkan kualitas partisipasi peran aktif pemuda maka dilakukan beberapa kegiatan seperti:

1. Kegiatan paskibraka yang diikuti oleh siswa/i SMA sebanyak 15 orang
2. Kegiatan kewirausahaan pemuda yang diikuti oleh 7 Kelompok
3. Pelatihan pengelolaan dan manajemen organisasi yang diikuti oleh 112 organisasi.

Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan dilakukan kegiatan KONI Daerah.

SASARAN 8

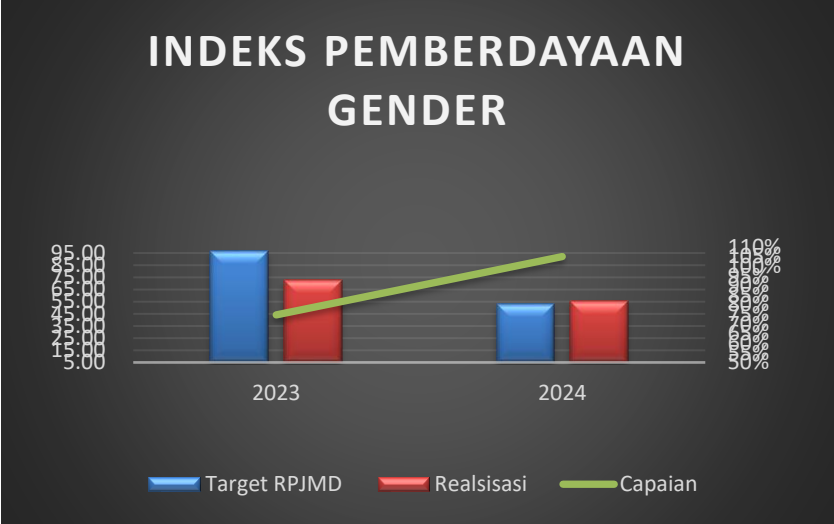
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Partisipasinya dalam Pembangunan

Meningkatnya keberdayaan perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan, yang dilakukan melalui penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga peningkatan pengarusutamaan gender bagi perempuan. Hal ini didukung oleh beberapa kinerja sasaran keberdayaan perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan/IPG dan persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Indeks Pemberdayaan Gender



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan



peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, untuk indeks pemberdayaan gender dengan target 52,77% dan realisasi 55,41%. Capaian kinerja sebesar 105% dengan predikat baik sekali.

SASARAN 9
Meningkatnya Kualitas

Kehidupan Anak

Peningkatan kualitas kehidupan anak yang dilakukan melalui fasilitasi dan advokasi bagi anak terhadap tindak terhadap tindak kekerasan di Kabupaten Ngada, Penilaian Kabupaten Layak Anak dan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Status Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Ngada pada tahun 2024, untuk status kabupaten layak anak dengan target Madya dan realisasi dengan status Madya. Capaian kinerja 100% dengan predikat baik. Untuk status Kabupaten Layak Anak tahun 2024 berstatus Madya dikarenakan untuk tahun 2024 .

Hal ini dilakukan upaya untuk mendukung status Kabupaten Layak Anak diantaranya:

1. Penilaian Kabupaten Layak Anak melalui kegiatan pendataan dan perhitungan Indikator untuk mengukur status Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Ngada dengan perhitungan secara mandiri maka Kabupaten Ngada mendapat score 779,22 dengan status Madya.
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak .Dimana Pemerintah Kabupaten Ngada pada Tahun 2024 menetapkan Perda Ngada Nomor 5/KEP/HK/2024 tanggal 6 Agustus 2024 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
3. Adanya penurunan kekerasan terhadap anak di mana pada tahun 2024 jumlah pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan mencapai 22 orang dan telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Ngada.

Tujuan ke-7

Menurunnya Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan disebabkanoleh beberapa faktor antara lain upah minimum tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ngada mempunyai kiat-kiat



untuk menurunkan tingkat kemiskinan, dengan mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Angka Kemiskinan

SASARAN 1

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan karena jika masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan maka kebutuhan hidup tidak akan terpenuhi sehingga dapat digolongkan sebagai masyarakat miskin. Pengangguran dapat diturunkan apabila tingginya kualitas sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan dan juga motivasi hidup yang tinggi dan pandangan dalam hubungan kekeluargaan, serta adanya lapangan pekerjaan yang memadai.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja. Pengangguran terbuka



juga adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan kegiatan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan masih mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulia bekerja. Tahun 2023 di Kabupaten Ngada, tingkat pengangguran terbuka dengan target awal sebesar 3,48% dan realisasi 2,51%. Capaian kinerja sebesar 138,64% dengan predikat baik sekali.

Tujuan ke-8

Meningkatnya Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi

Keselamatan transportasi merupakan sesuatu yang mutlak dalam transportasi agar setiap orang terhindar dari resiko kecelakaan selama perjalanan yang disebabkan oleh manusia, alat angkut moda transportasi dan lingkungannya. Hal ini berhubungan langsung dengan transportasi yang digunakan. Transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan berarti transportasi yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah keselamatan dan keberlanjutan, baik oleh regulator, operator, maupun pengguna transportasi. Perkembangan transportasi dipengaruhi faktor ekonomi, geografis, kebijakan politik, kemiliteran, teknologi, kompetisi, dan urbanisasi.

Rata-rata Kecepatan tempuh Antar Kawasan-Kawasan Prioritas

SASARAN 1



Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan

Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai di Kabupaten Ngada yakni melalui peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan mengoptimalkan pemeliharaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan sehingga menambah fasilitas keselamatan jalan.

Target panjang jalan pada ruas prioritas dalam kondisi baik di Kabupaten Ngada tahun 2024 adalah 10 km dan realisasinya sepanjang 19,838 km dari target akhir Renstra 2026 adalah 50 km atau capaiannya sebesar 20%. Adapun target 2024 untuk rehabilitasi jalan adalah 20 km dengan realisasi capaian 1,53 km atau 7,67%. Sedangkan realisasi capaian untuk pembangunan jembatan tahun 2024 ada 1 unit dari target 1 unit maka capaian prosentase indikator jumlah jembatan yang terbangun tahun 2024 adalah 100%.

Persentase Panjang Jalan pada Ruas Prioritas dalam Kondisi Baik

Panjang jalan Kabupaten Ngada dalam kondisi baik sampai pada tahun 2024 sepanjang 763,34 km.



Realiasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2024 sepanjang 19,84 km sehingga total panjang jalan kabupaten yang ditangani dalam kondisi baik 785,67 km.

SASARAN 2

Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

Sarana dan prasarana perhubungan sangat penting untuk mendukung kelancaran transportasi di suatu wilayah. Sarana dan prasarana yang digunakan juga harus memiliki kualitas yang baik untuk menjamin keselamatan penggunaan sarana perhubungan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan guna mendukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas, keterjangkauan dalam pelayanan, dan perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah.

Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik



Sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Ngada secara umum realisasinya belum tercapai dalam kondisi baik secara menyeluruh, akan tetapi secara bertahap telah berusaha seoptimal mungkin untuk memenuhi target. Untuk tahun 2024 ini target yang ditetapkan sebesar 70,68% dan terealisasi sebesar 39,41%. Pencapaian sebesar



56% dengan predikat cukup. Untuk memenuhi target diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan terminal memadai dengan meningkatkan ketersediaan terminal dan mengoptimalkan pemeliharaan dan rehabilitasi terminal.
- b. Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai yakni melalui peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan mengoptimalkan pemeliharaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan.

SASARAN 3

Meningkatnya Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi Umum

Tahun 2024 telah dicapai 100% dengan meningkatkan ketersediaan moda transportasi darat memadai dan mengoptimalkan pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan. Dimana tersedianya jalur trayek angkutan umum dan standar tarif angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Ngada.

Kabupaten Ngada pada tahun 2024 demi meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi Umum telah melakukan pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan melalui proses peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Uji KIR, akreditasi Unit Pelayanan Uji KIR dan peningkatan kelayakan angkutan orang dan barang sehingga memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, truk, pick up, dan angkutan umum guna mendukung kelestarian lingkungan dari pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dalam rangka guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat untuk menarik minat masyarakat menggunakan fasilitas angkutan umum yang telah disediakan. Sehingga pemerintah Kabupaten Ngada terus berupaya memperbaiki kinerja pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Persentase Peningkatan Angkutan Umum



Setelah ditetapkannya tarif angkutan umum yang standar tarif trayek angkutan dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2015, menyebabkan berkurangnya peminat atau pengguna angkutan umum. Lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi sehingga perlu adanya kajian untuk mencari solusi angkutan umum

serta peningkatan peran serta masyarakat dan peran pemerintah dalam penyediaan sarana transportasi atau angkutan umum.

Faktor-faktor yang mendukung peningkatan angkutan umum adalah:



1. Penyediaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang berdampak pada keselamatan angkutan darat.
2. Penertiban lalu lintas yang ditunjang dengan adanya traffic light dan rambu lalu lintas.
3. Semua jalan kabupaten sudah dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas baik guardrail, marka jalan, maupun deliniator.
4. Penertiban jaringan trayek angkutan umum dengan menerbitkan Perbub mengenai tarif trayek angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Ngada.
5. Meningkatkan inovasi program dan kegiatan serta berupaya mengoptimalkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat.

Tujuan ke-9

Meningkatnya Kelayakhunian

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan pemukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mulai dari air bersih, penerangan, sanitasi saluran, pembuangan limbah serta aman bagi aktivitas penghuniannya.

Rasio Pemukiman Kumuh

SASARAN 1

Meningkatnya Akses Pemukiman Layak Huni

Pada tahun 2024 di Kabupaten Ngada terpasang 1151 SR (sambungan rumah) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih 60 liter per orang per hari minimal belum tercapai. Dari target 65,44% atau 300 SR dan realisasi 387,67% maka jumlah KK terlayani 1151 KK atau sebanding dengan jumlah penduduk terlayani 5.755 jiwa dari 170.115 jiwa penduduk sesuai dengan data jumlah Ngada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada.

Di samping itu, di Kabupaten Ngada tetap melakukan pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk kawasan permukiman dan perumahan dengan PSU layak. Ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk presentase kawasan permukiman dan perumahan dengan PSU layak sebesar 94,55% dan realisasi yang di peroleh yaitu 169% dengan capaian sebesar 178,76%.

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akses permukiman layak huni yang menggunakan air minum dari sumber air yang memenuhi syarat kesehatan. Di Kabupaten Ngada, memiliki beberapa sumber mata air yang dilindungi sehingga cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk presentase



rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan yaitu 92% dan realisasi 61,50% dengan capaian sebesar 63,35%.

Selain akses terhadap air bersih, kegiatan sanitasi juga sangat dibutuhkan guna menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sanitasi dilakukan dengan mengawasi faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan yaitu 78,34% dan realisasi 75,65% dengan capaian sebesar 79,32%.

Rasio Rumah Layak Huni



Pada tahun 2024 di Kabupaten Ngada ada pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya yang bersumber dari dana DAU dan DID untuk 2 kecamatan yaitu Kecamatan Golewa 12 unit dan Kecamatan Bajawa 13

unit. Dari target 50 unit realisasinya sebanyak 25 unit dengan realisasi prosentasenya 50%. Sehingga prosentase capaian target pembangunan rumah tidak layak huni sebesar 81,1% dari 44.388 unit dari jumlah rumah secara keseluruhan. Untuk rasio rumah layak huni pencapaian dari target adalah 24,35% (50 unit) realisasi 50% (25 unit) maka prosentase pencapaian target adalah 36,04%.

SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Bangunan

Untuk tahun 2024 di Kabupaten Ngada, kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten/Kota telah memasuki tahapan penetapan RTRW Kabupaten Ngada. Dokumen RTRW menjadi dasar pengelolaan kegiatan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah kabupaten/kota dan pembentukan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) melalui penyusunan RDTR skala perkotaan di Wilayah Kabupaten Ngada.

Prosentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan



Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Untuk Kabupaten Ngada



tahun 2024 prosentase pencapaian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan dari target sebesar 28,56% dan realisasi 100% dengan predikat baik

SASARAN 3

Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, dan perencanaan penanggulangan. Bisa dikatakan mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. Di tahun 2024, terdapat 3.720 jiwa yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana di 6 kecamatan melalui kegiatan:

- 1. Penyusunan kajian resiko bencana
- 2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Angka Korban Bencana

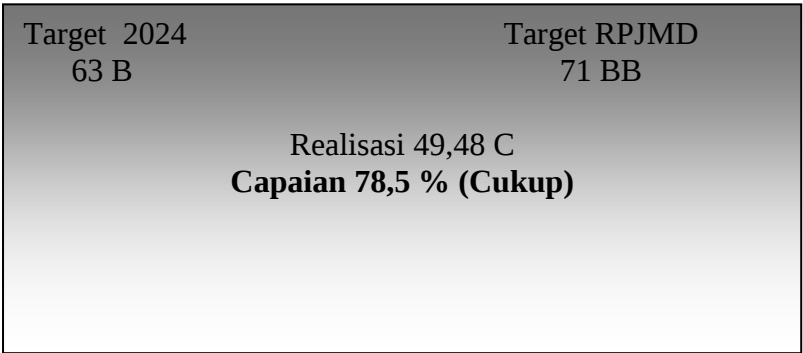


Korban adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban meliputi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita, dan mengungsi. Di Kabupaten Ngada pada tahun 2024,

terdapat 24 kepala keluarga yang terdampak bencana dengan jumlah korban jiwa sebanyak 96 jiwa yang terdampak. Dari jumlah korban bencana tersebut, terdapat 96 jiwa yang dapat ditangani dengan memberikan bantuan langsung. Target untuk tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi 100% dengan predikat **sangat baik**.

TUJUAN ke- 10

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK



Capaian mengenai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB adalah 49,48 dengan kategori 'C'. Hasil evauasi tahun 2024



“tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Capaian kinerja Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik tahun 2024 yang direpresentasikan dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,5% dengan kategori capaian kinerja **Cukup**. Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Ngada terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memenuhi rekomendasi yang disarankan dari Kementerian PANRB.

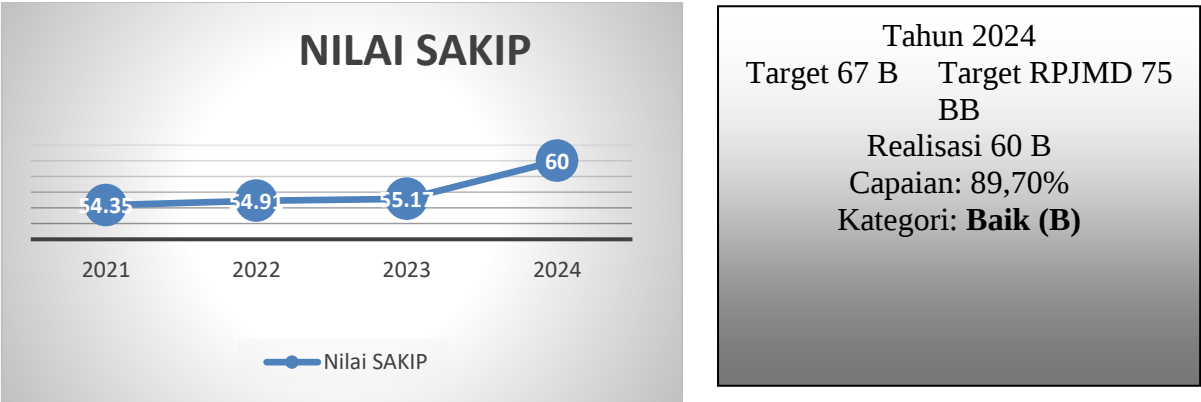
Dalam pencapaian tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di dukung oleh sasaran strategis:

SASARAN 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah ditetapkan dua indikator yakni: pertama, Nilai SAKIP, kedua Nilai EKPPD.

1. Nilai SAKIP



- Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pada tahun 2024 SAKIP Pemerintah Kabupaten Ngada memperoleh predikat **B** dengan Nilai SAKIP **60**, jika dilihat capaian kinerjanya sebesar **89,70%** dengan capaian kinerja **Baik**. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Ngada belum memenuhi target yang ditetapkan dari 62 namun sudah mencapai predikat B. Hal ini dapat dijelaskan karena Pemerintah Kabupaten Ngada baru menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Namun Pemerintah Kabupaten Ngada tetap berkomitmen untuk tetap meningkatkan kualitas pelaporan SAKIP Pemerintah Kabupaten Ngada hingga level Perangkat Daerah dengan salah satunya berkoordinasi dengan tim evaluator dari Kementerian PANRB.
- Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023,Dan 2022.**

Berdasarkan pada indikator hasil evaluasi SAKIP / tingkat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 60 dan capaian kinerja sebesar 89,70% atau masuk dalam kategori Baik. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi kinerja sebesar 55,17, dan capaian kinerja sebesar 88,98% atau masuk kategori Baik. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 mengalami kenaikan. Kemudian, pada tahun 2022



realisasi kinerja sebesar 54,91 dan capaian kinerja sebesar 87,32% atau masuk dalam kategori Baik. Sehingga dapat dilihat dari segi perbandingan pada realisasi kinerja dan capaian kinerja pada indikator hasil evaluasi SAKIP / tingkat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dibandingkan dengan adanya kenaikan sehingga program tersebut dapat dilihat keberhasilan dari pelaksanaannya. Namun dari segi capaian Nilai SAKIP yang dicapai dengan target yang ditetapkan hingga tahun 2024 belum mencapai target yang diharapkan.

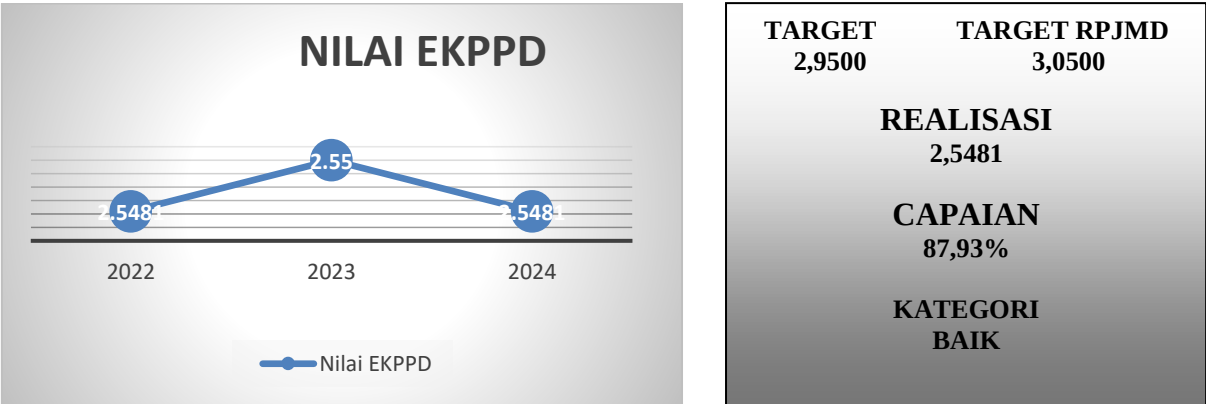
Adapun langkah-langkah percepatan dan konsistensi SAKIP Pemerintah Kabupaten Ngada antara lain:

1. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan secara konsisten terhadap pelaporan dokumen LKJIP baik dari level Pemerintah daerah hingga level Perangkat Daerah bersama-sama Tim Evaluator dari Kemenpan RB dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Biro Organisasi.
2. Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP dan sinergitas birokrasi serta meminimalisir ego sektoral yaitu bekerja secara tim.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja serta melakukan inovasi – inovasi, baik inovasi percepatan pelayanan publik maupun inovasi peningkatan kinerja pegawai.
4. Terus menerus melakukan pembinaan kepada seluruh SKPD, khususnya SKPD Kecamatan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga diharapkan SKPD Kecamatan secara bertahap lebih paham terhadap SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP; Menyempurnakan keterkaitan / integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang dikembangkan secara mandiri.



Foto kegiatan bimtek dan coaching klinik tahun 2024

2. Nilai EKPPD



Nilai EKPPD merupakan hasil evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

- Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023



Capaian Nilai EKPPD untuk Tahun 2024 belum realis dari Kementerian Dalam Negeri, dan realisasi yang ditetapkan merupakan nilai sangat sementara. Nilai EKPPD Pemerintah Kabupaten Ngada memperoleh nilai 2,5481 dari target yang ditetapkan sebesar 2,9000 atau Capaian Kinerjanya sebesar 87,93% atau dengan Kategori **BAIK**. Pencapaian Kinerja terhadap Nilai EKPPD dapat dijelaskan karena target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ngada yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah belum dilaksanakan secara maksimal.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, Dan 2022.**

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: pada tahun 2024 Nilai EKPPD Pemerintah Kabupaten Ngada 2,5481 dan jika dibandingkan dengan capaian Nilai EKPPD pada tahun 2023 sebesar 2,5500 atau mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Namun jika dibandingkan dengan masing-masing target Nilai EKPPD dari tahun 2022 hingga tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Ngada belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belum adanya kesadaran dan komitmen bersama para Pimpinan Perangkat Daerah dalam pelaporan LPPD terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- Dalam hal penyampaian pelaporan LPPD untuk masing-masing perangkat daerah belum maksimal dalam pemenuhan data dukung yang disampaikan.
- Terhadap capaian target Standar Pelayanan Minimum (SPM) masih banyak perangkat daerah yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan Nilai EKPPD antara lain:

1. Memberikan pendampingan kepada masing-masing Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaporan dokumen LPPD.
2. Pimpinan Perangkat Daerah bersama Bupati berkomitmen dalam pemenuhan data dukung dan pencapaian realisasi dari target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
3. Bersinergi bersama-sama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Inspektorat untuk memastikan keselarasan dalam perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

SASARAN 2

Meningkatnya integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah

Dalam mencapai Sasaran Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah, dapat ditempuh melalui penetapan melalui 3 (tiga) indikator, yaitu Indeks Manajemen Risiko, Nilai Survei Penilaian Integritas, dan Indeks Profesionalitas ASN. Ada pun capaian untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Indeks Manajemen Risiko merupakan salah satu



unsur penilaian terhadap Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Capaian Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP.

TARGET	RPJMD	TARGET
Level 2		Level 3
REALISASI		
Level 1**		
CAPAIAN		
50%		
KATEGORI		
CUKUP		
** Nilai Sangat Sementara		

Berdasarkan pada indikator Indeks Manajemen Risiko pada tahun 2023 terdapat realisasi kinerja sebesar **Level 1** dari target yang ditetapkan sebesar **Level 2**. Jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar **Level 3**. Hal tersebut jika dibandingkan antara realisasi kinerja pada indikator Indeks Manajemen Risiko tahun 2023 dengan target kinerja pada tahun 2026 terlihat mampu mencapai pada target kinerja tahun 2026. Hal tersebut perlu ditingkatkan melalui program/kegiatan penunjang indikator.

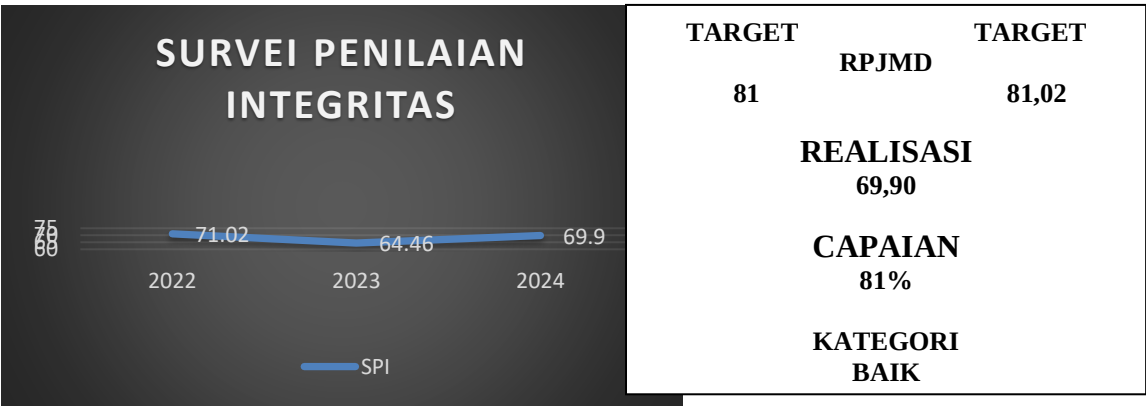
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan capaian kinerja Indeks Manajemen Risiko, antara lain:

1. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance and consulting* di Pemerintah Kabupaten Ngada masih perlu ditingkatkan;
2. Kebijakan pengawasn internal yang ada masih perlu ditingkatkan implementasinya melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi di seluruh perangkat daerah untuk mengetahui tingkat kepatuhan atas kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa catatan diatas yang menjadi hambatan capaian kinerja Indeks Manajemen Risiko, Pemerintah Kabupaten Ngada akan segera melakukan penyempurnaan dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan internal pemerintah oleh APIP sebagai *quality assurance and consulting* melalui peningkatan kapabilitas APIP.
2. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengawasan internal yang telah ada kepada seluruh individu.

Nilai Survei Penilaian Integritas



Berdasarkan hasil capaian untuk indikator Nilai Survei Penilaian Integritas pada tahun 2024 dengan hasil 69,90 dari target yang ditetapkan sebesar 81 atau capaian kinerjanya sebesar 81% dengan kategori **BAIK**. Jika dibandingkan dengan target RPJMD terhadap capaian Indikator Nilai Survei Penilaian Integritas sebesar 81,02, Pemerintah Kabupaten masih memungkinkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.



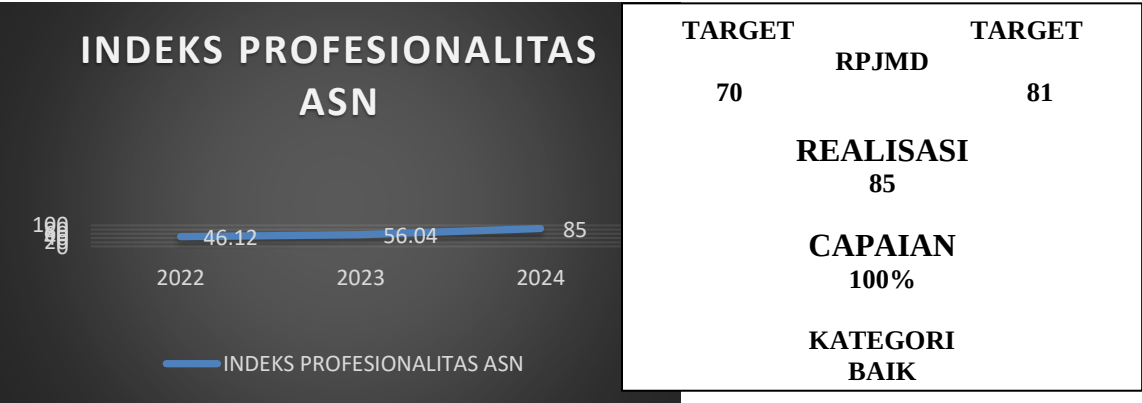
Berdasarkan capaian indikator Nilai Survei Penilaian Integritas yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Risiko korupsi ditemukan hampir di seluruh instansi peserta SPI.
2. Risiko korupsi yang paling banyak ditemukan adalah :
 - Sekitar 15% responden kalangan pegawai meyakini bahwa risiko penerimaan gratifikasi/suap ditemui di banyak instansi peserta SPI. Hal ini juga diyakini oleh 5% dari responden eksternal dan 18% responden eksper.
 - Risiko adanya perdagangan pengaruh (trading in influence) ditemukan di banyak instansi peserta SPI. Sekitar 1 dari 4 responden pegawai berpendapat keberadaan risiko trading in influence, baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan pemerintah.
 - Berdasarkan 29% responden pegawai, permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa juga ditemukan di berbagai instansi peserta SPI baik dalam bentuk nepotisme hingga gratifikasi dalam proses pengadaan.
 - Satu dari 2 pegawai menyatakan pemanfaatan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi pun masih terjadi di hampir seluruh instansi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh 29% responden eksper.
 - Sembilan persen dari responden pegawai juga menilai bahwa penyalahgunaan anggaran dalam perjalanan dinas masih terjadi di berbagai instansi peserta SPI.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar seluruh K/L/PD peserta SPI dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:

1. Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdaya guna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Kedua, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat sesuai kebutuhan instansi. Selain itu, perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/ mutasi tersebut.

Indeks Profesionalitas ASN





Indikator indeks profesionalitas ASN Kabupaten Ngada berdasarkan progres nilai pengukuran indeks profesionalitas ASN instansi wilayah kerja Kantor Regional X Tahun 2024 sebesar 85 dengan kategori **TINGGI**.

Berdasarkan pada indikator indeks profesionalitas ASN pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 56,04 nilai indeks dan capaian kinerja sebesar 86,21% atau masuk dalam kategori kategori baik. Sedangkan jika dibandingkan dengan perolehan pada tahun 2021 Indeks Profesionalitas ASN mendapat 46,89 dari target yang ditetapkan sebesar 55, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 85,25% dengan kategori BAIK, pada tahun 2022 capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan realisasi 46,12 dari target yang ditetapkan sebesar 60, sehingga capaian kinerjanya 76,86% dengan kategori BAIK. Sehingga program tersebut dapat dilihat keberhasilan dari pelaksanaannya. Berdasarkan pada indikator indeks profesionalitas ASN terdapat realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 85 nilai indeks. Sedangkan pada target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 81. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada indikator indeks profesionalitas ASN tahun 2024 sudah melampaui dari target kinerja pada tahun 2026.

SASARAN 3

Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas keuangan pemerintah daerah

Dalam mencapai Sasaran Meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas keuangan pemerintah daerah, dapat ditempuh melalui penetapan melalui 2 (dua) indikator, yaitu Opini BPK dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada pun capaian untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Opini BPK



Berdasarkan pada target kinerja tahun 2024 pada indikator opini BPK dengan opini WTP.I Lebih lanjut terkait dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan opini WTP. Sehingga jika dibandingkan antara target dan realisasi dapat terlampaui dengan maksimal dengan adanya

ketercapaian antara target dengan realisasi pada indikator tersebut.

Berdasarkan pada indikator opini BPK pada tahun 2024 realisasi kinerja sebesar WTP dan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk dalam kategori BAIK. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar WTP, dan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori BAIK. Jika dilihat dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 telah mecapai keberhasilan yang dibuktikan dengan dapat dipertahankannya hal tersebut. Berdasarkan pada indikator opini BPK terdapat realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar WTP. Sedangkan pada target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar WTP. Hal tersebut jika dibandingkan antara realisasi kinerja pada indikator opini BPK tahun



2024 dengan target kinerja pada tahun 2026 terlihat mampu mencapai pada target kinerja tahun 2026. Hal tersebut perlu dipertahankan melalui program/kegiatan penunjang indikator.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada target kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan relisasi capaian 67,36 dari target yang ditetapkan sebesar 65. Dari hasil capaian realisasi tersebut dapat dicapai capaian kinerja sebesar 103,61% dengan predikat **PERLU PERBAIKAN**. Berdasarkan pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 67,36 jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 80 terlihat mampu mencapai pada target kinerja tahun 2026. Hal tersebut perlu dipertahankan melalui program/kegiatan penunjang indikator.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diukur berdasarkan enam dimensi yaitu:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot 20
3. Transparansi pengelolaan keuangan dengan bobot 15
4. Penyerapan anggaran dengan bobot 20
5. Kondisi keuangan daerah dengan bobot 15
6. Opini BPK atas LKPD dengan bobot 15

SASARAN 4

Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas

Dalam mencapai sasaran Meningkatkan pelayanan Publik Yang Berkualitas, dicapai melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan pada target kinerja tahun 2023 pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan relisasi capaian 96,23 dari target yang ditetapkan sebesar 65. Dari hasil capaian realisasi tersebut dapat dicapai capaian kinerja sebesar 148,04% dengan predikat **SANGAT BAIK**. Sehingga jika dibandingkan antara target dan realisasi dapat terlampaui dengan maksimal dengan adanya ketercapaian antara target dengan realisasi pada indikator tersebut.

Jika dibandingkan dengan target dan realisasi capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 60 dengan realisasi capaian sebesar 95,06 atau capaian kinerja sebesar 158,43% dengan kategori SANGAT BAIK

Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 167,16% dengan kategori SANGAT BAIK dari target yang ditetapkan sebesar 50 dengan realisasi sebesar 83,58. .

Berdasarkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 96,23. Sedangkan pada target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 82. Hal tersebut jika dibandingkan antara realisasi kinerja pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 dengan target kinerja pada tahun 2026 sudah mencapai target RPJMD. Hal tersebut perlu dipertahankan melalui program/kegiatan penunjang indikator.

Ketercapaian kinerja terhadap indikator Indeks Kepuasan Masyarakat melalui beberapa hal, yaitu:



- Pengintegrasian semua jenis pelayanan public melalui Mal Pelayanan Publik yang di launching dan diresmikan oleh Bapak Abdulah Azwar Anas selaku Menteri PAN RB pada tanggal 21 November 2023 bertempat di Gedung Bidakara Jakarta.

SASARAN 5

Meningkatnya transparansi pemerintah daerah berbasis teknologi informasi

Dalam mencapai sasaran Meningkatkan Transparansi Pemerintah Daerah Berbasis Teknologi Informasi, dicapai melalui indicator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan pada target kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja Indeks Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan relisasi capaian 2,17 dari target yang ditetapkan sebesar 2,6. Dari hasil capaian realisasi tersebut dapat dicapai capaian kinerja sebesar 83% dengan predikat **BAIK**. Sehingga jika dibandingkan antara target dan realisasi tidak dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya ketercapaian antara target dengan realisasi pada indikator tersebut.

Jika dibandingkan dengan target dan realisasi capaian indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 2,4 dengan realisasi capaian sebesar 1,36 atau capaian kinerja sebesar 56,66% dengan kategori CUKUP, pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 59,54% dengan kategori CUKUP dari target yang ditetapkan sebsar 2,2 dengan realisasi sebesar 1,31.

Berdasarkan pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 2,17. Sedangkan pada target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 3. Hal tersebut jika dibandingkan antara realisasi kinerja pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2023 dengan target kinerja pada tahun 2026 masih jauh dari target RPJMD. Hal tersebut perlu ditingkatkan lebih intens melalui program/kegiatan penunjang indikator.

Permasalahan yang ada dalam mencapai kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu:

- a. Kerusakan pada Pemancar FM LPPL RSPD Ngada;
- b. Sarana dan Prasarana TIK yang belum memadai;
- c. Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada, terhadap pemanfaatan hosting dan colocation;
- d. Belum terintegrasinya aplikasi dalam satu server center; e. Keterbatasan anggaran untuk mendukung BIMTEK/DIKLAT TIK bagi Aparatur.

Upaya atau tindak lanjut dalam mencapai target kinerja indicator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu:

- a. Menyiapkan Sarana dan Prasarana TIK;
- b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi yang berkesinambungan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada dan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hosting dan colocation;



- c. Perlunya pengembangan dan pemanfaatan data center yang lebih optimal serta menempatkan server dan aplikasinya di Dinas Kominfo Kabupaten Ngada akan terjaga keamanan data informasi karena dikelola secara langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada, tanpa ada campur tangan pihak ketiga;
- d. Dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan BIMTEK/DIKLAT.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan pada target kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan relisasi capaian 25% dari target yang ditetapkan sebesar 68%. Dari hasil capaian realisasi tersebut dapat dicapai capaian kinerja sebesar 36% dengan predikat **KURANG**. Sehingga jika dibandingkan antara target dan realisasi tidak dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya ketercapaian antara target dengan realisasi pada indikator tersebut.

Jika dibandingkan dengan target dan realisasi capaian indicator Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 65% dengan realisasi capaian sebesar 25% atau capaian kinerja sebesar 38% dengan kategori KURANG.

Berdasarkan pada indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik terdapat realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 25%. Sedangkan pada target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 75%. Hal tersebut jika dibandingkan antara realisasi kinerja pada indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 dengan target kinerja pada tahun 2026 masih jauh dari target RPJMD. Hal tersebut perlu ditingkatkan lebih intens melalui program/kegiatan penunjang indikator.

Tujuan 11

Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dengan tujuannya adalah keadaan yang ingin dicapai baik dari suatu perubahan sosial yang mana menjadi masyarakat yang lebih berdaya, memiliki kekuasaan juga pengetahuan dan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik lagi.

SASARAN 1

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan keberdayaan masyarakat desa yang dilakukan melalui Penataan Admnistrasi Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Ngada. Namun terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target sasaran ini tidak dialokasikan anggaran, namun sesuai tugas dan pokok dan fungsi, maka program dan kegiatan tetap dilaksanakan.

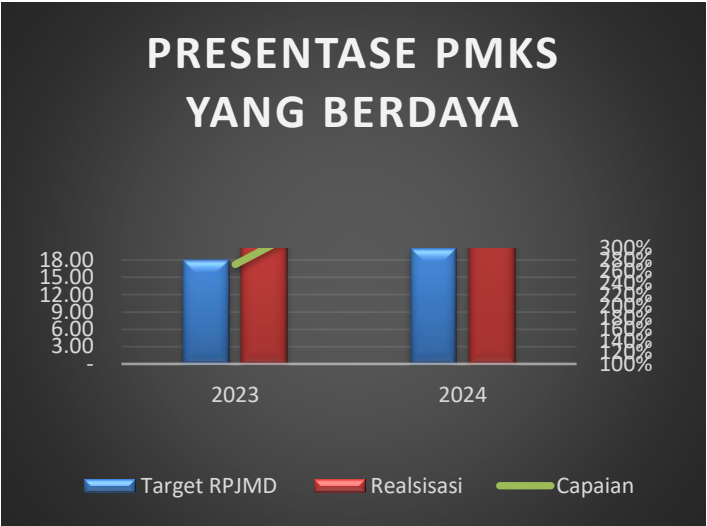


Indeks Desa Membangun Kabupaten Ngada pada tahun 2024, untuk indeks desa membangun dari target 0,6731 dan realisasi 0,6341. Capaian kinerja sebesar 94,21% dengan predikat baik. Jika



dibandingkan dengan tahun 2023 indeks desa membangun Kabupaten Ngada mengalami penurunan dari 0,6360 menjadi 0,6341 di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang merupakan kombinasi faktyor internal seperti pengelolaan dana desa yang tidak efisien, kinerja pembangunan yang tidak optimal, dan juga faktor eksternal seperti bencana alam dan adanya perubahan metodologi perubahan IDM.

Presentase PMKS yang Berdaya



Pada tahun 2024 direncanakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdaya dengan penanganan dan sentuhan bantuan Pemerintah dengan target sebanyak 3.138 orang. Dari target tersebut, capaian PMKS yang diberdaya sebanyak 15.064 orang PMKS atau 480%. Dapat dijelaskan bahwa kondisi PMKS yang tertangani pada akhir periode dalam dokumen

perencanaan RPJMD tahun 2021-2026 adalah 21.783 (mencapai lebih dari 100%).

SASARAN 2

Meningkatnya Transformasi Budaya

Transformasi adalah perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali. transformasi dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik.Transformasi budaya adalah suatu bentuk perubahan yang secara perlahan ditanamkan pada diri seseorang, sebuah kebiasaan yang selanjutnya akan melekat dan akan digunakan dan dibiasakan secara berulang-ulang dan terus-menerus.

Persentase Penurunan Biaya Sosial



Biaya sosial merupakan biaya yang ditujukan untuk keberpihakan kepada masyarakat dengan berbagai elemennya. Biaya sosial berupa pembiayaan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Di Kabupaten Ngada, untuk biaya sosial sangat melekat pada masyarakat di desa.

Kebanyakan masyarakat banyak mengeluarkan biaya untuk acara atau upacara adat istiadat yang berlaku didesa tersebut. Misalnya, untuk upacara kematian dan pernikahan. Untuk penyembelihan hewan, biasanya masyarakat menyembelih hewan sebanyak pihak keluarga yang hadir pada acara



tersebut. Contoh: pihak keluarga yang datang pada upacara kematian sebanyak 50 kepala keluarga dengan masing-masing membawa hewan kurban (babi) sebanyak 50 ekor. Maka 50 ekor tersebut disembelih untuk memberi makan pihak keluarga yang datang. Sehingga terjadi pemborosan. Untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, maka pemerintah desa menetapkan Peraturan Desa tentang pembatasan pengeluaran biaya sosial, seperti dari 50 ekor babi yang dibawa, maka tidak semua hewan tersebut disembelih tetapi dilihat dengan kehadiran keluarga. Sehingga, hanya sebagian saja yang disembelih. Penegasan terkait pembawaan jumlah hewan saat upacara adat, hal ini diprioritaskan kepada keluarga dekat saja sedangkan yang lain cukup membawa dana sesuai kemampuan.

Di Kabupaten Ngada Prosentase penurunan biaya sosial pada tahun 2024 dengan target sebesar 15% dan realisasi sebesar 7,37% sehingga Capaian kinerja sebesar 49,13% dengan predikat kurang. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 prosentase penurunan biaya sosial Kabupaten Ngada tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu sebesar 7,37%.

Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan

Budaya benda adalah kebudayaan yang mengacu pada semua karya cipta perorangan ataupun



masyarakat yang nyata dan konkrit. Tak benda adalah kebudayaan yang mengacu pada semua karya cipta perorangan ataupun masyarakat yang berbentuk abstrak, diwariskan dari generasi ke generasi.

Tahun 2024 di Kabupaten Ngada, target budaya benda dan tak benda yang dilestarikan yaitu 70 dan realisasi 76,35. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 109% dengan predikat sangat baik. Jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan Persentase budaya benda tak benda yang dilestarikan dimana target tahun 2023 yaitu 55 dan realisasinya sebesar 50.

SASARAN 3

Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat

Hidup rukun di masyarakat tentu akan membuat hidup tenang karena hidup berdampingan dengan masyarakat secara harmonis. Kerukunan akan membuat masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Hidup rukun berrati hidup bersama tanpa adanya masalah atau konflik sosial.

Angka Konflik Sosial



Proses yang dilakukan secara bertahap dari pihak pemerintah yang paling rendah yakni dari tingkat desa/kelurahan sampai ke pihak pemerintah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Ngada selalu memediasi dengan meminta pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan secara damai terkhususnya

masalah/konflik yang berlatar belakang sosial budaya dan bila perlu menyangkut adat istiadat untuk kembali ke rumah adat dengan tuntunan kearifan lokal.

Kabupaten Ngada pada tahun 2024, untuk angka konflik sosial dengan target 7 dan realisasi 5 dengan capaian kinerja sebesar 71,42% dengan predikat cukup.

2.3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Sehubungan dengan hal itu diatas, maka Pemerintah Kabupaten Ngada menetapkan peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan dan belanja daerah, meliputi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024
2. Peraturan Bupati Ngada Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 31)

Rincian APBD Tahun 2024 meliputi Pendapatan daerah, Belanja daerah, Surplus/Defisit dan Pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 1.057.310.114.081,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 1.068.374.876.962,00 atau bertambah 1,05% sebesar Rp. 11.064.762.881,00



- b. Belanja Daerah
Belanja daerah kabupaten ngada tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.037.685.145.464,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 1.102.334.439.499,00 atau bertambah 6,7% sebesar 64.649.294.035,00
- c. Surplus dan Defisit
Surplus /Defisit adalah selisih antara jumlah pendapatan daerah dengan jumlah belanja daerah. Pada tahun 2024 kabupaten ngada mengalami defisit sebesar Rp. 53.584.531.154,00
- d. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah kabupaten ngada tahun 2024 sebesar Rp. 19.624.968.617,00 sebelum perubahan dan sebesar Rp.33.959.562.537,00 setelah perubahan atau bertambah 273% sebesar Rp. 53.584.531.154,00

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Ringkasan Perubahan APBD
Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.291.511.500,00	50.517.408.005,00	-2.774.103.495,00	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	10.301.100.000,00	10.297.500.000,00	-3.600.000,00	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	11.521.711.500,00	10.420.168.005,00	-1.101.543.495,00	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.050.000.000,00	2.400.000.000,00	-1.650.000.000	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.418.700.000,00	27.399.740.000,00	-18.960.000,00	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	997.729.442.305,00	1.010.376.912.305,00	12.647.470.000,00	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	983.869.853.000,00	994.867.323.000,00	10.997.470.000,00	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.859.589.305,00	15.509.589.305,00	1.650.000.000,00	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.287.060.276,00	7.478.456.652,00	1.191.396.376,00	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.287.060.276,00	7.478.456.652,00	1.191.396.376,00	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.067.310.114.081,00	1.068.374.876.962,00	11.064.762.881,00	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	593.405.271.252,00	642.036.670.442,00	48.631.399.189,00	0 %
5.1.01	Belanja Pegawai	377.604.515.271,00	390.891.201.179,68	13.286.685.908,68	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.685.291.212,00	216.482.113.079,32	32.796.821.867,32	0 %
5.1.03	Belanja Bunga	1.716.406.250,00	1.716.406.250,00	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	28.696.058.520,00	30.916.949.933,00	2.220.891.413,00	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.703.000.000,00	2.030.000.000,00	327.000.000,00	0 %
5.2	BELANJA MODAL	238.350.756.211,00	246.329.070.637,00	7.978.314.426,00	0 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00	493.108.808,00	143.108.808,00	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.570.263.591,00	41.721.394.821,00	3.151.131.230,00	0 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.218.457.320,00	128.952.236.846,00	1.733.779.526,00	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.986.057.000,00	64.894.341.512,00	2.908.284.512,00	0 %



5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.841.510.000,00	6.868.020.350,00	26.510.350,00	0 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.384.468.300,00	3.399.968.300,00	15.500.000,00	0%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000,00	6.581.781.972,00	2.081.781.972,00	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	6.581.781.972,00	2.081.781.972,00	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	201.429.118.000,00	207.386.916.448,00	5.957.798.448,00	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.111.486.800,00	1.111.486.800,00	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	200.317.631.200,00	206.275.429.648,00	5.957.798.448,00	0 %
	Jumlah Belanja	1.037.685.145.464,00	1.102.334.439.499,00	64.649.294.035,00	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	19.624.968.617,00	-33.959.562.537,00	-53.584.531.154,00	0 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.672.810.716,00	80.257.341.870,04	53.584.531.154,04	0 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.672.810.716,00	80.257.341.870,04	53.584.531.154,04	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	26.672.810.716,00	80.257.341.870,04	53.584.531.154,04	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.297.779.333,00	46.297.779.333,04	0,04	0 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan			0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.797.779.333,00	3.797.779.333,00	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	42.500.000.000,00	42.500.000.000,04	0,04	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	46.297.779.333,00	46.297.779.333,00	0,04	0 %
	Pembiayaan Netto	-19.624.968.617,00	33.959.562.537,00	53.584.531.154,00	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Dengan demikian total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024 sebesar 1.102.334.439.499,00 realisasi sebesar Rp. 1.102.334.439.499,00 atau 100%



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan, pemerintah memberikan pembiayaan, sarana, prasarana dan sumber daya manusia. Pihak yang ditugaskan berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pembantuan kepada pihak yang menugaskan.

Adapun dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk tugas pembantuan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk tugas pembantuan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan termasuk dasar hukum, tujuan dan ruang lingkup tugas pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Ngada;

Tugas Pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada berasal dari :

1. Kementerian Sosial;

Tugas pembantuan yang berasal dari Kementerian Sosial diarahkan untuk melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfer (CCT) atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Tujuan Program Keluarga Harapan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, layanan kesehatan dan layanan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sosial;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan Kesenjangan;
- e. Memanfaatkan produk dan jasa keuangan inklusif/keuangan digital secara formal kepada KPM.



Sasaran PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam DTKS/ID Semesta yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan berada di wilayah PKH Akses sebagai berikut:

- a. Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar;
- b. Daerah tertinggal/terpencil, geografis sulit dan cuaca ekstrim
- c. Wilayah perbatasan antar negara.

Kriteria Penerima Bantuan Sosial PKH Non Tunai, komponen penerima Bantuan Sosial PKH Non Tunai sebagai berikut:

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - 1) Ibu hamil/menyusui; dan
 - 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun (anak usia dini).
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - 1) Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat;
 - 2) Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat;
 - 3) Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat; dan
 - 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dalam keluarga PKH;
 - 2) Penyandang disabilitas berat dalam keluarga PKH.

Bantuan sosial PKH terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga
 1. Reguler : Rp. 550.000,- / keluarga / tahun
 2. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun
- B. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH
 1. Ibu hamil : Rp. 3.000.000,-
 2. Anak usia dini : Rp. 3.000.000,-
 3. SD : Rp. 900.000,-
 4. SMP : Rp. 1.500.000,-
 5. SMA : Rp. 2.000.000,-
 6. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
 7. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I.

Hak Peserta Hak peserta PKH adalah:

1. Menerima bantuan uang tunai.
2. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.



3. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Penerima Program Kewajiban penerima program adalah:

Persyaratan Kesehatan Bagi Peserta PKH :

❖ Kategori Persyaratan Kesehatan Anak

- 1) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 (tiga) kali
- 2) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan
- 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus
- 4) Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

❖ Kategori Persyaratan Kesehatan Ibu hamil dan ibu nifas

- 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- 2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.
- 3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.

Persyaratan Pendidikan Bagi Peserta PKH :

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan Pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
- 3) Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan /terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).
- 4) Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.



- 5) Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur.

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai meliputi:

1. **Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH ;**
Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
2. **Sosialisasi dan edukasi:**
Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
3. **Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;**
Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial. Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat harus dilakukan aktivasi.
Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH.
4. **Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;**
Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH itu dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan dengan memindahbukukan /pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.
5. **Penarikan dana Bantuan Sosial PKH;**
Penarikan dana Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.
6. **Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH;** dan
Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH itu dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bank Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
7. **Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.**
Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH. Kemudian **pelaporan** penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan secara berkala oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial.

2. Kementerian Pertanian

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian diberikan untuk mengelola beberapa program dan kegiatan antara lain :



- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier;
- b. Pembangunan Irigasi Perpompaaan Besar;
- c. Pembangunan Irigasi Perpipaan;

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan;

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten;

Tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Ngada diberikan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian dengan penjelasan sebagai berikut :

3.1.1 Target Kinerja;

Kementerian Sosial :

Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran sebesar Rp. 32.750.156.595 dengan target sasaran kepada 8.018 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 14.441 jiwa dengan rincian komponen yakni Komponen PKH pendidikan SD 2.463 jiwa dengan indeks Rp.900.000/tahun/jiwa, komponen pendidikan SMP 2.376 jiwa dengan indeks Rp.1.500.000/bulan/jiwa, komponen pendidikan SMA 3.188 jiwa dengan indeks Rp.2.000.000/tahun/jiwa, komponen kesehatan Ibu Hamil 2 jiwa dengan indeks Rp.3.000.000/tahun/jiwa, komponen kesehatan Balita atau usia dini 133 jiwa dengan indeks Rp.3.000.000/tahun/jiwa, komponen Lanjut usia 5.308 jiwa dengan indeks Rp.2.400.000/tahun/jiwa dan komponen Penyandang Disabilitas 971 jiwa dengan indeks Rp.2.400.000/tahun/jiwa.

Kementerian Pertanian

a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier;

- Kelompok Tani Bina Tani Desa Sadha 1 Kecamatan Golewa Selatan (Pokir DPR-RI/RJIT)
Dana : 75.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- P3A Wae Bula Tani Bina Tani Desa Piga 1 Kecamatan Soa (Pokir DPR-RI/RJIT)
Dana : 75.000.000
Luas Lahan : 10 Ha

b. Pembangunan Irigasi Perpompaaan Besar;

- Kelompok P3A Tiwu Waru Desa Nginamanu (Pokir DPR-RI/Perpompaaan)
Dana : 112.800.000
Luas Lahan: 10 Ha
- Kelompok P3A Wela Muzi Desa Ngara I Kecamatan Riung Barat (Pokir DPR-RI/Perpompaaan)
Dana : 112.800.000
Luas Lahan: 10 Ha
- Kelompok P3A Malamara II Desa Libunioa Kecamatan Soa (Reguler)
Dana : 112.800.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Bedibua Desa Sangadeto Kecamatan Golewa (Reguler)
Dana : 112.800.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Nio Doa Desa Were V Kecamatan Golewa Selatan (Reguler)
Dana : 112.800.000
Luas Lahan: 10 Ha



- Kelompok P3A Mukutabi Desa Seso Kecamatan Soa (Reguler)
Dana : 112.800.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok Tani Puun Keo Desa Benteng Tawa Kecamatan Riung Barat (Reguler)
Dana : 112.800.000
Luas Lahan: 10 Ha
- Kelompok P3A Lagurea Desa Seso Kecamatan Soa (Anggaran Biaya Tambahan/Perpompaan)
Dana : 112.800.000
Luas Lahan: 10 Ha
- Kelompok P3A Riwulena 2 Desa Nginamanu Selatan Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpompaan)
Dana : 112.800.000
Luas Lahan: 10 Ha

c. Pembangunan Irigasi Perpipaan;

- Kelompok P3A Tiwubele I desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Tiwubele II desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Tiwubele III desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Tiwubele IV desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Tiwubele V desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Tiwubele VI desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Tiwubele VII desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Tiwubele VIII desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)



- Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Belaleo desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Liang Kao desa Wue Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok P3A Marobhonggo desa Wue Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha
- Kelompok Tani Taranage desa Nirmala Kecamatan Golewa Selatan (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : 94.000.000
Luas Lahan : 10 Ha

3.1.2 Realisasi

Kementerian Sosial

Realisasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebesar Rp. 32.666.131.264 atau sebesar 99,7% dengan capaian terhadap target sasaran KPM sebesar 100% yaitu kepada 8.018 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 14.441 jiwa dengan rincian komponen yakni Komponen PKH pendidikan SD 2.463 jiwa dengan indeks Rp.900.000/tahun/jiwa, komponen pendidikan SMP 2.376 jiwa dengan indeks Rp.1.500.000/bulan/jiwa, komponen pendidikan SMA 3.188 jiwa dengan indeks Rp.2.000.000/tahun/jiwa, komponen kesehatan Ibu Hamil 2 jiwa dengan indeks Rp.3.000.000/tahun/jiwa, komponen kesehatan Balita atau usia dini 133 jiwa dengan indeks Rp.3.000.000/tahun/jiwa, komponen Lanjut usia 5.308 jiwa Rp.2.400.000/tahun/jiwa dan komponen Penyandang Disabilitas 971 jiwa dengan indeks Rp.2.400.000/tahun/jiwa

Kementerian Pertanian

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier;
 - Kelompok Tani Bina Tani Desa Sadha 1 Kecamatan Golewa Selatan (Pokir DPR-RI/RJIT)
Dana : Rp. 75.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
 - P3A Wae Bula Desa Piga 1 Kecamatan Soa (Pokir DPR-RI/RJIT)
Dana : Rp.75.000.000, realisasi 0%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 0%
- b. Pembangunan Irigasi Perpompaan Besar;
 - Kelompok P3A Tiwu Waru Desa Nginamanu (Pokir DPR-RI/Perpompaan)
Dana : Rp.112.800.000, realisasi 100%
Luas Lahan: 10 Ha, realisasi 100%



- Kelompok P3A Wela Muzi Desa Ngara I Kecamatan Riung Barat (Pokir DPR-RI/Perpompaan)
Dana : Rp.112.800.000, realisasi 100%
Luas Lahan: 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Malamara II Desa Libunioa Kecamatan Soa (Reguler)
Dana : Rp.112.800.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Bedibua Desa Sangadeto Kecamatan Golewa (Reguler)
Dana : Rp.112.800.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Nio Doa Desa Were V Kecamatan Golewa Selatan (Reguler)
Dana : Rp.112.800.000, realisasi 100%
Luas Lahan: 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Mukutabi Desa Seso Kecamatan Soa (Reguler)
Dana : Rp.112.800.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok Tani Puun Keo Desa Benteng Tawa Kecamatan Riung Barat (Reguler)
Dana : Rp. 112.800.000, realisasi 100%
Luas Lahan: 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Lagurea Desa Seso Kecamatan Soa (Anggaran Biaya Tambahan/Perpompaan)
Dana : Rp. 112.800.000, realisasi 100%
Luas Lahan: 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Riwulena 2 Desa Nginamanu Selatan Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpompaan)
Dana : Rp. 112.800.000, realisasi 100%
Luas Lahan: 10 Ha, realisasi 100%

c. Pembangunan Irigasi Perpipaan;

- Kelompok P3A Tiwubele I desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp.94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Tiwubele II desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp. 94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Tiwubele III desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp. 94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Tiwubele IV desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp. 94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%



- Kelompok P3A Tiwubele V desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp. 94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Tiwubele VI desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp. 94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Tiwubele VII desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp. 94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Tiwubele VIII desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp.94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Belaleo desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp. 94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Liang Kao desa Wue Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp.94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok P3A Marobhonggo desa Wue Kecamatan Wolomeze (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp.94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha, realisasi 100%
- Kelompok Tani Taranage desa Nirmala Kecamatan Golewa Selatan (Anggaran Biaya Tambahan/Perpipaan)
Dana : Rp.94.000.000, realisasi 100%
Luas Lahan : 10 Ha realisasi 100%

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi i Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Sosial	Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor: 10/3.4/KP.02/1/2024	Program Keluarga Harapan (PKH)	Kabupaten Ngada Tahap I	Dinas Sosial Kab. Ngada	32,750,156,595	32,666,131,264	99.7%	7.629 KPM	100%	
			Tahap I								
			Total KPM : 7.629								
			Jumlah Bantuan : Rp 5.393.732.480	Kecamatan :							
				Aimere		399.933.267	396.683.268	99,2%			
				KPM :580							



				Bajawa		763.166.547	759,966,547	99.6%			
				KPM :1107							
				Bajawa Utara		295,558,268	295,558,268	100.0%			
				KPM :479							
				Golewa		597,958,250	597,658,250	99.9%			
				KPM :781							
				Golewa Barat		266,508,297	262,474,964	98.5%			
				KPM :364							
				Golewa Selatan		627,233,237	624,233,238	99.5%			
				KPM :861							
				Inerie		434,099,955	432,499,955	99.6%			
				KPM :592							
				Jerebuu		372,108,277	372,108,277	100.0%			
				KPM :493							
				Riung		598,008,236	597,858,236	100.0%			
				KPM :889							
				Riung Barat		345,666,600	345,666,600	100.0%			
				KPM :528							
				Soa		426,783,252	426,783,252	100.0%			
				KPM :602							
				Wolomeze		266,708,294	265,108,294	99.4%			
				KPM :353							
			Tahap II Tahun 2024								
			Total KPM : 7.928	Kecamatan							
			Jumlah Bantuan : Rp. 7.305.049.709	Aimere		582,799,975	577,924,975	99.2%			
				KPM : 581							
				Bajawa		1,024,524,958	1,019,724,958	99.5%			
				KPM : 1140							
				Bajawa Utara		449,174,981	449,174,981	100.0%			
				KPM : 519							
				Golewa		831,549,971	831,099,971	99.9%			
				KPM : 857							
				Golewa Barat		345,424,988	339,374,988	98.2%			
				KPM : 371							
				Golewa Selatan		819,874,973	815,374,973	99.5%			
				KPM : 870							
				Inerie		585,649,989	583,249,989	99.6%			
				KPM : 628							
				Jerebuu		480,724,979	480,724,979	100.0%			
				KPM : 507							
				Riung		814,499,963	814,274,963	100.0%			
				KPM : 935							
			Tahap III								
			Total KPM : 7.869	Aimere		734,649,975	731,917,975	99.6%			
			Jumlah Bantuan : Rp. 9.957.349.697	KPM : 550							
				Bajawa		1,364,149,956	1,363,016,956	99.9%			
				KPM : 1119							
				Bajawa Utara		617,199,980	616,866,980	99.9%			
				KPM : 531							
				Golewa		1,210,249,974	1,207,833,974	99.8%			
				KPM : 866							
				Golewa Barat		532,949,987	532,149,987	99.8%			
				KPM : 403							
				Golewa Selatan		1,123,399,965	1,121,399,965	99.8%			
				KPM : 865							
				Inerie		819,224,990	818,424,990	99.9%			
				KPM : 623							
				Jerebuu		636,549,977	636,549,977	100.0%			
				KPM : 493							
				Riung		1,102,774,962	1,102,224,962	100.0%			
				KPM : 932							
				Riung Barat		585,599,987	585,599,987	100.0%			
				KPM : 532							
				Soa		761,549,962	760,966,962	99.9%			
				KPM : 610							



				Wolomeze		469,049,982	466,649,982	99.5%			
				KPM : 345							
				Tahap IV							
			Total KPM :8.018	Aimere		742,949,975	740,217,975	99.6%			
			Jumlah Bantuan :Rp. 10.094.024.709	KPM :552							
				Bajawa		1,378,649,958	1,373,183,958	99.6%			
				KPM :1136							
				Bajawa Utara		617,624,981	616,241,981	99.8%			
				KPM :535							
				Golewa		1,243,149,971	1,238,067,971	99.6%			
				KPM :901							
				Golewa Barat		538,399,988	534,066,988	99.2%			
				KPM :410							
				Golewa Selatan		1,123,274,973	1,121,274,973	99.8%			
				KPM :870							
				Inerie		844,974,989	844,174,989	99.9%			
				KPM :649							
				Jerebuu		646,624,979	646,624,979	100.0%			
				KPM :501							
				Riung		1,117,724,963	1,116,358,963	99.9%			
				KPM :951							
				Riung Barat		597,249,985	596,699,985	99.9%			
				KPM :542							
				Soa		754,299,967	753,716,967	99.9%			
				KPM :608							
				Wolomeze		489,099,980	485,949,980	99.4%			
				KPM :363							
2.	Kemeterian Pertanian	SP DIPA-018.08-0/2024 tanggal 24 Nopember 2023	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kelompok Bina Tani, Sadha I,Golewa Selatan	Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan	75.000.000	75.000.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Wae Bula, Piga I, Soa		75.000.000	0	0%	10 Ha	0%	Kegiatan tidak dapat dilaksanak karena cuaca dan akses jalan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan
		DIPA dan POK Tahun Anggaran 2024, Satker (249165-08-TP,Dlnas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prop NTT, Nomor SP DIPA-018.08.4.249165/2024, tanggal 03 April 2024	Pembangunan Irigasi Perpompaaan Besar	P3A Malamara II Desa Libunio,Soa		112.800.000	112.800.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Bedibua, Sangadeto, Golewa		112.800.000	112.800.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Nio Doa,Were V, Golsel		112.800.000	112.800.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Mukutabi, Seso, Soa		112.800.000	112.800.000	100%	10 Ha	100%	



				Kelompok Tani Puun Keo, Benteng Tawa, Riung Barat		112.800.000	112.800.000	100%	10 Ha	100%	
		DIPA dan POK T.A.2024, Satker (249165-08-TP,Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prop NTT, Nomor : SP DIPA-018.08.08.4.249165, tanggal 3 April 2024	Pembangunan Irigasi Perpompaan Besar	P3A Lagurea, Seso, Soa		112.800.000	112.800.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Riwulena 2, Nginamanu, Wolomeze		112.800.000	112.800.000	100%	10 Ha	100%	
		DIPA dan POK T.A. 2024, Satker (249165-08-TP),Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prop NTT, Nomor : SP DIPA-018.08.08.4.249165, tanggal 29 Agustus 2024	Pembangunan Irigasi Perpompaan Besar	P3A Tiwu Waru,Ngina manu		112.800.000	112.800.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Wela Muzi, Ngada I, Riung Barat		112.800.000	112.800.000	100%	10 Ha	100%	
		DIPA dan POK T.A. 2024, Satker (249165-08-TP),Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prop NTT, Nomor : SP DIPA-018.08.08.4.249165, tanggal 29 Agustus 2024	Pembangunan Irigasi Perpipaan	P3A Tiwubele I, Nginamanu, Wolomeze		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Tiwubele II, Nginamanu, Wolomeze		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Tiwubele III, Nginamanu, Wolomeze		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Tiwubele IV, Nginamanu, Wolomeze		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Tiwubele V Nginamanu, Wolomeze		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Tiwubele VI,Nginamanu, Wolomeze		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Tiwubele VII,Nginamanu, Wolomeze		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Tiwubele VIII,Nginamanu, Wolomeze		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Belaleo, Nginamau Barat, Wolomeze		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	
				P3A Liang Kao,Wue,Wolomeze		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	



				P3A Marobhonggo, Wue, Wolomeze		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	
				Keltan Taranage, Nirmala, Golsel		94.000.000	94.000.000	100%	10 Ha	100%	

- 3.2 Tugas Pembantuan Propinsi yang dilaksanakan oleh Daerah kabupaten Ngada;
Tidak terdapat tugas pembantuan propinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Ngada.
- 3.2.1 Target Kinerja;
- 3.2.2 Realisasi

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Propinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

- 3.3 Permasalahan dan Kendala;
Dinas Sosial
Secara umum tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan PKH ini terutama untuk penyaluran bansos dari Kementerian Sosial bagi masyarakat. Seluruh bantuan tersalurkan tepat waktu dengan jumlah yang cukup. Kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa dilakukannya realokasi dan refocusing anggaran menyebabkan beberapa kegiatan pendukung tidak dapat direalisasikan, hal ini diakibatkan pengalihan anggaran dimaksud untuk pencegahan dan penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19. Padahal kegiatan pendukung tersebut diperlukan untuk mempercepat upaya graduasi mandiri pada kelompok penerima PKH.
- 3.4 Saran dan Tindak Lanjut.
Dinas Sosial
Untuk kendala di atas, maka pada tahun 2024 dilakukan perubahan strategi pendekatan pelaksanaan program PKH dari yang semula mendorong capaian target graduasi mandiri kepada mempercepat penyaluran bansos PKH dan Bansos Beras PKH agar masyarakat miskin tidak mengalami dampak yang parah dalam menghadapi semua keterbatasan dalam masa krisis ekonomi pasca pandemi. Selain itu juga melatih KPM berusia potensial untuk dapat mengembangkan usaha ekonomis produktif.



BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- 1. Pendidikan Dasar
- 2. Pendidikan Kesetaraan
- 3. Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh daerah

Target capaian SPM urusan pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 162 tahun 2019 tentang Penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

4.1.3 Realisasi

Dari target yang ditetapkan diatas maka realisasi pencapaian SPM urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Jenis pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Rencana	Realisasi	Target Capaian (%)	Ket
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	27.643 orang	2.185 orang	83.87%	
2	Pendidika Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebanyak : 566 orang Paket A : 13 Paket B : 197 Paket c : 346	619 orang	509 orang	82.23%	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.188 Orang	3.723 Orang	51,79 %	

- a. Dari data Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) disimpulkan bahwa ada 12.13% kesenjangan antara target dan pencapaian. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti :
- Angka putus sekolah yang tinggi mempengaruhi rendahnya capaian partisipasi siswa pendidikan dasar dan menengah
 - Terdapat penduduk usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang mutasi keluar daerah



- mengikuti orang tua (transmigrasi) namun data kependudukannya masih di wilayah kabupaten Ngada
- b. Dari data Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan Pendidikan Non Formal Melalui Kelompok Belajar Baik di SKB Aimere maupun PKBM Bravo Star di Kecamatan Golewa, dimana dibuka ruang bagi masyarakat putus sekolah untuk mengenyam pendidikan Paket A, B, dan C, sehingga kabupaten Ngada sejak tahun 2016 menjadi Kabupaten bebas buta aksara.
- c. Dari data Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD disimpulkan bahwa ada 48.21% kesenjangan antara target dan pencapaian. Hal ini disebabkan beberapa karena : ada penduduk usia 5 – 6 tahun yang tidak masuk sekolah pada satuan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Ngada bersumber dari APBN (DAK Fisik dan Non Fisik) dan APBD II, sebesar **Rp. 117.158.701.279,-** (Seratus Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SD)	Rp.	225.564.000
2.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah (SD)	Rp.	379.215.100
3.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Rp.	219.885.000
4.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Rp.	282.096.100
5.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SD)	Rp.	367.010.000
6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (SD)	Rp.	69.550.000
7.	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah (SD)	Rp.	542.265.850
8.	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Rp.	2.067.000.000
9.	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan (SD)	Rp.	46.882.258.000
10.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah (SD)	Rp.	9.311.323.700
11.	Pengelolaan Dana BOS (SD)	Rp.	17.544.253.613
12.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS (SD)	Rp.	484.219.900
13.	Pembangunan Laboratorium (SD)	Rp.	1.083.641.200
14.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SD)	Rp.	1.783.960.000
15.	Penmbangunan Ruang Kelas Baru (SD)	Rp.	44.486.600
16.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Rp.	228.061.250
17.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SD)	Rp.	916.000.000
18.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Rp.	5.744.630.200
19.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SMP)	Rp.	1.220.486.400
20.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (SMP)	Rp.	586.527.150
21.	Pembangunan Laboratorium (SMP)	Rp.	1.419.253.500
22.	Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Rp.	262.607.000
23.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP)	Rp.	5.126.549.546
24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (SMP)	Rp.	126.594.150
25.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SMP)	Rp.	575.988.350
26.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (SMP)	Rp.	936.792.102



27.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarpras dan Utilitas (SMP)	Rp.	575.988.350
23.	Pengadaan alat praktek dan peraga (SMP)	Rp.	27.539.400
24.	Pengelolaan Dana BOS (SMP)	Rp.	10.932.866.478
25.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos (SMP)	Rp.	191.947.650
26.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMP)	Rp.	1.010.708.000
27.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (SMP)	Rp.	1.000.306.700
28.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SMP)	Rp.	465.048.400
29.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas (PAUD)	Rp.	518.270.450
30.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas/Guru (PAUD)	Rp.	24.134.300
31.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas (PAUD)	Rp.	73.313.920
32.	Pengadaan Mebel (PAUD)	Rp.	20.000.000
33.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)	Rp.	1.081.095.120
34.	Penyelenggaraan Proses Belajar (PAUD)	Rp.	140.034.000
35.	Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Siswa (PAUD)	Rp.	50.000.000
36.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (PAUD)	Rp.	243.572.000
37.	Pengelolaan Dana Bos (PAUD)	Rp.	1.777.800.000
38.	Pengelolaan Dana BOS (Kesetaraan)	Rp.	548.500.000
39.	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	Rp.	40.240.000
40.	Perhitungan dan Pemetaan pendidik dan tenaga pendidik satuan pendidikan dasar, PAUD dan Kesetaraan	Rp.	1.290.000.000
41.	Penataan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan bagi satuan pendidikan Dasar, PAUD dan Kesetaraan	Rp.	500.000.000
	JUMLAH TOTAL	Rp.	117.158.701.279

Berbagai sumber pembiayaan tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian Indikator SPM melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik kegiatan pokok yang mendukung pencapaian SPM secara langsung maupun kegiatan penunjang lainnya.

4.1.5 Dukungan Personil

Jumlah personil yang mendukung penyerapan dan pencapaian indikator standar pelayanan minimal bidang Pendidikan Kabupaten Ngada tahun 2024 adalah sebanyak 4.101 Orang yang terdiri dari Kepala Dinas 1 orang, Sekretaris 1 orang, Kepala Bidang 5 orang, Kepala Seksi 10 orang, Kepala Sub Bagian 3 orang, Pengawas 31 orang, Kepala Sekolah SMP 66 orang, Guru SMP/MTs 905 orang, pegawai SMP/MTs 209 orang, Kepala SD/MI 186 orang, Guru SD/MI 1.579 orang, Pegawai SD/MI 488 orang, Kepala PAUD 158 orang, Guru PAUD 254 orang, dan Pegawai TTK 177 orang.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- a. Kompetensi tenaga guru masih sangat terbatas;
- b. Belum meratanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan;
- c. Masih terdapat sarana dan prasarana yang belum optimal dalam mendukung proses pembelajaran;
- d. Rendahnya upaya-upaya penelusuran dan pengembangan minat serta bakat peserta didik;
- e. Kelembagaan manajemen berbasis sekolah masih belum optimal;
- f. Biaya penyelenggaraan pendidikan masih membebani orang tua peserta didik;
- g. Fasilitas sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;



- h. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan sistim pendidikan;
- i. Belum optimalnya minat sekolah serta kesadaran pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- j. Belum adanya pengembangan satuan bidang pendidikan berbasis kearifan lokal.

2. Solusi

- a. Melibatkan para guru dalam kegiatan kegiatan diklat, pelatihan maupun bimbingan teknis fungsional baik terkait tugas pokok dan fungsi guru maupun diklat fungsional tertentu demi peningkatan kompetensi guru di sekolah;
- b. Belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan: solusinya dengan Menata Penyebaran guru di setiap satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan yang ada dengan mempertimbangkan Ketersediaan Rombongan belajar, Status Kepegawaian guru yg ada, maupun kualifikasi dan kompetensi yg dimiliki demi terciptanya keseimbangan antara satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan lainnya, walaupun msh agak sulit menciptakan keseimbangan distribusi antara satuan pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara sekolah swasta dengan sekolah negeri;
- c. Mengalokasikan dana yang diperuntukan bagi peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung proses belajar mengajar;
- d. Mengupayakan alokasi anggaran yang diperuntukan bagi lomba – lomba kesiswaan sehingga berpengaruh pada kurangnya pengembangan minat dan bakat siswa;
- e. Mengoptimalkan peran serta komite sekolah / masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan;
- f. Pemerintah telah mengalokasikan dana BOS dan dana BOP serta Bosdik dan PIP;
- g. Pemerintah memenuhi kebutuhan sarana prasarana tersebut berdasarkan skala prioritas secara bertahap;
- h. Identifikasi permasalahan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, menyusun rencana tindak lanjut sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dengan mengalokasikan sumber daya dan sumber dana;
- i. Melakukan sosialisasi akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat, melalui berbagai kesempatan yang dilakukan baik oleh unsur dinas Pendidikan, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang peduli dengan Pendidikan Anak Usia Dini serta endorong Kepala Desa/Lurah untuk membuat Peraturan Desa atau bentuk lain yang mewajibkan anak usia 4 – 6 tahun untuk masuk sekolah di satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- j. Secara bertahap melakukan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, misalnya membangun / merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM terdiri atas :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;



- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
- k. berat;
- l. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- m. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*, yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

4.2.2 Target CapaianSPM oleh daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. SPM Kesehatan terdiri dari 12 jenis layanan dasar yang harus dikerjakan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dengan target untuk semua SPM harus tercapai 100%. Target layanan SPM bidang kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.2 Target SPM Kabupaten Ngada Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Outcome	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
7.	Pelayanan Kesehatan	Jumlah warga negara	100	Setiap tahun



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Outcome	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
	pada Usia Lanjut	usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
10.	Pelayanan Kesehatan ODGJB	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	Setiap tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melamahkan daya tahan tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Setiap tahun

4.2.3 Realisasi

Realisasi capaian SPM Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 4.2.3 Realisasi Capaian SPM

N0.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian (%)	Realisasi (%)	Keterangan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	90,27	Mencapai target
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	99,83	Tidak mencapai target
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	100	99,04	Tidak mencapai



N0.	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian (%)	Realisasi (%)	Keterangan
	Lahir			target
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100	99,72	Tidak mencapai target
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	91,68	Tidak mencapai target
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	55,49	Tidak mencapai target
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	73,68	Tidak mencapai target
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	63,67	Tidak mencapai target
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus	100	64,44	Tidak mencapai target
10.	Pelayanan Kesehatan ODGJB	100	100	Mencapai target
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	85,43	Tidak mencapai target
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	84,32	Tidak mencapai target

Berdasarkan tabel di atas, dari 12 indikator SPM yang menjadi urusan wajib kesehatan, terdapat 1 (satu) indikator SPM yang mencapai 100% yaitu Pelayanan Kesehatan ODGJB. Selain itu terdapat 5 (lima) indikator SPM yang mencapai realisasi di atas 90%, yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (90,27) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (99,83), Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (98,04), Pelayanan Kesehatan Balita (99,72), Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (91,68), 2 (dua) indikator SPM yang realisasinya di atas 80% yaitu Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC (85,43), Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (84,32), 1 (satu) indikator di atas 70% yaitu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (73,68), 2 (dua) indikator SPM di atas 60% yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (63,67), Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (64,44) dan 1 (satu) indikator di atas 50% yaitu Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (55,49).



4.2.4 Alokasi Anggaran

Pembiayaan kesehatan secara garis besar berasal dari 2 sumber yaitu pemerintah dan swasta (termasuk masyarakat). Pada sektor pemerintah pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengadaan fisik dan non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang direvisi pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2024.

Pengelolaan belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada mengikuti aturan belanja daerah yang berlaku. Anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan bersumber dari APBN (DAK Fisik bidang kesehatan, DAK Non Fisik bidang kesehatan, DBH Cukai Tembakau, JKN Puskesmas dan Spesific Grand) dan APBD II. Alokasi belanja seluruhnya untuk Dinas Kesehatan dan jaringannya tahun anggaran 2024 sebesar Rp225.198.257.356,93,00, dengan realisasi sebesar Rp180.021.334.074,45 atau 79,94%. Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja TA 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.2.4 (a) Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2024

No.	Uraian	Target	Realisasi	Sisa	%
1	DAK Fisik	111.038.972.000,-	86.287.741.402,-	24.751.230.598,-	77,71
2	DAK Non Fisik				
	- BOK Puskesmas	20.498.089.000,-	17.378.540.105,-	3.119.548.895,-	84,78
	- BOK Kabupaten	7.921.955.000,-	6.971.716.639,-	950.238.361,-	88,01
	- BOK Balai POM	328.223.000,-	198.281.100,-	129.941.900,-	60,41
3	JKN Kapitasi 20 Puskesmas	8.704.980.181,-	6.900.686.559,37	1.804.293.621,63	79,27
4	Spesific Grand	11.175.861.617,-	11.173.861.617,-	2.000.000,-	99,98
5	DBH Cukai Tembakau	38.874.550,-	38.874.550,-	-	100
6	DAU (termasuk gaji PNS dan honor dokter/BOKDA)	65.491.302.008,93	51.071.632.102,08	14.419.669.906,45	77,98

Berbagai sumber pembiayaan tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian 12 (dua belas) indikator SPM melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik kegiatan pokok yang mendukung pencapaian SPM secara langsung maupaun kegiatan penunjang lainnya. Rincian rincian belanja dalam program dan kegiatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.4 (b) Uraian Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
------------------------------------	--------	-----------	---



	ANGGARAN	ANGGARAN	
Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	225.198.257.356,93	180.021.334.074,45	79,94
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.456.802.930,93	58.718.220.792	77,82
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	319.505.000	312.110.750	97,69
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	128.735.000	127.537.308	99,07
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RPA-SKPD	20.170.000	20.170.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	170.600.000	164.403.442	96,37
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.701.503.930,93	51.137.259.054	79,04
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64.607.183.930,93	51.042.939.054	79,01
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.000.000	78.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.320.000	16.320.000	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.720.000	70.380.000	99,52
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	16.320.000	16.320.000	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.640.000	32.640.000	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.760.000	21.420.000	98,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.209.000	351.450.588	90,07
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.840.000	1.840.000	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.939.000	95.621.000	83,19
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.500.000	85.998.500	84,73
Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.000.000	19.675.000	85,54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.930.000	148.316.088	99,59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.657.496.000	9.544.550.000	98,83
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.581.986.000	6.574.800.000	99,89
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.500.000	80.500.000	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.995.010.000	2.889.250.000	96,47
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242.653.000	231.362.107	95,35



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	39.930.000	39.868.500	99,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.723.000	191.493.607	94,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.716.000	62.278.293	83,35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.716.000	62.278.293	83,35
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	140.935.368.676	110.224.920.549,45	78,21
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	106.514.239.780	81.683.357.718	76,69
Pembangunan Puskesmas	20.745.250.000	12.630.540.000	60,88
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	630.505.000	589.672.950	93,52
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2.386.250.000	1.655.520.000	69,38
Pengembangan Puskesmas	63.870.536.550	48.103.932.997	75,31
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	100.000.000	99.054.000	99,05
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.980.112.000	15.917.254.602	99,61
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	81.768.000	77.285.800	94,52
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.593.176.230	2.489.832.869	96,01
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	126.642.000	120.264.500	94,96
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.116.432.138	28.424.848.331,45	83,32
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	583.753.500	455.465.630	78,02
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	96.867.000	63.220.000	65,26
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	60.648.000	59.370.000	97,89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Balita	109.560.000	109.560.900	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.105.920.000	1.061.320.000	95,97
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita DM	249.701.750	249.079.000	99,75
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	53.923.000	53.923.000	100



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	574.746.900	537.734.250	93,56
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	59.640.000	43.200.000	72,43
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.369.778.000	3.586.838.099	66,80
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.138.414.550	374.704.550	32,91
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	359.168.000	356.397.000	99,23
Pengelolaan Surveillance Kesehatan	1.057.542.100	830.694.050	78,55
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	27.259.700	27.259.700	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.902.750.592	3.256.104.000	83,43
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.663.813.826	9.123.784.688	94,41
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	73.576.000	3.136.000	4,26
Operasional Pelayanan Puskesmas	3.818.204.000	3.267.466.189	85,58
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	26.000.000	15.790.000	60,73
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	347.244.000	202.452.277	58,30
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	263.719.700	225.323.910	85,44
Pengelolaan Pelayanan Orang dengan Tuberculosis	142.260.000	101.260.000	71,18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	29.320.000	18.260.000	62,28
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	159.953.520	157.777.688	98,64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	80.366.000	72.003.000	89,59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	4.762.302.000	4.144.084.400	87,02
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	304.696.758	116.714.500,-	38,31
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	304.696.758	116.714.500	38,31
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.101.437.750	7.576.721.533	93,52
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.222.754.000	6.091.659.079	97,89
Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Standar	5.965.050.000	5.885.994.679	98,67
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya	257.704.000	205.664.400	79,81



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Manusia Kesehatan			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.878.683.750	1.485.062.454	79,05
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.878.683.750	1.485.062.454	79,05
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	362.223.000	232.281.100	64,13
Pemberian Ijin Apotik, Toko Obat, Tokoh Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	110.720.100	103.281.000	93,28
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pemberian Ijin Apotik, Toko Obat, Tokoh Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	110.720.100	103.281.000	93,28
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RT	94.845.000	72.047.600	75,96
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan industri rumah tangga dan no P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	94.845.000	72.047.600	75,96
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pos Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	156.657.900	56.952.500	36,35
Pemeriksaan Pos Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan	156.657.900	56.952.500	36,35
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	342.425.000	278.258.000	81,26
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.456.000	33.980.000	98,61
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	34.456.000	33.980.000	98,62
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	307.969.000	244.278.000	79,32



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	307.969.000	244.278.000	79,32
TOTAL	225.198.257.356,93	180.021.334.074,45	79,94

4.2.5 Dukungan Personil

Peraturan Bupati Ngada Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada, salah satunya mengatur tentang mutu pelayanan dasar berupa standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan (bagian ketiga pasal 7). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 yang juga menyebutkan bahwa mutu pelayanan dasar juga mencakup standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan, untuk setiap indikator SPM.

Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, tidak semuanya terpenuhi di Puskesmas, terutama untuk pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, orang terduga tuberkulosis dan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Hal ini dikarenakan standar mutu dan kualitas personil untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin salah satunya adalah dokter spesialis kandungan, pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah dokter spesialis anak, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis adalah dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin.

Dokter spesialis tersebut hanya tersedia di RS rujukan saja, sementara di Puskesmas hanya memiliki dokter umum saja. Personil/sumber daya manusia kesehatan yang tersedia di Puskesmas tetap merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, namun di sisi lain tetap memperhatikan kemampuan daerah dan aturan-aturan lain yang berlaku. Adapun ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas untuk setiap SPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.5. Tabel Dukungan Personil

No	Indikator SPM	Tenaga Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024	Tenaga Kesehatan Yang tersedia di Puskesmas
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter Spesialis Obsgyn, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian dan Tenaga Gizi	Dokter Umum, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian dan Tenaga Gizi
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter Spesialis Obsgyn, Bidan, Perawat, Tenaga	Dokter Umum, Bidan, Perawat, Tenaga



No	Indikator SPM	Tenaga Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024	Tenaga Kesehatan Yang tersedia di Puskesmas
		Kefarmasian dan Tenaga Gizi	Kefarmasian dan Tenaga Gizi
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter spesialis anak, dokter, bidan atau perawat	Dokter Umum, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Gizi dan Kader Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter atau bidan atau perawat dan gizi	Dokter Umum, Bidan, Perawat, Tenaga Gizi dan Kader Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter/dokter gigi atau bidan atau perawat, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan Masyarakat dan kader kesehatan	Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kader Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter atau bidan atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat	Dokter Umum, Perawat, Tenaga Gizi dan Tenaga Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dokter atau bidan atau perawat, tenaga gizi dan tenaga kesehatan Masyarakat	Dokter Umum, Bidan, Perawat, Tenaga Gizi dan Tenaga Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter atau bidan atau perawat, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat	Dokter Umum, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian dan Tenaga Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Dokter atau bidan atau perawat, tenaga gizi, tenaga kesehatan Masyarakat, tenaga kefarmasian dan tenaga teknis medis (analisis)	Dokter Umum, Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kefarmasian dan Tenaga Teknis Medis (Analisis)
10	Pelayanan Kesehatan ODGJB	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	Dokter Umum dan perawat terlatih jiwa
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru/dokter atau perawat, ATLM (analisis teknik	Dokter Umum, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Teknis



No	Indikator SPM	Tenaga Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024	Tenaga Kesehatan Yang tersedia di Puskesmas
		laboratorium medik), peñata rontgen dan tenaga kesehatan masyarakat	Medis (Analis) dan Tenaga Kesehatan Masyarakat
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin/dokter atau perawat, bidan, ATLM dan tenaga kesehatan masyarakat	Dokter Umum, Perawat, Bidan, Tenaga Teknis Medis (Analis) dan Tenaga Kesehatan Masyarkat

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024, terkait pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM, sebagai berikut:

1. Proses pencatatan dan pelaporan data belum dilakukan secara baik, termasuk penginputan data secara elektronik. Selain itu validasi data bulanan tidak dilaksanakan secara rutin, sehingga hal ini berdampak pada kualitas data yang dilaporkan di tingkat kabupaten dan propinsi.
2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan RME (Rekam Medis Elektronik) baik jaringan maupun perangkat keras di Puskesmas. Masih ada 4 Puskesmas yaitu Lindi, Boba, Uluwae Raya dan Dona, yang masih memiliki kendala sinyal/jaringan terkait penerapan RME. Belum adanya tenaga rekam medis di beberapa Puskesmas dan hanya 7 Puskesmas yang sudah melakukan bridging dengan BPJS yaitu Puskesmas Kota, Surisina, Mangulewa, Koeloda, Waepana, Aimere dan Riung).
3. Belum optimalnya pengelolaan dana BOK Nonfisik, yang sudah melalui mekanisme BOK salur sejak tahun 2023 yang penyalurannya langsung ke masing-masing rekening. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan BOK Nonfisik Puskesmas, sebagai berikut:
 - a) Masih rendahnya penyerapan anggaran di Menu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) oleh Puskesmas yang diakibatkan dari keterlambatan pelaksanaan kegiatan (dimulai pada bulan Agustus) dan penetapan sasaran PMT yang terlalu tinggi dibandingkan dengan sasaran riil yang ada.
 - b) Belum optimalnya penatausahaan keuangan BOK Nonfisik di Puskemas, yang diakibatkan belum tertibnya administrasi keuangan. Pengelolaan keuangan masih BOK dan JKN, masih ditangani oleh tenaga kesehatan bukan oleh penata keuangan atau akuntan, sehingga menimbulkan beban kerja ganda.
 - c) Pengajuan RPD (Rencana Penarikan Dana) dilakukan di akhir bulan, yang seharusnya diinput pada awal bulan sesuai dengan RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) hasil lokakarya mini bulanan di Puskesmas.
 - d) Masih terlambatnya pengisian e-monev pada aplikasi e-renggar.



b. Solusi

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024, terkait pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM, sbb:

1. Pengadaan jaringan Starlink untuk 4 Puskesmas yaitu Lindi, Boba, Uluwae Raya dan Dona;
2. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak Dinas Infokom untuk membuat surat keternagan wilayah mudah terjangkau jaringan komunikasi sebagai dasar pembuatan *cons id* oleh BPJS;
3. Pelaksanaan kegiatan PMT sejak awal bulan. Selain itu pada bulan Maret 2025 akan dilakukan pergeseran anggaran antar menu, sehingga sasaran PMT dapat dirasionalisasikan Kembali sesuai dengan sasaran riil di Puskesmas;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penatausahaan keuangan di BOK Nonfisik di Puskesmas secara berkala;
5. Penambahan tenaga akuntansi untuk Puskesmas terkait pengelolaan keuangan;
6. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan skrining dan konseling faktor risiko PM dan PTM, pencatatan dan pelaporan faktor risiko PM/PTM dan monitoring evaluasi kegiatan;
7. Melaksanakan validasi data secara rutin baik triwulan maupun semester; dan
Optimalisasi program-program inovasi di Puskesmas untuk mendukung pencapaian target SPM.

4.2 Urusan Pekerjaan Umum

4.2.1 Jenis

Pelayanan

Dasar

Target :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – hari	100%	Setiap tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun

4.2.2 Capaian SPM oleh Daerah

Target :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari	100%	2024



2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2024
---	---	--	------	------

4.2.3 Realisasi :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – hari	300 SR	637 SR	2024
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	400 KK	859 KK	2024

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum bersumber dari dana DAU dan DAK Reguler sebesar Rp.14.029.061.001,-

4.2.5 Dukungan Personil

Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat berjumlah 68 orang yang terdiri dari :

- a) PNS
- b) Non PNS (Tenaga Kontrak)

No	Unit Kerja	Pendidikan			PNS / Non PNS	
		S2	S1	SMU	PNS	Non PNS
1	Sekretariat	1	14	6	15	6
2	Bidang Cipta Karya	-	21	-	5	16
3	Bidang Perumahan	-	9	8	8	19
					28	40

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah – langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM sebagai berikut :

- a) Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
- b) Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.
- c) Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- d) Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
- e) Belum sinerginya upaya implementasi SPM.
- f) Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.



- g) Belum tersedianya data base yang akurat di setiap urusan.
- h) Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

4.3 Urusan Perumahan Rakyat

4.3.1 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Sasaran	Batas waktu pencapaian	Keterangan
		Indikator	Nilai			
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Kab / Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau	Setiap Tahun	
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi i Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Meningkatnya lingkungan yang aman didukung dengan PSU	Setiap Tahun	

4.4.2 Realisasi

No	Indikator sasaran	Tahun 2023		% pencapaian target	Keterangan
		TARGET	REALISASI		
1.	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0	Tidak ada Data terkait indikator sasaran
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	12 Rumah	12 Rumah	100	Data tahun 2024

4.4.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp.270.940.000,- dikarenakan indikator Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni selama ini dilaksanakan oleh BPBD sehingga data terkait indikator-indikator terkait tidak tersedia..



4.4.4 Dukungan Personil

Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat berjumlah 19 orang yang terdiri dari :

- a) PNS
- b) Non PNS (Tenaga Kontrak)

No	Unit Kerja	Pendidikan			PNS / Non PNS	
		S2	S1	SMU	PNS	Non PNS
1.	Bidang Perumahan	-	5	2	7	12
	JUMLAH				7	12

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah – langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM sebagai berikut :

- a) Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
- b) Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.
- c) Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- d) Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
- e) Belum sinerginya upaya implementasi SPM.
- f) Belum tersedianya data base yang akurat di setiap urusan.
- g) Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

4.5 Urusan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Untuk jenis pelayanan dasar 1 dan 5 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sedangkan jenis pelayanan dasar 2, 3 dan 4 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan	100%	Setiap Tahun



		perkada		
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

4.5.3 Realisasi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	49	49	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	171.736	300	0,175%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	171.736	300	0,175%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3 Jiwa	230 Jiwa	1,34%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	15 orang	15 orang	100%

1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada sebagai berikut:
- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Ngada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Ngada Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Ngada



- b. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Ngada.
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana capaiannya 0,175 % yakni seluruh warga di 12 Kecamatan dengan total 300 orang berupa sosialisasi langsung di masing-masing kecamatan dan papan informasi publik di beberapa titik rawan bencana.
3. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana capaiannya 0,175 % berupa simulasi kebakaran, pencegahan dan mitigasi bencana di 12 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ngada.
4. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana capaiannya 1,34 % yakni 3 warga dari total seluruh 230 warga yang terdampak.
5. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Kebakaran di Ubedolumolo, Bajawa – Minggu, 11 Februari 2024, Pukul 02.00 Wita Pada 11 Februari 2024, pukul 02.00 Wita, kebakaran melanda rumah warga di Ubedolumolo, Bajawa.
 2. Kebakaran di Ngedukelu, Bajawa – Sabtu, 09 Maret 2024, Pukul 00.30 Wita Pada 9 Maret 2024, pukul 00.30 Wita, kebakaran terjadi di rumah warga di Ngedukelu, Bajawa.
 3. Kebakaran di Bajawa – Jumad, 19 Juli 2024, Pukul 02.00 Wita Pada 19 Juli 2024, pukul 02.00 Wita, terjadi kebakaran di dapur milik Bapak Rian Pati di Bajawa.
 4. Kebakaran di Lebijaga, Bajawa – Sabtu, 20 Juli 2024, Pukul 23.00 Wita Pada 20 Juli 2024, pukul 23.00 Wita, kebakaran melanda lahan dekat rumah warga di Lebijaga, Bajawa.
 5. Kebakaran di Ubedolumolo, Bajawa – Rabu, 11 September 2024, Pukul 19.00 Wita Pada 11 September 2024, pukul 19.00 Wita, terjadi kebakaran di lahan dekat rumah warga di Ubedolumolo, Bajawa.
 6. Kebakaran di Faobata, Bajawa – Kamis, 12 September 2024, Pukul 13.00 Wita Pada 12 September 2024, pukul 13.00 Wita, kebakaran terjadi di lahan dekat rumah warga di Faobata, Bajawa.
 7. Kebakaran di Jawameze, Bajawa – Sabtu, 14 September 2024, Pukul 13.00 Wita Pada 14 September 2024, pukul 13.00 Wita, kebakaran melanda lahan dekat rumah warga di Jawameze, Bajawa.
 8. Kebakaran di Bomari, Bajawa – Selasa, 24 September 2024, Pukul 19.00 Wita Pada 24 September 2024, pukul 19.00 Wita, terjadi kebakaran di kawasan hutan Wolobobo di Bomari, Bajawa.
 9. Kebakaran di Bomari, Bajawa – Selasa, 01 Oktober 2024, Pukul 10.00 Wita Pada 1 Oktober 2024, pukul 10.00 Wita, kebakaran kembali terjadi di kawasan hutan Wolobobo di Bomari, Bajawa.
 10. Kebakaran di Faobata, Bajawa – Kamis, 10 Oktober 2024, Pukul 19.45 Wita Pada 10 Oktober 2024, pukul 19.45 Wita, kebakaran terjadi di rumah milik Bapak Yohanes Tori di Lembah Indah, Faobata, Bajawa.
 11. Kebakaran di Bowali, Bajawa – Sabtu, 26 Oktober 2024, Pukul 13.00 Wita Pada 26 Oktober 2024, pukul 13.00 Wita, kebakaran melanda lahan di Boba, Bowali, Bajawa.
 12. Kebakaran di Tanalodu, Bajawa – Minggu, 27 Oktober 2024, Pukul 16.00 Wita Pada 27 Oktober 2024, pukul 16.00 Wita, kebakaran terjadi di lahan dekat pemukiman di Pipipodo, Tanalodu, Bajawa.



- 13. Kebakaran di Bokua, Bajawa – Senin, 28 Oktober 2024, Pukul 14.00 Wita Pada 28 Oktober 2024, pukul 14.00 Wita, kebakaran melanda lahan dekat pemukiman di Tanalodu dan Ngalisabu, Bokua, Bajawa.
- 14. Kebakaran di Sobo, Golowa Barat – Selasa, 26 November 2024, Pukul 11.00 Wita Pada 26 November 2024, pukul 11.00 Wita, kebakaran terjadi di rumah seorang guru di Desa Sobo, Golowa Barat.

Ada 15 kejadian kebakaran yang terjadi semua tertangani dengan baik.

4.5.4 .Alokasi Anggaran

1). Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Alokasi anggaran berjumlah Rp. 1.563.248.000 yang realisasi berjumlah Rp. 1.563.220.000 atau 99%.
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Alokasi anggaran untuk warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran berjumlah Rp. 244.046.100 yang realisasi berjumlah Rp. 243.495.982 atau 99,77 %.

2). Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada adalah sebesar Rp. 2.893.268.301,61 yang terdiri dari :

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp. 2.893.268.301,61 dan terealisasi sebesar Rp. 2.718.656.827.
- 2. Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.302.596.000 terealisasi sebesar Rp. 1.215.783.412.

Dana BTT sebesar Rp. 1.802.431.611 yang digunakan untuk :

No	Jenis Pelayanan Dasar	APBD TA 2024 (Rp)	APBN (Rp)	KETERANGAN
1	Angin Putting beliung di Desa Wue	106.587.000		LS
2	Banjir dan tanah longsor di jalur jalan Watumeze – Bena – Tololela	36.988.000	-	LS
3	Pencarian orang hilang di Pantai Aimere Kelurahan Aimere – Kecamatan Aimere	5.299.000		LS
4	Rehabilitasi irigasi Wolodala di Desa Sobo I Kecamatan Golewa Barat	24.400.000		LS
5	Bencana Tanah Longsor di Sarasedu - Takatunga - Laja	21.590.000		LS
6	Bencana tanah longsor di jalur jalan Bea - Tude - Desa Bea Pawe Kecamatan Golewa Barat	15.660.000		LS
7	Bencana tanah longsor di Hedhapoma - Desa Takatunga I - Kecamatan Golewa Selatan	18.440.000		LS



8	Penanganan Darurat Jembatan Darurat Dan Jalur Alternatif di jalur jalan Soa - Rowa Dusun Wolodhala Desa Sobo I Kecamatan Golewa Barat	74.281.000		LS
9	Bencana tanah longsor di Kecamatan Jerebuu	79.372.000		LS
10	Pembangunan sumur bor dalam rangka siaga darurat kekeringan di kabupaten Ngada	27.632.000		LS
11	Runtuhnya Tembok Penahan Tanah dan rusaknya badan jalan di Desa Latung- Kecamatan Riung	53.918.000		LS
12	Runtuhnya Tembok Penahan Tanah dan rusaknya badan jalan di Kelurahan Benteng Tengah - Kecamatan Riung	86.105.900		LS
13	Pembangunan Tembok Penahan Tanah di desa Aimere Timur Kecamatan Aimere	14.085.500		LS
14	Rehabilitasi saluran irigasi Mata Ara di Desa Malanuza Kecamatan Golewa	33.913.000		Dalam Proses Pengerjaan
15	Kebutuhan Logistik (buffer Stock) di kabupaten Ngada	299.619.500		Dalam Proses Pengerjaan
16	Pembangunan TPT di desa Were Kecamatan Golewa	189.070.000		Dalam Proses Pengerjaan
17	Perbaikan Saluran Irigasi Radawea Desa Tarawaja Kecamatan Soa	24.165.000		Dalam Proses Pengerjaan
18	Penanganan Darurat Rabies di kabupaten Ngada	508.450.000		Belum di cairkan
19	Runtuhnya Tembok Penahan Tanah RT. 13 Lodo, Desa Naru Kecamatan Bajawa	128.546.000		Belum di cairkan
20	Runtuhnya Tembok Penahan Tanah RT. 13 Lodo, Desa Naru Kecamatan Bajawa	128.546.000		Belum di cairkan
21	Runtuhnya Tembok Penahan Tanah RT.03 Bokeka, Desa Naru, Kecamatan Bajawa	15.750.000		Belum di cairkan
22	Pembangunan Plat Duicker 2 x 2 M Dan Jalan Alternatif di Desa Takatunga Kecamatan Golewa,	38.629.711		Belum di cairkan
	TOTAL	1.802.431.611		

4.5.5 Dukungan Personil

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

No	Bidang/Sekretariat	Jumlah
1.	Sekretariat	16 Orang
2.	Trantibum	78 Orang



3.	Linmas	5 Orang
4.	Damkar	24 Orang
Total		123 Orang

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Kepala BPBD	Ada
b. Unsur Pengarah (Tenaga Profesional/Ahli)	
c. Unsur Pelaksana; terdiri dari :	
1) Kepala Pelaksana BPBD	Ada
2) Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) sub bagian yaitu :	Ada
a) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	Ada
b) Sub Bagian Keuangan	Ada
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ada
Bidang	
3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas dua seksi, yakni :	Ada
a) Seksi Pencegahan	Ada
b) Seksi Kesiapsiagaan	Ada
4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas dua seksi, yakni :	Ada
a) Seksi Kedaruratan	Ada
b) Seksi Logistik	Ada
5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas dua seksi, yakni :	Ada
a) Seksi Rehabilitasi	Ada
b) Seksi Rekonstruksi	Ada
d. Kelompok Jabatan Fungsional:	
1) Analis Perencanaan	Ada
2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Ada
3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Ada
4) Pengadministrasi Umum	Ada
5) Pengadministrasi Keuangan	Ada
6) Bendahara	Ada

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

- a. Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah di kabupaten Ngada.
- b. Anggota lingkup Satpol PP belum mengikuti diklat dasar.
- c. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Masih kurangnya Anggaran yang dialokasikan untuk indikator SPM;.



- e. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan penanganan kejadian kebakaran;
- f. Masih kurangnya Sarana pemadam kebakaran yaitu kendaraan tangki air untuk mensuplai air pada saat kejadian kebakaran dan mobil patroli pemadam untuk pengamanan kendaraan pemadam kebakaran pada saat melaksanakan tugas;
- g. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan Undang-undang Lalu lintas khususnya skala prioritas bagi kendaraan Pemadam Kebakaran;
- h. Tidak ada peralatan pengaman bagi anggota pemadam kebakaran yang dapat mengancam nyawa petugas pada saat penanganan kejadian kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Kurangnya peralatan penanganan bencana longsor;
- b. Belum tersediaanya peralatan penanganan darurat untuk jembatan yang longsor, berlubang atau putus.

Solusi

Satuan Polisi Pamong Praja dan kebakaran

- a. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah kabupaten Ngada maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.
- b. Merencanakan Diklat Dasar anggota Satpol PP Kabupaten Ngada untuk mengikuti pendidikan dasar Pol PP.
- c. Bangun kemitraan yang intensif dengan penegak hukum lainya dan instansi terkait.
- d. Penyesuaian rencana kerja anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran agar sesuai dengan SPM dimaksud;
- e. Diperlukan penambahan sarana pemadam kebakaran berupa mobil tangki air dan mobil patroli pemadam kebakaran;
- f. Perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat berkaitan dengan UU Lalu lintas sehingga tidak menimbulkan keterhambatan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Perlu ditambahkan sarana keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran sehingga dapat memberikan pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1. Bekerjasama dengan Dinas PUPR untuk penggunaan alat berat (Loader dan Excavator) dalam penanganan bencana;
- 2. Untuk penanganan jembatan yang berlubang atau putus, saat ini masih menggunakan gelagar dari baja yang juga dipinjam dari Dinas PUPR agar aktivitas lalu lintas tetap berjalan, tetapi hal ini mengandung resiko bagi keamanan dan keselamatan pengendara yang melintas;

Sedangkan untuk jembatan yang putus dan perlu mendapat penanganan cepat maka dibuat telaan staf untuk mengakses dana tak terduga.



4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Bupati Ngada Nomor 162 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada, Jenis Pelayanan Dasar SPM urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan indikator pencapaian;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Penyandanag Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	100%	Setiap tahun	
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia Terlantar memperoleh rehabilitasisosial di	100%	Setiap tahun	



		luar panti			
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social di luar panti	100%	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap tahun	

Tabel di atas, memperlihatkan bahwa pelayanan sosial dasar yang diberikan kepada 5 (lima) kelompok utama PPKS yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat layanan adalah 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa SPM dan seluruh teknis pelayanannya merupakan hak konstitusi masyarakat yang harus diimplementasikan oleh pemerintah sesuai bidang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi yang ada. Oleh karenanya diperlukan seluruh strategi program dan kegiatan agar pemenuhan SPM dapat direalisasikan maksimal dan memastikan kebutuhan seluruh kelompok sasaran dapat dipenuhi dengan berkualitas.

Standar Pelayanan Minimal bidang sosial menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka target capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Ngada pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan sasaran 1.270 jiwa dan target 100%.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan sasaran 8.125 jiwa dan target 100%.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan sasaran 11.038 jiwa dan target 100%.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan sasaran 0 (nol) jiwa.
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota dengan sasaran 1.080 jiwa dan target 100%.

4.6.3 Realisasi

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Ngada Tahun 2024 adalah 47,5 % dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Ngada Tahun 2024 :



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah 2024	Realisasi Pencapaian SPM 2024	Keterangan
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	100%	86,77%	Pencapaian SPM belum mencapai target
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100 %	Pencapaian SPM mencapai target yang ditetapkan
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia Terlantar memperoleh rehabilitasisosial di luar panti	100%	48,33%	Pencapaian SPM masih sangat rendah
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social di luar panti	100%	-	Pada tahun 2024 SPM ini tidk dicapai sesuai target karena Tidak ada PMKS Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ngada
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	Pencapaian SPM mencapai target yang ditetapkan

Adapun capaian SPM bidang sosial tahun 2024 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 162 Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti

Indikator pencapaian : Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti

Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun sebanyak 1.102 jiwa yakni terdiri dari penerima bantuan sosial oleh Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 971 jiwa, 1.006 jiwa Penerima Manfaat Bantuan Sosial Uang yang bersumber dari Anggaran APBD II dari total Penyandang disabilitas di kabupaten Ngada yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar Panti sebanyak 1.270 jiwa sehingga persentase capaian SPM ini sebesar 86,77 %.



b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti

Indikator pencapaian : Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Jumlah Anak Terlantar Luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun pada tahun 2024 mencapai sebanyak 8.125 anak terdiri dari Anak Terlantar yang memperoleh bantuan sosial dari Bantuan Asistensi Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar (Yatim Piatu) oleh Sentra Efata Naibonat Kupang Propinsi NTT sebanyak 48 orang, penanganan bagi Anak anak yang mengalami traumatic korban kasus asusila sehingga dilakukan pendampingan dalam persidangan kasus sebanyak 17 anak, Bantuan Sosial Uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebanyak 30 anak, Anak Terlantar yang membutuhkan penanganan lanjutan dan dirujuk ke Panti Taruna Harapan Lambata sebanyak 3 orang serta Anak usia sekolah yang diberikan bantuan melalui program Keluarga Harapan sebanyak 8.027 anak. Semuanya Anak Terlantar ini mendapat pelayanan rehailitasi sosial sehingga persentase capaian SPM ini sebesar **100 %**.

c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti

Indikator pencapaian : Jumlah warga Negara Lanjut Usia Terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Jumlah Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun sebanyak 5.335 jiwa yakni Lansia terlantar penerima bantuan Bantuan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada sebanyak 27 orang berupa Uang untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, Lansia Terlantar penerima Program Keluarga Harapan yang bersumber dari dana APBN 5.308 jiwa, dari total Lanjut usia terlantar di kabupaten Ngada yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar Panti sebanyak 11.038 jiwa sehingga persentase capaian SPM ini sebesar **48,33%**.

d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti

Indikator pencapaian: Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti

Capaian indikator ini adalah 0 (nol) tidak memiliki data dukung untuk pencapaian SPM, karena PMKS Gelandangan dan Pengemis tidak ada di Kabupaten Ngada.

e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Indikator pencapaian : Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran sebanyak 1.080 jiwa yakni terdiri dari korban bencana sosial lainnya yang ditangani oleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa permakanaan beras sebanyak 96 KK atau 480 jiwa serta bantuan permakanaan beras bagi korban bencana social lainnya yang mengalami kemiskinan ekstrim sebanyak 120 KK atau 600 jiwa, dimana semuanya terbantu sehingga persentase capaian SPM ini sebesar **100%**.

4.6.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	APBD II 2024 (Rp)	APBN (Rp)	APBD I (Rp)
----	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------



1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	378.600.000	3.554.400.000	-
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	82.590.000	12.156.700.000	57.600.000
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia Terlantar memperoleh rehabilita sisosial di luar panti	279.000.000	13.819.200.000	-
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	-	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	373.206.536	144.000.000	29.635.200

Alokasi anggaran kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2024 sebesar Rp. 29.641.931.736,- terdiri dari alokasi anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp.1.047.631.736,- dan APBN sebesar Rp.28.594.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- e. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar pantiRp. 3.276.000.000,-
- f. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Rp. 12.289.300.000,-
- g. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Rp. 12.865.200.000,-
- h. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Rp. 0,-
- i. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Rp. 546.841.736,-

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Pada tahun 2024 personil yang terlibat dalam pelayanan dasar SPM Bidang Sosial di Kabupaten Ngada antara lain sebagai berikut :



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil	
			PNS	NON PNS
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	5 Pejabat Struktural, 2 orang kelompok Pejabat Fungsional Tertentu & 5 JFU	83 orang
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	5 Pejabat Struktural, 2 orang kelompok Pejabat Fungsional Tertentu & 5 JFU	83 orang
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia Terlantar memperoleh rehabilitasisosial di luar panti	5 Pejabat Struktural, 2 orang kelompok Pejabat Fungsional Tertentu & 5 JFU	83 orang
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	5 Pejabat Struktural, 2 orang kelompok Pejabat Fungsional Tertentu & 5 JFU	83 orang
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	4 Pejabat Struktural, 3 orang kelompok Pejabat Fungsional Tertentu & 7 JFU	83 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	Keterbatasan fiscal daerah berdampak pada penanganan masalah kesejahteraan sosial tidak dapat terlayani secara maksimal sehingga permasalahan social tidak dapat tertangani secara optimal; Masih banyak Penyandang disabilitas yang tidak dapat diberikan rehabilitasi sosial	Mengusulkan bantuan dana yang bersumber dari dana APBN dan memaksimalkan tenaga Peksos/ pendamping ODK untuk terus menginput kelengkapan data Penyandang disabilitas



			karena pengurangan kuota yang sangat signifikan dimana mengalami perubahan regulasi tingkat pusat yakni penyandang disabilitas masuk kedalam program PKH, namun belum mengakomodir seluruhnya	
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Kegiatan Penanganan Anak Terlantar tidak terakomodir oleh sumber pembiayaan Dana APBD karena keterbatasan fiskal daerah, berharap oleh Program Bantuan Pusat berdampak pada kurang optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial Anak Terlantar Luar Panti	Memprogramkan kegiatan penanganan terhadap Anak-anak terlantar yang belum terakomodir melalui sumber pembiayaan Dana APBD
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia Terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Keterbatasan fiskal daerah berdampak pada penanganan masalah kesejahteraan sosial tidak dapat terlayani secara baik sehingga permasalahan social tidak dapat tertangani secara optimal; Cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Melakukan kerjasama dengan LKS di Kabupaten lain dalam penaganan Rehabilitasi Sosial bagi Lansia Terlantar dan tetap berkoordinasi dengan pihak swasta dalam pembentukan LKS Lansia



			terlantar di luar panti belum mencapai target karena tidak mendapat bantuan dana dari pusat dikarenakan daerah tidak mampu menyediakan LKS dalam menampung PMKS Lanjut usia terlantar	Terlantar; Mengusulkan bantuan dana APBD II untuk penanganan Lansia Terlantar
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social di luar panti	Tidak ada pencapaian target SPM ini	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	-	-

Permasalahan :

- 1). Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti belum mencapai target, Penyandang Disabilitas masih memerlukan program perlindungan kebutuhan dasar berdasarkan data yang ada, hal ini kurang memadai dalam hal pendanaan dan berdampak pada pelayanan penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fiskal daerah.
Alasan lainnya terjadi Pengurangan kuota yang sangat signifikan dimana mengalami perubahan regulasi tingkat pusat yakni penyandang disabilitas masuk kedalam program PKH, namun belum mengakomodir seluruhnya;
- 2). Cakupan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti tercapai dengan baik namun tidak adanya alokasi anggaran bagi Anak Terlantar melalui APBD sehingga tidak dapat mencakup penanganan terhadap anak terlantar secara optimal, namun capaian rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti menjadi tinggi karena bantuan program-program pusat;
- 3). Cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti belum mencapai target karena minimnya alokasi anggaran untuk rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar melalui dana kebutuhan dasar diluar Panti serta tidak mendapat bantuan dana dari pusat disebabkan daerah tidak mampu menyediakan LKS dalam menampung PMKS Lanjut usia terlantar;



- 4). Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 0 (nol), sehingga untuk SPM ini tidak ada pencapaian target;
- 5). Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS ditemukan masalah keterbatasan SDM terlatih dan ketersediaan sarana dan prasarana terutama rumah antara/rumah singgah sebagai temporary shelter dalam proses penanganan kasuistik tertentu;
- 6). Belum semua pelayanan PPKS memiliki SOP pelayanan yang baku dalam konteks intervensi kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Solusi :

- 1). Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah yang terkait dalam penanganan PPKS terutama yang dapat diajak bekerjasama dalam implementasi
- 2). Memperkuat pengetahuan petugas pelaksana pelayanan PPKS terkait teknis penanganan kasuistik tertentu, memanfaatkan orsos yang ada untuk mengganti peran-peran penampungan sementara dalam penanganan PPKS
- 3). Updating data PPKS berkala.
- 4). Memprogramkan kegiatan penanganan terhadap Anak-anak terlantar di luar panti yang belum terakomodir melalui sumber pembiayaan Dana pusat.
- 5). Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 6). Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS
- 7). Membuat proposal ke Kementrian Sosial untuk memperoleh akses dalam pemberian bantuan pelayanan dasar untuk SPM bidang sosial



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahannya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun anggaran 2024 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada kepada Menteri Dalam Negeri secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Ngada Tahun 2024. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2024 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada maupun DPRD Kabupaten Ngada, serta masyarakat secara luas. Sedangkan beberapa hal yang tidak mencapai target akan tetap diupayakan di tahun mendatang agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan menjadi optimal. Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Ngada Tahun 2024 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Ngada. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua.